



**EVALUASI MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) INFRASTRUKTUR
JALAN DI KOTA SEMARANG**

Skripsi

Disusun untuk memenuhi persyaratan mengikuti skripsi

Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Penyusun

DINA PUSPITA WULANDARI

14020220140076

DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK K. REMBANG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Tel./Faks. (024) 746054037
Laman: [www.fkip\[at\]undip.ac.id](http://www.fkip[at]undip.ac.id)
Pos-el: [fkip\[at\]undip.ac.id](mailto:fkip[at]undip.ac.id)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH (SKRIPSI/TA*)

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap : Dina Puspita Wulandari
2. NomorIndukMahasiswa : 14020220140076
3. Tempat / Tanggal Lahir : Blora, 14 Maret 2002
4. Jurusan / Program Studi : Administrasi Publik Rembang
5. Alamat : Jalan Sumurboto II no 8 Ngesrep, Banyumanik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi / TA) yang saya tulis berjudul :
Evaluasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Infrastruktur Jalan di Kota
Semarang

Adalah benar-benar Hasil Karya Ilmiah Tulisan Saya Sendiri, bukan hasil karya ilmiah orang lain
dan juga tidak mengandung plagiasi dari sumber informasi lainnya. Hal ini diperkuat dengan hasil uji
kemiripan Turnitin yang kurang dari 20 %.

Apabila dikemudian hari ternyata karya ilmiah yang saya tulis itu terbukti bukan hasil karya ilmiah
saya sendiri atau hasil plagiasi karya orang lain, maka saya sanggup menerima sanksi berupa
pembatalan hasil karya ilmiah saya dengan seluruh implikasinya, sebagai akibat kecurangan yang
saya lakukan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kesadaran
serta tanggung jawab.

Semarang, 6 November 2024

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Dr. Drs. R. Slamet Santoso, M.Si

Pembuat Pernyataan,

Dina Puspita Wulandari

Ketua PS S1 Administrasi Publik

Dr. Drs. R. Slamet Santoso, M.Si

*) Lampirkan dokumen hasil uji Turnitin yang menunjukkan uji kemiripan <20%

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Evaluasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(MUSRENBANG) Infrastruktur Jalan di Kota Semarang

Nama Penyusun : Dina Puspita Wulandari

NIM : 14020220140076

Departemen : Administrasi Publik K. Rembang

Semarang, 20 Desember 2024

Dekan



Dr. Drs. Teguh Yuwono M.Pol.Admin
NIP. 196908221994031003

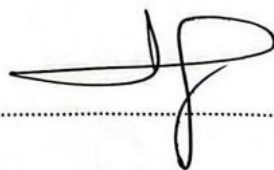
Wakil Dekan I



S. Rouli Manalu S.Sos., MCommSt., Ph.D.
NIP. 198209282005012001

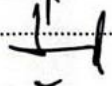
Dosen Pembimbing :

1. Dr. Drs. R. Slamet Santoso M.Si


(.....)

Dosen Penguji :

1. Dr. Dra. Dyah Lituhayu, M.Si
2. Dra. Nina Widowati M.Si


(.....)

(.....)

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah: 5-6)

Matahari tidak memiliki tujuan selain bersinar, begitu pula dengan sungai tidak memiliki tujuan mencapai selain laut. Setiap makhluk yang nyata ditakdirkan untuk sukses. Tidak ada tujuan lain yang bisa dicapai selain kesuksesan

Shams Tabrizi

Menuntut ilmu adalah taqwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang ilmu adalah dzikir, dan mencari ilmu adalah jihad

Imam Al Ghazali

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, skripsi ini Saya persembahkan kepada:

1. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya serta kemudahan, nikmat, cinta dan kasih sayang sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini,.
2. Kedua orang tua saya Ayah Budi Purnomo dan Ibu Nanik Asriyati yang selalu tercinta, yang selalu memberikan cinta, kasih sayang dan doa restu yang tiada henti kepada anaknya. Memberikan ketenangan, kenyamanan, motivasi, doa terbaik, dan menyisihkan finansialnya, sehingga saya bisa menyelesaikan masa studi saya. Kalian sangat berarti bagi saya.
3. Saudara penulis, Dani Wahyu Hermawan yang selalu mendukung dan memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Bapak Dr. Drs R. Slamet Santoso sebagai dosen pembimbing saya yang telah memberikan wawasan, ilmu pengetahuan, tuntunan, saran dan dedikasi yang luar biasa sehingga penulis dapat mencapai tujuan ini
5. Diri sendiri, terima kasih atas konsistensi, komitmen, kerja keras dalam menghadapi segala rintangan yang ada. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, kontribusi, dan inspirasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan lingkungan sekitar.

EVALUASI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) INFRASTRUKTUR JALAN DI KOTA SEMARANG

ABTSRAK

Infrastruktur jalan merupakan salah satu sektor penting dalam menunjang kemajuan perkotaan. Dalam perencanaan pembangunan kota dibutuhkan evaluasi agar rencana pembangunan bisa berjalan dengan maksimal. Evaluasi bisa dilakukan mulai dari tingkat dasar yaitu musyawarah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan evaluasi musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Infrastruktur Jalan di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purpose sampling dan snowball sampling. Evaluasi musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) diukur dengan menggunakan teori Perencanaan Deliberatif menurut Jurgen Habermas yaitu prinsip deliberasi, prinsip reasonableness, dan prinsip kebebasan. Keberjalanan evaluasi dipengaruhi oleh faktor pendorong dan penghambat menurut teori Partisipasi Masyarakat Menurut Sari dalam menurut Slamet (Nurbaiti, 2017:227) Temuan penelitian menunjukkan bahwa musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Infrastruktur jalan di Kota Semarang sudah berjalan cukup baik, namun masih terdapat beberapa hambatan. Antusiasme peserta cukup tinggi, prinsip keterwakilan terpenuhi, media yang digunakan mencukupi, dan pemberian materi lengkap. Namun diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan dalam segi mengawal dan mengawasi realisasi usulan musrenbang. Hasil penelitian dapat dijelaskan ada 3 faktor pendorong yaitu kesadaran dan kemauan dan partisipasi masyarakat. Untuk faktor-faktor yang menghambat musrenbang infrastruktur jalan di Kota Semarang dari segi pendidikan, besaran pendapatan dan lapangan pekerjaan yaitu masih terdapat keberpihakan keputusan LPMK, hasil musrenbang belum di share secara penuh, implementasi realisasi anggaran kualitasnya tergantung pengerjaan vendor dan nggaran terbatas.

Kata kunci : *Perencanaan Pembangunan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Deliberatif*

EVALUATION OF THE DEVELOPMENT PLANNING CONFERENCE (MUSRENBANG) OF ROAD INFRASTRUCTURE IN SEMARANG CITY

ABSTRACT

Road infrastructure is one of the important sectors in supporting urban progress. In urban development planning, evaluation is needed so that development plans can run optimally. Evaluation can be done starting from the basic level, namely deliberation. This study aims to determine and describe the evaluation of the road infrastructure development planning deliberation (Musrenbang) in Semarang City. This study uses a qualitative descriptive approach. The selection of informants was carried out using purpose sampling and snowball sampling techniques. The evaluation of the development planning deliberation (Musrenbang) was measured using the Deliberative Planning theory according to Jurgen Habermas, namely the principle of deliberation, the principle of reasonableness, and the principle of freedom. The evaluation process is influenced by driving and inhibiting factors according to the theory of Community Participation According to Slamet (Nurbaiti, 2017: 227). The research findings show that the road infrastructure development planning deliberation (Musrenbang) in Semarang City has been running quite well, but there are still some obstacles. The enthusiasm of the participants is quite high, the principle of representation is fulfilled, the media used is sufficient, and the provision of complete materials. However, it is necessary to increase community participation and improve in terms of monitoring and supervising the realization of musrenbang proposals. The results of the study can be explained that there are 3 driving factors, namely awareness and willingness and community participation. For factors that hinder the road infrastructure musrenbang in Semarang City in terms of education, income and employment, there is still bias in LPMK decisions, the results of the musrenbang have not been fully shared, the implementation of the budget realization depends on the quality of the vendor's work and the budget is limited.

Keywords: *Development Planning, Development Planning Deliberation, Deliberation Planning*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Infrastruktur Jalan di Kota Semarang”. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Bapak Suharnomo selaku Rektor Universitas Diponegoro
2. Bapak Teguh Yuwono selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
3. Pemerintah Bappeda Jawa Tengah, Bappeda Kota Semarang, Pemerintah Kecamatan Banyumanik, Ketua Karang Taruna Kecamatan Banyumanik, dan LPMK Kecamatan Banyumanik
4. Bapak Dr. Drs. R. Slamet Santoso, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik PSDKU Rembang sekaligus sebagai dosen pembimbing utama skripsi yang telah memberikan masukan, dorongan, kritik, saran, dan motivasi. Terima kasih banyak sudah menjadi orang tua

penulis. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dan menggali potensi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Ibu Dr. Draa. Dyah Lituhayu, M.Si selaku dosen wali dan Ibu Dra. Nina Widowati selaku dosen penguji 2
6. Seluruh Dosen Administrasi Publik FISIP UNDIP dan dosen Homebase Administrasi Publik Rembang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama belajar di jurusan Administrasi Publik Universitas Diponegoro. Semoga menjadi ladang amal dan berkah tersendiri bagi semua dosen pengajar.
7. Kedua orang tuaku, ayah Budi Purnomo dan ibu Nanik Asriyati serta adik Penulis Dani Wahyu Hermawan yang senantiasa berdoa, berusaha keras, dan memotivasi penulis dengan segala keterbatasan yang ada
8. Semua keluarga besar dari Ayah dan Ibu serta Adik-adik Sepupu dan Kakak-kakak, Sudarji Family, big family safuan, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang senantiasa mendukung penulis dalam segala hal. Semoga ilmu yang didapatkan bisa menjadi bekal untuk membahagiakan Ayah dan Ibu serta memberikan manfaat bagi banyak orang
9. Umi Layyinnatus Shufiyah, Abi dan seluruh keluarga dalem yang senantiasa memberikan support dan inspirasi kepada penulis

10. Teman-teman Sinau (Vinda, Danik, Bella, Yuli, dan Nawawi), Ka Novita Eka Sari dan Bang Mujab yang menjadi mentor penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengalaman penulis.
11. Sahabat sekaligus partner belajar penulis Benaya Ruth dan Farlinda Kurnia sobat sambat yang telah menjadi tempat cerita, memberikan motivasi, teman seperbimbingan yang telah mengajarkan semua step agar skripsi dapat terselesaikan secara cepat
12. Sahabat karib penulis (Affa, Rifqoh, Anita, Anisa, Izza, Anna, Fiqoh, Shafira, Mila, Alva,, Pingkan, Vanny, Athaya, Atikah, Zulfa, Ka Haida, dan sahabat-sahabat di Blora.
13. Rommate Aulia dan Eriqqa yang telah mengisi hal sehari-hari dengan hal-hal random, keceriaan dan menjadi keluarga tersendiri bagi Penulis
14. Teman-teman Publik Rembang angkatan 2020, 2021, dan 2022 yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan studi.
15. Teman-teman Tim KKN Desa Babadan
16. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datang dari

Allah dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Semarang, 9 Desember 2024

Dina Puspita Wulandari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR.....	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Permasalahan Masalah	15
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	15
1.2.2. Rumusan Masalah	16
1.3. Tujuan Penelitian	16
1.4. Manfaat Penelitian	17
1.4.1. Manfaat Akademis.....	17
1.4.2. Manfaat Praktis.....	17
1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis.....	18
1.5.1. Penelitian Terdahulu.....	18
1.5.2. Administrasi Publik	28
1.5.3. Paradigma Administrasi Publik	31
1.5.4. Kebijakan Publik	35
1.5.5. Perencanaan Pembangunan	39
1.5.6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan.....	40
1.5.7. Demokrasi Deliberatif	41
1.6. Kerangka Berfikir	44
1.7. Operasionalisasi Konsep.....	45

1.8. Argumen Penelitian	50
1.9. Jenis Penelitian	51
1.10. Situs Penelitian.....	52
1.11. Subjek Penelitian.....	52
1.12. Jenis Data	53
1.13. Teknik Pengumpulan Data.....	55
1.14. Teknik Analisis Data.....	56
 BAB II GAMBARAN OBJEK PENELITIAN	59
2.1. Profil Kota Semarang	59
2.2. Profil BAPPEDA Kota Semarang.....	65
2.3. Tujuan Musrembang.....	69
2.4. Susunan Acara Dalam Musrembang	70
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
3.1. Deskripsi Informan	71
3.2. Analisis Hasil Penelitian.....	72
3.2.1. Demokrasi Deliberatif dalam Evaluasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Infrastruktur Jalan di Kota Semarang	72
 BAB IV PENUTUP	110
4.1. Kesimpulan.....	110
4.2. Saran.....	112
 DAFTAR PUSTAKA	114
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah	3
Tabel 1.2 Daftar Usulan Musrenbang Non Fisik	10
Tabel 1.3 Daftar Usulan Musrenbang Fisik	12
Tabel 1. 3 Operasonalisasi Konsep	46
Tabel 1. 4 Opreasonalisasi Konsep Faktor Pendorong dan penghambat.....	48
Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kota Semarang.....	61
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kota Semarang	64
Tabel 2. 3 Susunan Acara Musrenbang.....	70
Tabel 3.1 Identitas Informan	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kondisi Jalan di Kota Semarang Tahun 2021	6
Gambar 1.2 Perkembangan Bidang Infrastruktur Jalan di Kota Semarang tahun 2016-2020	7
Gambar 1.3 Tabel Upaya Banjir dan Rob Tahun 2016 – 2020 di Kota Semarang:	10
Gambar 3.1 Rapat Koordinasi LPMK dengan Camat Semarang Utara.....	76
Gambar 3.2 Materi Musrenbang	82
Gambar 3.3 Konsultasi Publik Ranwal RKPD Kota Semarang 2024.....	87
Gambar 3.4 Rembug Warga Kelurahan Sekayu	96
Gambar 3. 5 Daftar Usulan Masyarakat dalam E-rembugan Jateng.....	101
Gambar 3.6 Website E-Rembugan Jawa Tengah.....	102
Gambar 3.7 Live Streaming Pelaksanaan Musrenbang Kota Semarang 2023.....	105
Gambar 3.8 Pengumuman Pelaksanaan Musrenbang	107

BAB 1

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan yang dimiliki oleh Negara Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum. Maka dari itu dibutuhkan suatu perencanaan untuk mewujudkan hal tersebut. Menurut Conyers (1991), perencanaan adalah upaya sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan menurut Grath adalah proses yang digunakan untuk memilih dan membangun tindakan terbaik untuk mencapai tujuan. Berdasarkan definisi diatas terdapat beberapa elemen penting yaitu tujuan (apa yang ingin dicapai), kegiatan (apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan tujuan), dan waktu (kapan kegiatan tersebut akan dimulai). Dengan demikian, perencanaan dapat diartikan sebagai respon terhadap kemungkinan hal di masa mendatang.

Pembangunan merupakan sebuah multifase yang melibatkan beragam transisi secara mendasar mulai dari struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi dalam rangka melakukan pertumbuhan ekonomi semakin cepat, mengatasi perbedaan, dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, pembangunan adalah proses perubahan sosial yang melibatkan banyak aktor untuk mencapai kesejahteraan rakyat Tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memajukan kebaikan bersama. Pembangunan nasional bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi seluas-luasnya. Pembangunan daerah adalah bagian dari

pembangunan nasional dan dilakukan menyesuaikan kondisi masing-masing daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan daerah dan pusat harus selaras dan sinkron. Pembangunan daerah biasanya memperhatikan kondisi dan potensi setiap daerah yang disesuaikan dengan dinamika pembangunan nasional.

Ketidakmerataan infrastruktur di Indonesia masih belum terselesaikan. Peningkatan kebutuhan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kerangka kerja telah diperbarui akan menarik investor untuk proyek infrastruktur dengan meningkatkan daya saing nasional untuk memprioritaskan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur juga untuk mempercepat pertumbuhan nasional. Oleh karena itu, mendorong investasi produktif dan pertumbuhan ekonomi pada gilirannya meningkatkan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Dalam UU Nomor 23 tahun 2014 yang mengatur tentang Otonomi Daerah menetapkan bahwa pemerintah daerah, dunia usaha, dan semua stakeholder lainnya yang ikut bertanggung jawab. Untuk itu, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan jangkauan yang terbatas sehingga membutuhkan perpanjangan tangan pemerintah daerah untuk mengurus pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat juga berkewajiban menyelaraskan pembangunan yang dihelat pemerintah daerah agar sejalan dengan pembangunan nasional. Otonomi daerah diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah sehingga tercipta keseimbangan pembangunan antar daerah. Realisasi otonomi daerah berkaitan

dengan tiga hal yang jelas, stabilitas hukum, efisiensi, efektivitas pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Perubahan sosial ekonomi yang disebabkan oleh pembangunan infrastruktur ini berbeda-beda di setiap daerah. Pembangunan wilayah di Indonesia tidak merata. Banyak negara memiliki infrastruktur yang tidak merata. Kota Semarang termasuk kota dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Indonesia. ini bisa dapat dilihat dari PRDB Provinsi Jawa Tengah. Menurut Kabupaten/Kota Pada Tahun 2019-2023 berdasarkan gambar berikut :

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah

KABUPATEN/KOTA Regency/Municipality	2020	2021	2022	2023
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kab. Cilacap	104.543	109.654	121.022	132.425
2. Kab. Banyumas	53.682	56.920	62.817	68.752
3. Kab. Purbalingga	25.094	26.394	28.824	31.225
4. Kab. Banjarnegara	21.694	22.828	24.996	27.191
5. Kab. Kebumen	28.015	29.563	32.615	35.764
6. Kab. Purworejo	18.646	19.603	21.353	23.188
7. Kab. Wonosobo	18.839	19.857	21.587	23.330
8. Kab. Magelang	32.462	34.176	37.432	40.680
9. Kab. Boyolali	32.688	34.897	38.789	42.736
10. Kab. Klaten	39.940	42.271	46.592	51.274
11. Kab. Sukoharjo	36.891	38.990	42.781	46.521
12. Kab. Wonogiri	29.167	30.581	33.692	36.943
13. Kab. Karanganyar	37.023	39.157	43.088	47.204
14. Kab. Sragen	37.851	40.088	44.243	48.570
15. Kab. Grobogan	27.269	28.815	31.807	34.759
16. Kab. Blora	24.004	26.929	39.960	31.753
17. Kab. Rembang	18.944	20.071	22.107	24.130
18. Kab. Pati	43.289	45.566	50.119	54.775
19. Kab. Kudus	109.539	108.725	114.565	121.310
20. Kab. Jepara	30.175	32.046	35.011	38.023
21. Kab. Demak	26.547	27.650	30.252	33.017
22. Kab. Semarang	49.047	51.796	56.640	61.284
23. Kab. Temanggung	21.557	22.628	24.726	26.912
24. Kab. Kendal	49.047	51.796	56.640	61.284
25. Kab. Batang	21.557	22.628	24.726	26.912
26. Kab. Pekalongan	22.802	24.030	29.915	32.355
27. Kab. Pemasang	25.821	27.444	29.915	32.355
28. Kab. Tegal	35.300	37.335	40.770	44.440
29. Kab. Brebes	47.059	48.966	53.709	57.599
30. Kota Magelang	8.713	9.179	10.073	10.983
31. Kota Surakarta	47.622	50.372	55.849	60.486
32. Kota Salatiga	13.272	204.871	15.381	16.773
33. Kota Magelang	188.732	11.461	227.374	248.903
34. Kota Surakarta	10.849	16.017	12.591	13.744
35. Kota Tegal	15.225	16.017	17.680	19.162
Jml Kab/Kota Total of Reg/Num	1.346.505	1.421.178	1.560.432	1.696.570
Provinsi/Province	1.347.222	1.419.735	1.559.571	1.696.795

Sumber : BPS Indonesia Tahun 2019-2023

Berdasarkan Data Tabel Tingkat Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2019 sampai 2023, Kota Semarang berhasil meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang tadinya melambat -1,85 persen di 2020, menjadi cepat tumbuh sebesar 5,16 persen pada tahun 2021. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang pada 2023, tumbuh 5,79 persen, tertinggi se-Jawa Tengah. Jumlah itu meningkat dibandingkan 2022 lalu sebesar 5,73 persen. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ditunjang dengan salah satu sektor strategis yaitu infrastruktur jalan.

Pemerintah, bagaimanapun, memainkan peran terpenting dalam proses ini. Perencanaan pembangunan mengarahkan cara menggunakan sumber daya pembangunan yang terbatas untuk mencapai tujuan sosial ekonomi yang lebih baik dengan lebih efektif dan efisien (Listyaningsih,2014:92). Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk program pemberdayaan atau pembangunan berhasil. Pemerintah dapat bekerja sama dengan masyarakat. Selain itu, sistem perencanaan diterapkan secara berjenjang, mulai dari desa, selama proses perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan Pembangunan Kota Semarang diselenggarakan dengan didasarkan pada visi yang tertuang dalam RPJMD Kota Semarang 2021-2026 yaitu Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat yang berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI ber Bhineka Tunggal Ika. Visi tersebut diwujudkan dalam Misi sebagai berikut :

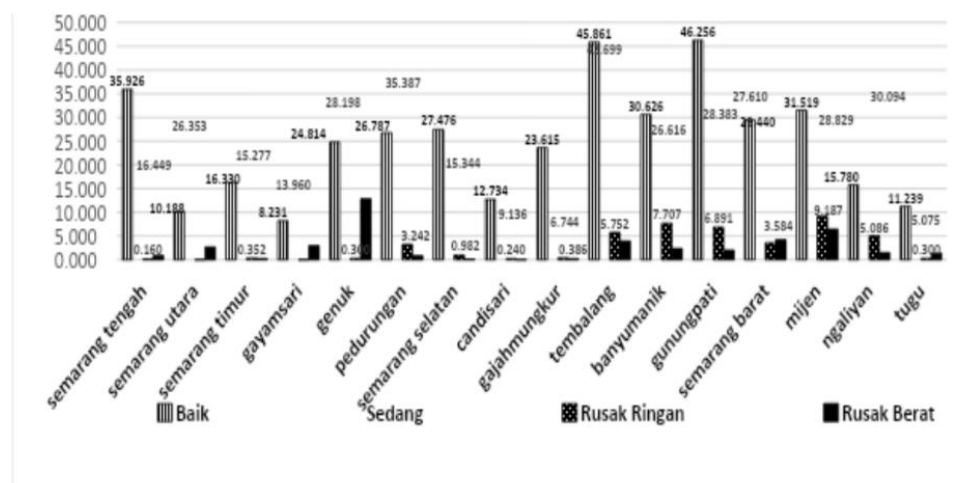
1. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif dalam rangka mencapai kesejahteraan dan keadilan;

2. Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan penelitian dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila;
3. Menjamin kemerdekaan masyarakat dalam menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan melindungi kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara adil
4. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang memperhatikan dampak lingkungan dalam mendukung kemajuan kota
5. Melaksanakan reformasi birokrasi pemerintah secara dinamis dan menyusun peraturan yang sesuai nilai-nilai Pancasila

Kondisi infrastruktur jalan bisa dilihat berdasarkan informasi dari RPJMD

Kota Semarang Tahun 2021-2023 Sebagai berikut:

Gambar 1.1 Kondisi Jalan di Kota Semarang Tahun 2021



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2021

Sumber : RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026

Dari total panjang jalan sesuai surat keputusan Walikota tentang status jalan sepanjang 839.901 meter, jalan dalam kondisi baik mencapai 731.013 meter (87,04%), kondisi sedang sepanjang 47.108 meter (5,61%), (atau jalan kondisi mantap sepanjang 778.121 meter atau sebesar 92,64%), sisanya adalah kondisi rusak ringan sebesar 37.855 meter (4,51%) dan kondisi rusak berat sebesar 23.925 meter (2,85%). Sedangkan jika dilihat secara kewilayahan, kondisi jalan rusak berat banyak terjadi di wilayah-wilayah dengan kondisi tanah yang cenderung labil dan intensitas yang cukup tinggi antara lain: Kecamatan Genuk (30,06% dari total panjang jalan dengan kondisi rusak berat), Tembalang (9,27%), dan Mijen (15,13%) dan Semarang Barat (9,89%)

Implementasi infrastruktur di Kota dapat dilihat berdasarkan data dari RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Gambar 1.2 Perkembangan Bidang Infrastruktur Jalan di Kota Semarang tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun					Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	
a.	Pekerjaan Umum :						
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (%)	88,07	91,11	89,54	89,65	92,64	Belum Tercapai
2	Rasio Jaringan Irigasi (%)	75,5	76	77	78	79	Belum Tercapai
3	Penyediaan air baku	87,50%	87,50%	87,5%	87,5%	87,5%	Tercapai
4	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per 1000 penduduk (%)	2,5	2,74	2,78	2,88	2,88	Tercapai
5	Panjang jalan dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) dan sedang	636,25	658,18	752,05	752,97	778,12	Belum Tercapai
6	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)	44,1	44	32	32	32,00	Belum Tercapai
7	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	80,5	82	80	80	95,85	Tercapai
8	Persentase irigasi dalam kondisi baik	75	76	77	78	79	Belum Tercapai
9	Persentase penanganan sampah	87,58	87,5	88,5	89	89,5	Belum Tercapai
10	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)	2,5	2,74	2,78	2,88	2,88	Tercapai
11	Rumah tangga pengguna air minum (%)	88,50	88,50	95,33	95,40	96,28	Belum Tercapai
12	Rumah tangga ber- Sanitasi (%)	85,87	86,08	86,26	86,46	86,51	Belum Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Semarang

Berdasarkan data tabel diatas, maka ketercapaian infrastruktur jalan di Kota Semarang belum tercapai secara maksimal dikarenakan untuk proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang masih fluktuatif dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 1,03 persen, sedangkan di tahun berikutnya tahun 2017 ke tahun 2018 data mengalami penurunan sebesar 1,66 persen. Selain itu di tahun 2019 ke tahun 2020 data kondisi jalan dalam keadaan baik dan sedang mengalami kenaikan sebesar 2,99 persen.

Penyediaan dan pemeliharaan jalan juga belum maksimal karena tidak semua jalan dilengkapi dengan fasilitas standar, terdapat titik-titik rawan kemacetan dan jalan kawasan strategis belum optimal. Selain itu, anggaran pendapatan dan belanja

daerah tahun 2023 meliputi perbaikan infrastruktur jalan di kawasan tersebut, Jalan Hamka Profesor, Jalan MT Haryono, Jalan Simpang Palawan, Tugu Muda, Jalan Pemuda, dan Jalan Gajah Mada. Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang melalui DPU Semarang terus mempercepat banyak pembangunan infrastruktur jalan di Kota Semarang. Hal tersebut disebabkan oleh kendala anggaran yang cukup besar yang diperlukan untuk proyek tersebut. Maka dari itu dibutuhkan kerja sama partisipasi antara pemerintah dan masyarakat dalam agar implementasi program pembangunan infrastruktur jalan bisa berjalan lebih maksimal.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Winarendra Imam Prakoso dan Ari Subowo pada tahun 2018 yang berjudul menyatakan bahwa musrenbang di Kota Semarang belum efektif karena tidak ada kesempatan masyarakat dalam memberikan pendapatannya. Belum dilakukan secara terbuka dan saling percaya. Pada proses perumusan masalah tidak dilaksanakan secara tepat dikarenakan dilakukan pada sebelum Musrenbang Kecamatan yang hanya di hadiri oleh pengurus Kecamatan, Kelurahan dan LPMK tanpa di hadiri oleh masyarakat umum. Pada proses identifikasi daya dukung berupa uang, tanpa memperhatikan secara detil daya dukung yang merupakan potensi di wilayah tersebut. Tingkat partisipasi belum tercapai dengan maksimal usulan-usulan yang telah di disampaikan pada musrenbang Kelurahan yang tidak semuanya dapat terakomodir dikarenakan adanya usulan-usulan dari Kelurahan lain yang lebih prioritas selain itu adanya interaksi saling bertukar informasi di antara stakeholders.

Sistem demokrasi Indonesia mencakup komponen partisipasi masyarakat. Conyers (1991) menguraikan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu dengan adanya partisipasi masyarakat memberikan informasi tentang kondisi, kebutuhan, dan sikap warga, masyarakat akan lebih percaya terhadap program kegiatan pembangunan jika mereka terlibat dalam proses persiapan dan perencanaan dan masyarakat lebih banyak kesempatan untuk mengetahui tentang apa yang diinginkan masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat bisa diwujudkan dengan cara musyawarah.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang SPPN, Indonesia menetapkan bagaimana musrenbang ini akan diterapkan dalam sistem hukum nasional. Menurut Pasal I Undang-Undang, musrenbang adalah kumpulan orang yang bekerja sama untuk menyusun program pembangunan nasional dan daerah. Menurut pasal 9, kegiatan musrenbang tersebut tercakup dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah .

Menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, musrenbang dilaksanakan di tingkat nasional oleh Bappenas dan di daerah diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappeda). Musrenbang Kota Semarang berdasarkan pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD di Kota Semarang. Musrenbang Kota Semarang Tahun untuk penyusunan RKPD Tahun 2024 dilaksanakan pada Selasa, 18 April 2023 di Gedung Ikhsan Lantai 8. Musrenbang ini dihadiri oleh

Walikota Semarang, Forkopimda Kota Semarang, Sekretaris Daerah Kota Semarang, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Perangkat daerah di lingkungan Pemda Kota Semarang, Muspida Plus, Instansi vertikal, BUMD, Camat, Delegasi perwakilan kecamatan, Perguruan tinggi/akademisi, Organisasi kemasyarakatan, LSM, Tokoh masyarakat, Organisasi wanita di Kota Semarang, dan Bappeda di wilayah Kedungsepur. Dengan total peserta musrenbang 218 orang.

Untuk usulan yang masuk dalam Musrenbang RKPD Kota Semarang Tahun 2024 sebagian besar usulan yang masuk dari masyarakat tentang jalan. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.2 Daftar Usulan Musrenbang RKPD Kota Semarang di Non Fisik

No	Usul	Kecamatan	Lokasi	Volume	Keterangan
1	Pengadaan dan Peremajaan Alat Posyandu	Semarang Utara	Jl. Ronggowarsito No. 42 A Rt 08 Rw 01 Tanjungmas	16 Lokasi	Diakomodir
2	Sosialisasi PBHS	Semarang Barat	Jl Abdurahman Saleh No. 231 Rt 1 Rw 9 Kembangrum	14 Lokasi	Diakomodir
3	Penyuluhan Mengenai Lansia	Gunungpati	Kelurahan Sadeng Rt 06 Rw 02	1 Kegiatan	Diakomodir
4	Pelatihan Penangan Dampak Penyakit	Gajahmungkur	Jalan Menoreh Raya Rt 03 Rw 05 Kelurahan Sampangan	1 Kegiatan	Diakomodir
5	Pengadaan alat tensi dan cek	Candisari	Jl. Singgalang I/1 Rt 6 Rw 1 Wonotingal	1 Kegiatan	Tidak diakomodir
6	Pelatihan Linmas pada Kelurahan Sadeng	Gunungpati	Kelurahan Sadeng Rt 6 Rt	75 orang	Diakomodir

7	Sosialisasi Pedagang Kaki lima di lingkungan	Pedurungan	Jl. Taman Tlogomulyo No 1 Rt 005	50 orang	Diakomodir
8	Sosialisasi bahaya Narkoba	Plamongsari	Balai Kelurahan Plamongsari rt 3 Rw 9	50 orang	Tidak Diakomodir
9	Pelatihan refleksi	Candisari	Jl. Lompobatang No. 22 Rt 05 Rw	50 orang	Tidak Diakomodir
10	Pelatihan tata boga	Semarang Timur	Balai Kelurahan Mlatibaru	40 Peserta	Diakomodir
11	Pelatihan Menjahit	Candisari	Kelurahan Wonotingal	1 Kegiatan	Tidak diakomodir
12	Pelatihan keterampilan pengelasan listrik dan karbida	Pedurungan kidul	Balai kelurahan pedurungan kidul Rw 1 Rt	50 buah	Tidak diakomodir
13	Sosialisasi pentingnya merencanakan jarak kehamilan untuk	Gajahmungkur	Balai kelurahan karangrejo rt 03 rw 03 karangrejo	30 Peserta	Diakomodir
14	Sosialisasi dan penguatan kepda masyarakat terkait keluarga	Banyumanik	Jalan Teuku Umar No 56 Rt 1 Rw 1 Ngesrep	40 Peserta	Diakomodir
15	Pelatihan Merias Pengantin	Gunungpati	Balai Kelurahan kandri Rt 05 Rw 01 Kandri	1 kegiatan	Diakomodir
16	Kirab Budaya Resik Waduk Jatibarang	Mijen	Balai 1 Kelurahan Kandri Rt 05 Rw	1 kegiatan	Diakomodir
17	Pengajian	Candisari	KELURAHAN KRAMAS RT 01 RW 01 KRAMAS	1 kegiatan	Tidak akomodir
18	Pelatihan pembuatan baki lamaran	Banyumanik	Jl Jatingaleh III No 391 A Rt 01 Rw 04 jatingaleh	1 kegiatan	Tidak diakomodir

Sumber: Dokumen Bappeda Kota Semarang Tahun 2023

Tabel 1.3 Daftar Usulan Musrenbang RKPD Kota Semarang di Non Fisik

No	Kegiatan	Kategori	Kecamatan	Lokasi	Volume	Keterangan
1	Pembangunan SDN Bongsari 01	Bangunan	Tugu	Jl. Condrokusumo RT 9 RW 2 BONGSARI	1 unit	Tidak Diakomodir
2	Rehab Gedung Pos paud	Bangunan	Semarang Barat	Kantor kelurahan Jerakah RT 4 RW 3 JERAKAH	1 unit	Tidak Diakomodir
3	Pembangunan Gedung Paud	Bangunan	Tugu	Kelurahan Mangkang Kulon RT 05 RW 04 MANGKANG KULON	1 unit	Tidak Diakomodir
4	SMP Negeri	Bangunan	Pedurungan	Jl. Dempel Lor RT 0 RW 23 MUKTIHARJO KIDUL	1 unit	Tidak Diakomodir
5	Pembinaan siswa PAUD / Pesantren mini, TPQ (Al Mansuri), pengadaan kursi meja dan buku bacaan	Bangunan	Tembalang	KELURAHAN KRAMAS RT 01 RW 01 KRAMAS	1 kegiatan	Diakomodir
6	Pembangunan Puskesmas Tlogosari Wetan	Bangunan	Pedurungan	Jl. Dolog Lor RT 10 RW 01 TLOGOSARI WETAN	1500 meter	Diakomodir
7	Perbaikan saluran air dan grill	Bangunan	Semarang Selatan	Jl. Basudewa (SDN Bulustalan) RT 8 RW 4 BULU STALAN	1500 meter	Diakomodir
8	Normalisasi Saluran	Jalan	Semarang Selatan	Jl. HOS Cokroaminoto Raya dan 4 RT 02 RW 03 BARUSAR	150 meter	Diakomodir
9	Pembangunan saluran drainase jl. kalisari baru rt 6 rw 5	Jalan	Semarang Selatan	Jl. Kalisari Baru RT 06 RW 05 BARUSARI	750 meter	Diakomodir
10	Normalisasi dan Perbaikan Saluran	Jalan	Semarang Selatan	Jl. Suyudono RT 01,02 RW 04 BARUSARI	200 meter	Diakomodir

11	Normalisasi dan Perbaikan Saluran	Jalan	Semarang Selatan	Jl. Kyai Saleh RT 03 RW 02 MUGASSARI	675 m ²	Diakomodir
12	Perbaikan Talud dan Saluran Air	Jalan	Semarang Selatan	Jl. Gergaji RT 05,06 RW 05 MUGASSARI	375 m	Tidak Diakomodir
13	Pengaspalan	Jalan	Semarang Selatan	Jl. Menteri Supeno (Pertigaan jahe Rempah Mbahjo sampai menteri Supeno RT 01 RW 05 MUGASSARI	800 m	Tidak Diakomodir
14	Normalisasi Saluran	Jalan	Semarang Selatan	Jl. Singosari Raya RT 001 RW 006 PLEBURAN	210 meter	Tidak Diakomodir
15	Rusak	Jalan	Semarang Selatan	Jl. Wonodri Baru Raya No 54 dan Wonodri Baru Raya No 52 RT 05 RW 02 WONODRI	660 meter	Tidak Diakomodir
16	Pembuatan Talud pinggir sungai dan bahu jalan	Jalan	Semarang Selatan	Jl. Singosari Timur (belakang PIP) RT 1, 3, 4, 2 RW 1, 7, 12 WONODRI	1227 meter	Diakomodir
17	Rusak	Jalan	Semarang Selatan	Jl. Gayam & Jl. Atmodirono RT 3.4 RW 10 WONODIRI	660 metere	Diakomodir
18	Pekerjaan renovasi trotoar jalan protokol	Jalan	Semarang Selatan	jl kompol maksum RT 6,7 RW 7 PETERONGAN	1252 meter	Tidak Diakomodir
19	PAGER BRC UNTUK TALUD PERBATASAN PANGGUNG KIDUL	Jalan	Semarang Utara	JL. SRIKANDI RT 10 RW 3 PLOMBOKAN	500 meter	Tidak Diakomodir
20	Betonisasi	Jalan	Semarang Utara	Jl. Hasanudin RT 0 RW 0 PURWOSARI	20000 meter	Diakomodir
21	Crossing	Jalan	Semarang Utara	Jl. Hasanudin RT 08 RW 04 PURWOSARI	45 meter	Diakomodir

22	PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI	Jalan	Semarang Utara	JL. TANAH MAS RAYA RT 1 S/D 2 RW 5 RT 1 RW 5 KUNINGAN	750 meter	Tidak diakomodir
23	Peninggian Jembatan	Jembatan	Semarang Utara	Jl. Hasanudin RT 0 RW 0 PANGGUNG LOR	3 per titik	Diakomodir
24	Peninggian Talud Kalibaru	Jalan	Semarang Utara	Jl Komodor Yos Sudarso dan Kapten Wiratno RT 3, 5, 6 RW 7 - 10 BANDARHARJO	1000 meter	Diakomodir
25	Pelebaran Jembatan dan Peninggian Pintu Masuk SMP Negeri 31	Jembatan	Semarang Barat	Jl. Tambakharjo RT 0 RW 7 TAMBAKHARJO	50 meter	Tidak Diakomodir
26	Pembangunan Saluran dan Normalisasi	Jalan	Semarang Barat	Jl. Sri Rejeki Utara RT 04 RW 05 KALIBANTENG KIDUL	250 meter	Diakomodir
27	Pembuatan Saluran Drainase dengan Culvert dan U-Dith dengan Tutup	Jalan	Semarang Barat	Jl Puspanjolo Tengah, Dalam dan Timur RT 00 RW 01 CABEAN	2000 meter	Diakomodir
28	Pengaspalan Jalan	Jalan	Semarang Barat	Jl. Saptamarga RT 0 RW 4 KEMBANGARUM	500 meter	Diakomodir
29	Pengerukan saluran Jalan Ronggowarsito Jl. Margorejo Barat RT 01 RW 04 dan Jl. Spoorlan RT 01, 02, 03 RW 03	Jalan	Semarang Timur	Jalan Ronggowarsito Jl. Margorejo Barat RT 01 RW 04 dan Jl. Spoorlan RT 01, 02, 03 RW 03 RT 01, 02, 03 RW 03 dan 04 KEMIJEN	550 meter	Diakomodir
30	Peninggian Jalan Pavingisasi	Jalan	Semarang Timur	Jl. Pondok Pati RT 4 RW 7 REJOMULYO	2250 meter	Diakomodir

Sumber:Dokumen Bappeda Kota Semarang Tahun 2023

Berdasarkan laman resmi pemerintah Kecamatan Mijen, berikut merupakan contoh kasus salah satu penyelenggaraan musrenbang di Kecamatan Mijen pada tanggal 9 Februari 2023, output perencanaan lebih berfokus pada sektor pemberdayaan masyarakat. Melakukan program upaya pengendalian inflasi, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan dan stunting. Hal ini saling berkaitan. Pembangunan infrastruktur lebih detail melihat keadaan wilayah per cluster. Pada program pengendalian banjir, yang dilakukan pada 2023 dan 2024 akan dilakukan di Kali Plumbon, Jembatan Beringin, tol tanggul laut dan sheet pile bersama Kementerian PUPR. Walaupun dilakukan oleh Kementerian PUPR, namun terdapat bagian-bagian yang tetap harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang contohnya pembebasan lahan.

Dalam rencana kerja pembangunan daerah, Penanganan banjir merupakan salah satu prioritas di antara lima prioritas pembangunan. Kota Semarang diharapkan bebas dari banjir yang disebabkan oleh pasokan air dari hulu dan banjir yang disebabkan oleh gelombang tinggi. Lalu yang menjadi perhatian Kota Semarang adalah banjir. Oleh karena itu, jika terjadi banjir terparah, Kota Semarang akan terkena dampaknya. Baik banjir dari atas maupun banjir akibat gelombang badai. Berikut Gambar Tabel Upaya Banjir dan Rob Tahun 2016 – 2020 di Kota Semarang:

Gambar 1.3 Tabel Upaya Banjir dan Rob Tahun 2016 – 2020 di Kota Semarang:

**Tabel 2.22.
Pengendalian Banjir dan Rob Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun					Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Persentase kawasan banjir dan rob terhadap luas wilayah keseluruhan	%	9,03	4,00	4,00	4,00	1,30	Tercapai
2	Lama genangan banjir dan rob di sungai, saluran drainase dan gorong-gorong pada saat banjir	Menit	60	50	45	40	40	-
3	Kapasitas/fungsi drainase (volume areal tangkapan)	M3	21.775 .506	21.899.58 5	21.998.968	22.098.35 1	22.098.35 1	
4	Kapasitas pengendali banjir dengan pompa dan polder	Liter / detik	90.209	90.317	90.425	112.443	112.443	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2021

Sumber : RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026

Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang mengalokasikan anggaran sekitar Rp 30 miliar untuk perbaikan jalan rusak pada APBD Murni 2024. Beberapa jalan sedang dalam renovasi. Ketua DPU Semarang Swart mengatakan, anggaran sebesar Rp 30 miliar dialokasikan untuk pelapisan ulang dan perbaikan kecil jalan berlubang.

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang No 25 Tahun 2024 tentang Pedoman Musrenbang di Kota Semarang, anggaran yang diberikan kepada kecamatan untuk merealisasikan usulan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman dengan kebutuhan pendanaan di atas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Usulan kegiatan ini akan dibahas pada Musrenbangcam untuk dimasukkan pada usulan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2025. Untuk konstruksi pekerjaan dibidang fisik yaitu jalan dan saluran menjadi kewenangan perangkat

daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman untuk pekerjaan, konstruksi jalan lebar di atas 2,5 meter, konstruksi saluran lingkungan permukiman lebar diatas 30 sentimeter.

Menurut pendapat dari Jürgen Habermas, kata “*DELIBERATION*” berasal dari bahasa Latin *deliberatio* yang berarti “nasihat”, “pertimbangan”, atau “nasihat” (Sari 2013). Rainer Forst yang mengatakan pendapat bahwa: “Perencanaan deliberatif artinya sumber legitimasi bukanlah keseluruhan ekspresi kehendak individu atau hukum, melainkan proses dalam mengambil keputusan politik yang selalu transparan untuk musyawarah dan perdebatan” (Wahuni 2015). Hakikatnya, perencanaan musyawarah merupakan respon terhadap tindakan reflektif dan kolaboratif. Untuk mengatasi hal tersebut, konseling bertujuan untuk menciptakan rencana yang dapat diterima untuk mengatur kegiatan para peserta secara optimal. Masing-masing rencana mempengaruhi dan memodifikasi kebutuhan para pesertanya sehingga tujuan dan kepentingan mereka dapat selaras (Forester, 1993).

Menurut F. Budi Hardiman (Sukma 2021), teori demokrasi deliberatif mengkaji perilaku individu dalam suatu warga diaktifkan untuk berperan sebagai warga negara dan bagaimana komunikasi yang terjadi pada tingkat warga negara mempengaruhi dalam mengambil keputusan. Musyawarah mencakup aspek argumentatif dan informasional. Di sini (rekursif) berarti preferensi, keputusan, dan perspektif yang dianggap tetap di seluruh model dianggap mudah diubah secara musyawarah. Komunikasi non-simbolis, termasuk komunikasi spontan, antar partisipan yang berkompeten. Teori demokrasi deliberatif tidak merekomendasikan revolusi, melainkan reformasi supremasi aturan melalui aktivitas debat publik pada

banyak sekali bidang sosial politik & budaya guna menaikkan partisipasi demokratis masyarakat.

Demokrasi deliberatif mempunyai landasan konstitusional yang kuat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari segi muatannya, demokrasi deliberatif termasuk dalam sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” Hal ini erat kaitannya dengan tradisi lokal dan kearifan suku-suku Indonesia. Pancasila menguraikan perwakilan masyarakat dan konsultasi menuju kesepakatan. Kata deliberasi berasal dari bahasa latin *deliberation* yang artinya nasihat, pertimbangan, nasehat.

Demokrasi terjadi secara musyawarah ketika suatu keputusan atau kebijakan publik lolos uji konsultasi publik. Dalam terminologi Habermas, hal ini disebut debat publik. Jürgen Habermas mengatakan demokrasi deliberatif memerlukan hubungan komunikatif antara masyarakat dan negara yang lebih dikenal dengan ruang publik. Terjadi diskusi dialektis yang intensif antara masyarakat dan negara, sehingga menghasilkan keputusan bersama, bukan keputusan sepihak. Pada dasarnya Habermas ingin menciptakan demokrasi yang fokus pada kualitas, bukan hanya sekedar kuantitas.

Model demokrasi deliberatif yang diprakarsai oleh Habermas bukan wacana baru dalam dialektika demokrasi di Indonesia. Bagi sebagian kelompok masyarakat sipil di Indonesia, wacana ini dipandang menjamin bagi masa depan demokrasi pasca-reformasi. Adanya ruang publik untuk berdiskusi mengenai kebijakan publik mempunyai kepentingan strategis yang besar bagi perkembangan demokrasi.

Namun dalam situasi Indonesia saat ini, demokrasi deliberatif masih menjadi impian.

Ruang publik yang dimaksud oleh Habermas belum menemukan tempatnya di Indonesia. Sebab, sistem perwakilan yang menjadi ciri suatu demokrasi perwakilan dapat disebut sebagai sistem perwakilan semu karena tidak adanya posisi tawar yang proporsional antara pemilih dan wakilnya. Situasi ini menyulitkan terciptanya ruang publik dalam sistem perwakilan seperti itu. Ruang publik bukan hanya sekedar Rapat Dengar Pendapat, forum publik, atau forum tempat para wakil rakyat menyibukkan diri di waktu istirahat.

Model demokrasi deliberatif menekankan pada proses dan langkah pengambilan keputusan yang fokus pada pertimbangan dan mengeksplorasi permasalahan melalui dialog dan pertukaran gagasan antara aktor dan masyarakat. Bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi perwakilan yang mengedepankan keterwakilan, inti perencanaan deliberatif adalah partisipasi masyarakat. Jika model demokrasi deliberatif mengutamakan kerja sama antara pandangan dan partai, maka demokrasi perwakilan adalah persaingan antara gagasan dan partai. Namun bukan tidak mungkin narasi besar permusyawaratan dapat diwujudkan dalam demokrasi perwakilan, dimana proses pengambilan kebijakan oleh wakil rakyat bercirikan partisipasi masyarakat/pemilih melalui proses musyawarah.

Demokrasi deliberatif berbeda dengan demokrasi perwakilan yang saat ini diterapkan di Indonesia, melainkan demokrasi yang murni prosedural. Gagasan partisipasi masyarakat yang emansipatoris mengacu pada proses komunikasi dan

pembangunan konsensus dalam forum-forum ruang publik. Peserta didorong untuk melakukan pendekatan deliberatif untuk mencapai kesepakatan bersama dan melakukan proses komunikasi secara terbuka dan adil. Mayoritas dan mayoritas menghormati pendapat minoritas.

Teori Habermas menyajikan gambaran dimana anggota masyarakat sipil dapat berkontribusi dalam pembentukan opini publik melalui partisipasi mereka dalam berpidato, dan pidato secara tidak langsung dapat mempengaruhi sistem politik melalui sirkulasi kekuatan komunikatif dari pinggiran hingga pusat 'diprogram' atau 'diarahkan' melalui undang-undang dan kebijakan yang 'melayani kepentingan semua' . Dengan cara ini, menurutnya, otonomi politik badan hukum terjamin karena mereka sekaligus dapat menganggap dirinya sebagai penerima hukum dan tunduk pada mereka.

Dalam demokrasi deliberatif Jürgen Habermas dalam penelitian yang berjudul Konsep Komunikasi Jürgen Habermas Dalam Ide Demokrasi Deliberatif dan Tindakan Komunikatif pada tahun (2022) dalam Jurnal Ilmu Komunikasi terdapat tiga prinsip utama. 1) Prinsip deliberasi, artinya sebelum mengambil keputusan perlu dilakukan pertimbangan yang mendalam dengan semua pihak terkait. 2) prinsip reasonableness, artinya dalam mempertimbangkan bersama hendaknya ada kesediaan untuk memahami pihak lain. 3) Prinsip kebebasan, artinya semua pihak yang terkait mempunyai peluang yang sama dan memiliki kebebasan dalam menyampaikan pikiran, pertimbangan dan gagasannya

Berdasarkan artikel Edunews.id yang berjudul Model Demokrasi Deliberatif J urgen Habermas dan Solusi Praktik Demokrasi Kita yang diredaktur Firman Wijaya Tahun 2020, Elemen kunci dari model demokrasi deliberatif adalah (1) partisipasi warga negara, (2) ketersediaan ruang untuk berpartisipasi dalam proses (ruang publik), dan (3) interaksi antar warga negara dan dengan pengambil keputusan politik. Jika elemen-elemen kunci dari model demokrasi deliberatif dapat diterapkan pada proses pengambilan kebijakan dan/atau pembentukan produk hukum (dalam hal ini peraturan hukum), khususnya di Indonesia, maka produk kebijakan dan/atau hukum yang dihasilkan akan membaik. Pasti akan memiliki karakter hukum yang responsif.

1. 2 Perumusan Masalah

1. 2. 1. Identifikasi Masalah

1. Untuk melakukan perbaikan jalan harus terlebih dahulu mengatasi masalah banjir
2. Kendala anggaran yang cukup besar untuk menangani infrastruktur jalan di Kota Semarang
3. Pemberdayaan menjadi salah satu prioritas rencana pembangunan tahunan Kota Semarang Tahun 2025
4. Ada usulan yang diajukan Murembang yang dianggap tidak tepat untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat
5. Tantangan pembangunan keputusan dewan selalu politis dalam menjaring aspirasi masyarakat, pemimpin diganti program tetap jalan. Terdapat perubahan situasi, setelah dimasukkan ke sipd

tidak bisa didiskusikan.

1. 2. 2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana evaluasi musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dalam infrastruktur jalan di Kota Semarang?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat evaluasi musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) infrastruktur jalan di Kota Semarang?

1. 3 Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui dan mendeskripsikan evaluasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) infrastruktur jalan di Kota Semarang
- 2 Untuk mengetahui dan mendeskripsikan evaluasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) infrastruktur jalan di Kota Semarang

1. 4 Manfaat Penelitian

1. 4. 1. Manfaat Akademis

1. Penelitian ini memberikan pengetahuan kepada para pembaca tentang evaluasi musyawarah perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kota Semarang

2. Sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat tema terkait dengan evaluasi musyawarah perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di ota Semarang

1. 4. 2. Manfaat Praktis

- 1 Hasil penelitian bisa digunakan untuk bahan referensi bagi pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat.
- 2 Hasil penelitian diharapkan dapat menambah referensi untuk meningkatkan pengetahuan tentang musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

1.5 Kerangka Pemikiran Toeritis

1. 5. 1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Tahun	Teori Metodologi	Tujuan	Hasil Penelitian
1.	Lindell, M. Artshrom, Peter.	Deliberative Walks: Citizen Participation on a Local Level Planning proses (2020)	Kuantitatif	Untuk mendeskripsikan demokrasi dengan menekankan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik terlihat sangat jelas	Demokratif walks dapat memperluas peran warga baik dalam pengambilan keputusan regional maupun lokal. Kita membutuhkan politisi dan pejabat yang berpikiran terbuka dan memahami partisipasi masyarakat.
2.	Lingga, Elisa	Deliberasi Dalam perencanaan Pembangunan Infrastruktur Nagari Parit rantang, Kecamatan Kamang	Teori demokrasi deliberatif Carson dan Karp (2005:122) yaitu 1. Pengaruh 2. Penyertaan	Untuk mengetahui masyarakat berpartisipasi dalam diskusi mengenai pembangunan infrastruktur	Musrembang Nagari Kunangan diawali dengan konsultasi atau diskusi antara warga dengan kelompok masyarakat di Tingkat Joron dan persiapan pengorganisasian. Musrembang tersebut partisipasi masyarakat sangat rendah yang dilihat dari jumlah peserta Musrenbang 2019 yang

		Baru pada masa Covid 19 (2022)	3. Musyawarah		diundang sebanyak 259 sedangkan yang hadir 120 Orang. Tahun 2020, undangan sebanyak 250 yang hadir hanya 107 orang.
3.	Taufiq, Muhammad Kombaitan, Benediktus Suhirman SOFHANI, Tubagus Furqon	Towards Deliberative Ideals with Informality: A Practical Study of Rural Planning in Indonesia (2021)	Musyawarah menghasilkan keputusan yang didukung oleh semua pemangku kepentingan, mewujudkan cita-cita musyawarah (Habermas, 1990; Mansbridge et al., 2010)	Memberikan pemahaman tentang praktik perencanaan deliberatif di lingkungan pedesaan non-Barat di Desa Pematang Tengah Indonesia	Perencanaan konsultasi harus mempertimbangkan munculnya aspirasi masyarakat melalui forum proses konsultasi informal. Cita-cita musyawarah dalam bidang musyawarah formal tidak diwujudkan melalui dialog formal seperti di negara-negara Barat. Konsultasi intermiten dalam suasana informal untuk memfasilitasi negosiasi dalam konsultasi yang ditargetkan untuk mencapai konsultasi yang optimal.
4.	Rahmat Ravinzar Khairunnisa	(Studi Pada Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten banyuasin, Sumatera Selatan (2023)	Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah Miles dan Huberman	Mengukur kecukupan pelaksanaan Musrenbang sesuai dengan prinsip demokrasi deliberatif dan mengevaluasi hasil pelaksanaan Muslembande di Pulau Rimau	Implementasi prinsip demokrasi deliberatif dalam Murembang lemah karena kendala terkait pelaksanaan laporan dan usulan hasil Murembang masih ada. Selain tidak inklusifnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan

				Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.	Mulembang, hal ini juga melanggar prinsip demokrasi deliberatif yang mengutamakan optimalisasi peran masyarakat dalam prosesnya.
--	--	--	--	--	--

5.	A'an, Maryani, S., Eka, A.	Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas. (2021)	Deskriptif Kualitatif	Menjabarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas ditinjau dari aspek pengambilan keputusan.	Musrenbang belum maksimal karena jumlah peserta yang sedikit. Kurang sosialisasi kepada masyarakat mengenai kegiatan pengambilan keputusan perencanaan pembangunan dan sikap acuh tak acuh masyarakat terhadap kegiatan pemerintahan desa terkait dengan musyawarah pengambilan keputusan perencanaan.
6.	Fadjar Sukma	Menimbang Demokrasi Deliberatif Dalam Proses Pembentukan Hukum Yang	Deskriptif Kualitatif	Menjelaskan partisipasi masyarakat dalam pembuatan hukum di Indonesia	keterlibatan secara aktif masyarakat dalam menentukan dan merumuskan sebuah aturan yang akan berlaku baginya juga merupakan vitamin bagi kehidupan demokrasi kita dimana kedaulatan rakyat termanifestasikan secara riil tidak serta

		Demokratis di Indonesia (2021)			merta didistribusikan kepada lembaga-lembaga negara
7.	Mantysalo, M. Westin, M. Mattila, H.	Public Planner- a Deliberative Aurorithy (2023)	Berdasarkan pemikiran Haugaard tentang Kekuatan Pemikiran Ulang, Dialektika Norma Publik dan Keterlibatan Performatif karya Sallet, pergantian “sistem” dalam teori demokrasi deliberatif, dan karya Warren mengenai otoritas	Mendeskripsikan teori perencanaan publik (musyawarah) dan praktiknya	Yang dibutuhkan adalah teori perencanaan yang memungkinkan otoritas perencanaan publik mempertimbangkan potensi perubahan.
8	Sampe Stefanus, Horopue Caroline Betzy, Kumayas Neni	Penerapan Demokrasi Deliberatif Dalam Proses Penyusunan Peraturan Desa di	Kualitatif Teori Demokrasi Deliberatif Jorgen Habermas	Mengetahui penerapan perencanaan deliberatif dalam perumusan peraturan desa di Desa Pintareng Kabupaten Tenggara	Penerapan demokrasi deliberatif dalam proses penyusunan peraturan desa di Desa Pintaren Kabupaten Tabkan Selatan Tenggara telah dilaksanakan pada tahun ini, tetapi belum dilaksanakan sepenuhnya. Sangat sedikit masyarakat yang terlibat

		Desa Pintareng, Kecamatan Tabukan Sulawesi Tenggara (2023)	yang mendasar untuk pengambilan keputusan, yaitu 1. nilai kebersamaan 2. nilai kebebasan berpendapat 3. nilai melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab.		dalam proses pembuatan regulasi desa.
9	Muttaqin, M. E Ramdan, D	Konsep Komunikasi J urgen Habermas Dalam Ide Demokrasi Deliberatif dan Tindakan Komunikatif (2023)	Kualitatif Teori komunikasi Habermas yang terdiri dari 1) komunikasi dasar 2) komunikasi politik 3) sistem pers	Untuk mendeskripsikan wujud demokrasi deliberatif dimana partisipasi masyarakat dianggap sebagai hak untuk berkomunikasi.	Habermas menghindari komunikasi yang mengeksploitasi orang dan merekomendasikan jenis komunikasi tertentu. Akibatnya, keselarasan ini menghasilkan kesetaraan, hak asasi manusia yang tinggi, dan komunikasi transformasional.

			4) kompetensi komunikasi.		
10	Priono, Agustus	Dinamika Demokrasi Deliberatif Melalui Musyawarah Kelurahan Musikal di Kelurahan Patuk, Kapanewon, Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta (2023)	Kualitatif Eksploratif	untuk mengetahui proses dari pelaksanaan demokrasi deliberatif yang ada di musyawarah di tingkat Rt sampai kelurahan	Pelaksanaan aktivitas musyawarah di setiap tingkat masih belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Misalnya, dalam musyawarah di tingkat kelurahan, orang-orang yang terlibat telah mewakili rakyat di ruang yang dirancang khusus untuk tujuan tersebut. Namun, aktualisasi diri Bamuskal sebagai perwakilan rakyat selama musyawarah tidak dapat mewakili aspirasi rakyat karena mereka hanya terlibat sebagai penyelenggara.
11	Nuryati Antoro, Aji F S	Mengurai Rupa Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Di Desa Paya Benua, Negeri Laskar Pelangi (2024)	Kualitatif deskriptif	Untuk menganalisis bentuk keterlibatan masyarakat Desa Payabenua dalam proses pengambilan keputusan administratif dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keterlibatan tersebut.	Desa Paya Benua, Provinsi Bangka Belitung, Penilaian kebutuhan, konsultasi konsensus, dan partisipasi kelompok kerja meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pengelolaan. Pemerintah desa harus membuat website resmi pemerintah desa dan secara teratur mengadakan pertemuan dan kegiatan tatap muka.

12	Fahira, Rana Salam, Rahmat	Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan (2023)	Kualitatif deskriptif Teori partisipasi masyarakat menurut Marschall 1. Adanya forum 2. Adanya akses masyarakat 3. Pengambilan keputusan	Untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam musrenbang kelurahan sawah kecamatan Ciputat Tangerang Selatan	Ada forum, tetapi tidak semua masyarakat dapat hadir pada waktu musrenbang. Perencanaan dan pemberdayaan tahap pertama hanya formalitas, proses pengambilan keputusan organisasi dan pemerintah.
13	Raharjo, Riyanto P: Suminar, S Winarti, S E Saptyaningtyas, H	Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Formalistik di Desa Guwosari dan Sendangsari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul	Kualitatif deskriptif	Untuk mengkaji penyelenggaraan Musrenbangdes yang dalam banyak praktik hanya bersifat formalistik dan faktor penyebabnya.	Beberapa masyarakat tidak aktif berpartisipasi dalam Musrenbangdes dan tidak memahami apa yang dibicarakan.

		(2021)			
14	Rami, Atiqa S Markhamah, S	Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Bugel Kecamatan Polokarto Melalui Program Sosialisasi (2020)	Kualitatif Deskriptif	Untuk menguraikan partisipasi masyarakat di Desa Bugel Kecamatan Polokarto	Di Desa Pintar Kabupaten Tabukan Selatan Tenggara, demokrasi deliberatif telah diterapkan pada tahun, tetapi belum digunakan sepenuhnya. Sangat sedikit masyarakat yang terlibat dalam proses pembuatan regulasi desa.
15	Samaun, R Bakri B Mediansyah, A R	Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara	Kualitatif	Untuk mengetahui upaya pemerintah Gorontalo dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Gorontalo dan faktor pendorong dan penghambat	Pemerintah desa melakukan banyak hal untuk mendorong partisipasi masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh sikap gotong royong dan kemandirian masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu terkait acuan teori yang saya gunakan. Saya menggunakan teori demokrasi deliberatif menurut jurgen habermas yaitu prinsip deliberasi, prinsip reasonableness, dan prinsip kebebasan. Sedangkan penelitian yang lain menggunakan teori demokrasi deliberatif carson dan Karpis, jurgen dan Miles. teori pengambilan keputusan, dan partisipasi masyarakat. Kebanyakan penelitian sebelumnya berfokus pada hasil musrenbang. Perbedaan lainnya terkait dengan lokasi penelitian. Penulis memilih lokasi penelitian di Kota Semarang, Jawa Tengah. Penelitian ini berfokus pada proses Musrenbang, partisipasi masyarakat terhadap Musrenbang dari tahap perencanaan sampai dengan pengawasan implementasi hasil Musrenbang. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih menekankan pada proses perencanaan, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana proses pra Musrenbang, implementasi hasil Musrenbang dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya evaluasi Musrenbang dan peran pengawasan masyarakat dalam mengawal keberjalanan program perencanaan pembangunan infrastruktur jalan. Penelitian juga mengungkapkan antara gap dan harapan hasil akhir Musrenbang yang mengindikasikan kendala dalam proses penjangkaran aspirasi masyarakat menjadi sebuah kebijakan publik. Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan akar penyebab dari permasalahan secara lebih mendalam dengan menganalisis pedoman pelaksanaan Musrenbang, aturan mengenai Musrenbang, prosedur Musrenbang, peran stakeholder dalam Musrenbang.

Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan skala daerah (kecamatan) agar penelitian lebih berfokus pada suatu daerah. Meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tentang demokrasi deliberatif dalam Musrenbang, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih kritis bagaimana musrembang perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dan faktor pendorong dan penghambat dalam Musrenbang.

1. 5. 2. Administrasi Publik

1. 5. 2. 1. Pengertian Administrasi Publik

Kata “administrasi publik” berasal dari bahasa latin “*ad*” dan “*ministrate*) yang berarti pemberian bantuan, jika dalam bahasa Inggris “*administration*” mengandung makna “*to serve*”. Administrasi publik sebagai upaya melayani sebaik-baiknya. Menurut Soewarno handyaningrat (1988:20, administrasi berasal dari bahasa Belanda *Administratie* yang berarti kegiatan surat-menyurat dan catat-mencatat. Administrasi adalah kegiatan pembukuan dan pengarsipan surat-surat serta hal lain untuk menyediakan dan mempermudah dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan kembali.

Menurut Chandle dan Plano (2008 : 3) administrasi publik adalah Proses dimana asal daya dan personil publik diorganisir dan dikoordinasikan buat memformulasikan, mengimplementasikan, serta mengelola (manage) keputusan-keputusan pada kebijakan publik.. Menurut Chandler dan Plano (1988:3) dalam (*The Public Administration Dictionary*) yang menepis makna administrasi hanya sebatas kegiatan ketatausahaan dengan mendefinisikan ulang sebagai proses dimana keputusan dan kebijakan diimplementasikan. Berdasarkan pendapat Sondang P. Siagin (2004) administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

1. 5. 2. 2. Ruang Lingkup Administrasi Publik

Administrasi publik adalah bidang studi dan praktik yang berkaitan dengan manajemen dan implementasi kebijakan publik dan penyediaan layanan publik oleh pemerintah atau sektor publik. Administrasi publik mencakup proses, kegiatan, dan prinsip pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya publik untuk mencapai tujuan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Hal ini mencakup kebijakan publik, pelayanan publik, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi sumber daya publik, dan bagaimana sumber daya publik digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah dan kepentingan.

Ruang lingkup administrasi publik mencakup:

1. Penyusunan Kebijakan Publik

Administrasi dalam penyusunan kebijakan melibatkan banyak pihak dan melibatkan banyak langkah dan proses.

2. Pelaksanaan Program dan Proyek Pemerintah

Pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan pemerintah adalah komponen penting dalam pelaksanaan program dan proyek pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat; alokasi sumber daya; pengaturan anggaran; manajemen pelaksanaan; dan evaluasi program dan proyek.

3. Manajemen Sumber Daya Manusia

Dalam manajemen SDM, administrasi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan manajemen SDM dalam suatu organisasi,

termasuk administrasi. Tujuan pengelolaan SDM adalah untuk membuat tempat kerja menjadi tempat yang sehat, produktif, dan efisien.

4. Pengaturan dan Pemeliharaan Infrastruktur

Jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, sistem transportasi, telekomunikasi, diskusi bersih, dan energi adalah bagian dari infrastruktur publik.

5. Pelayanan Publik

Tujuan pelayanan publik adalah untuk memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi dan efisien yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Ada banyak aspek yang berkaitan dengan pemberian pelayanan dan kebutuhan masyarakat.

6. Pengaturan Keuangan dan Anggaran

7. Perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan pelaporan keuangan perusahaan adalah semua bagian dari pengaturan keuangan dan anggaran.

8. Hubungan Antar Lembaga

Untuk mencapai tujuan efektivitas, efisiensi, dan kohesi dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik, hubungan antarlembaga meliputi interaksi, kerja sama, dan koordinasi antar lembaga negara dan administrasi publik masing-masing negara.

1. 5. 3. Paradigma Administrasi Publik

1. Paradigma *Old Public Administration*

Wilson (1887) berpendapat bahwa menegakkan suatu konstitusi lebih sulit daripada menyusunnya sehingga memerlukan peningkatan sumber daya intelektual dalam penyelenggaraan negara yang efektif dan efisien. Pengembangan administrasi pemerintahan diperlukan. Kepemimpinan administrasi negara diperlukan untuk dan pembaharuan administrasi publik. Oleh karena itu, diperlukan ilmu pengetahuan yang bisa mengarah pada reformasi birokrasi sehingga menghasilkan pejabat yang profesional dan tidak partisipatif

Adanya dikotomi politik/administratif. Dikotomi ini secara efektif melindungi para profesional muda. Pada tahun 1929, oposisi biner administratif hanya membawa efisiensi pada implementasi langkah-langkah yang diambil oleh politisi terpilih. Mereka membayar semua biayanya, tanpa perang, politik atau administrasi. Namun, dikotomi politik atau administrasi tidak mengakui bahwa administrator sering berpolitik. Hal ini menyebabkan para pendiri gagasan ini menjaga jarak meskipun para administrator dan politisi melakukan hal yang berbeda. Mereka tetap perlu bekerja sama demi kebaikan yang lebih besar.

2. Paradigma *New Publik Management*

New Public Management (NPM) muncul dari perbedaan status PNS pada golongan kedua. Mereka mencari alternatif lain dan menemukan suatu

pengendalian yang disebut pengendalian administratif atau pengendalian umum. Adanya gagasan ini ditandai dengan berdirinya *School of Business di Cornell University* pada tahun 1948 sebagai departemen akademik pertama. Dalam hal pelayanan publik, pemerintah tradisional dinilai kurang efektif dalam menyelesaikan permasalahan dan memberikan pelayanan publik. Dari perspektif administrasi publik klasik, publik mengacu pada badan dan lembaga pemerintah. Namun, paradigma manajemen menimbulkan pertanyaan mengenai definisi publik

Menurut Rosenbloom & Kravchuck (2005), beberapa keuntungan dari penerapan NPM adalah bahwa pembangunan birokrasi selalu memperhatikan aspek pasar, mengutamakan persaingan dan kontrak untuk mencapai hasil, lebih memperhatikan kebutuhan pelanggan dan lebih responsif daripada operasional itu sendiri, deregulasi diperlukan, dan pelaksana diberi wewenang untuk melakukannya. Ini akan menjadi lebih efektif. Selain itu, budaya organisasi yang digambarkan oleh NPM adalah budaya yang fleksibel, inovatif, kewirausahaan, dan berfokus pada hasil daripada prinsip, proses, dan hasil.

3. Paradigma *New Public Service*

Kelemahan dari *OPA* dan *NPM* ditutupi oleh perspektif lain yaitu *New Public Service*. Teori ini beranggapan bahwa birokrasi merupakan instrumen rakyat dan harus mematuhi suara rakyat sepanjang wajar, sah, dan

konstitusional. Filosofi NPS Denhardt menekankan bahwa pemerintah tidak boleh dijalankan seperti korporasi tetapi harus melayani rakyatnya secara demokratis, adil, tidak memihak, tidak diskriminatif, jujur, dan bertanggungjawab. Disini pemerintah harus mengutamakan kepentingan rakyat, menjamin hak-hak rakyat, dan memenuhi tanggung jawab terhadap masyarakat (Denhardt & Denhardt, 2016).

Denhardt dan Denhardt (2003) kemudian menyampaikan sejumlah prinsip NPS seperti

1. *Serve citizens, not customer*
2. *See the open intrigued*
3. *Esteem citizenship over business*
4. *Think deliberately, act fairly*
5. *Recognize the responsibility isn't straightforward*
6. *Serve instead of control*
7. *Value people not just productivity*

4. Good Governance

Penerapan konsep administration Hal ini diharapkan dapat mengalihkan perhatian administrasi publik pada kepentingan masyarakat umum, terutama dengan melibatkan mereka dalam proses pemenuhan kepentingan publik. Konsep tata kelola, yang dikemukakan oleh Stoker (1998, 17-18), mengacu pada gaya pemerintahan yang berkembang di mana perbedaan antara sektor publik dan swasta menjadi tidak jelas (Ewalt, 2001,

8). Ketidakjelasan ini sesuai dengan kebutuhan negara untuk menerapkan mekanisme politik yang lebih luas. Negara juga mengakui pentingnya memasukkan masalah yang berkaitan dengan empati dan perasaan publik untuk menciptakan peluang untuk mobilisasi sosial dan politik (Stoker, 2004: 10). Oleh karena itu, partisipasi yang dicapai melalui pembentukan jaringan antara pemerintah dan masyarakat merupakan komponen yang sangat penting untuk kelangsungan legitimasi politik (Stoker, 2004: 10).

Konsep pemerintahan kemudian berkembang menjadi pemerintahan yang baik dengan membedakan bagaimana ia dijalankan dari yang baik dan yang buruk (Prasojo, 2003, 9). Menurut Plumptre dan Graham (1999,12) *good governance* adalah Model pemerintahan yang menghasilkan hasil ekonomi dan sosial yang diinginkan masyarakat. IMF dan Bank Dunia percaya bahwa tata kelola yang baik adalah cara untuk menegakkan peraturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini juga berarti memberantas korupsi, yang dapat dicapai melalui transparansi dan pembagian informasi.

Berdasarkan pengertian di atas, *good governance* memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Akuntabel artinya pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus disertai pertanggungjawaban
2. Transparan berarti masyarakat harus mendapatkan informasi yang memadai tentang prosesnya.

3. Responsif artinya dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus mampu melayani semua stakeholder
4. Setara dan inklusif artinya semua anggota masyarakat harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi.
5. Efektif dan efisien berarti kebijakan dibuat dan dilaksanakan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang tersedia dengan cara terbaik.
6. Mengikuti aturan hukum, artinya kerangka hukum yang adil dan ditegakkan diperlukan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan.
7. Partisipatif, yang berarti proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus memungkinkan banyak pihak berpartisipasi.
8. Berorientasi pada konsensus (kesepakatan).

1. 5. 4. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Sebuah program yang diproyeksikan dengan tujuan, nilai, dan praktik tertentu disebut kebijakan publik, menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1970, 17). Menurut Thoma Dye (2011, 1), kebijakan publik mendefinisikan semua tindakan pemerintah, motivasi mereka, dan konsekuensi dari hidup berdampingan. (public policy is “*Whatever government to choose to do or not to do. Public policy is what government do, whey they do it, and what difference it make*”). Konsep ini sangat luas karena kebijakan publik mencakup tindakan

pemerintah yang tidak dilakukan ketika menghadapi masalah publik. Thomas Dye memberikan dua definisi kebijakan publik: (1) kebijakan publik dibuat oleh lembaga pemerintah dan bukan organisasi swasta, dan (2) kebijakan publik berkaitan dengan keputusan yang dapat dibuat oleh lembaga pemerintah. Kebijakan publik bukanlah tentang mempertahankan program lama atau membuat program baru.

2. Tujuan Kebijakan Publik

Pada dasarnya, tujuan kebijakan publik adalah untuk menciptakan ketertiban dalam domain manajemen sistem publik. Kebijakan publik biasanya memiliki tujuan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan bahkan hukum. Dalam bidang politik, tujuan kebijakan publik adalah untuk mendistribusikan nilai dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat. Di bidang sosial, tujuan kebijakan publik adalah untuk menertibkan kehidupan bermasyarakat, mengatasi konflik dan keresahan sosial, dan meningkatkan keharmonisan antar anggota masyarakat tanpa mempertimbangkan perbedaan pendapat (Affrian, 2012).

Prinsip-prinsip kebijakan ini digunakan sebagai dasar dari segala urusan pemerintahan untuk menyusun dan mencapai keefektifan dalam kegiatan pemerintahan. Tujuan kebijakan publik dapat dibagi menjadi jenis berikut:

1. *Resources* atau sumber daya

Kebijakan publik yang bertujuan untuk menyerap dan mendistribusikan sumber daya negara, seperti kebijakan otonomi daerah, yang

memberikan daerah kewenangan untuk mengelola dan mengendalikan sumber daya.

2. Kebijakan regulatif dan deregulatif

Kebijakan yang bersifat regulatif berfungsi untuk mengatur dan membatasi, seperti kebijakan tarif, pengadaan barang dan jasa, dan hak asasi manusia, sementara kebijakan yang bersifat deregulatif berfungsi untuk membebaskan, seperti kebijakan privatisasi dan penghapusan tarif.

3. Dinamisme dan stabilitas

Kebijakan dinamis adalah kebijakan yang dimaksudkan untuk memobilisasi sumber daya nasional untuk mencapai kemajuan yang diinginkan, seperti kebijakan desentralisasi atau stabilitas. Mereka juga dimaksudkan untuk mencegah perubahan yang terlalu cepat agar tidak merugikan sistem yang ada, seperti kebijakan keamanan nasional dan penetapan suku bunga.

4. Penguatan negara dan pasar

Kebijakan yang mendorong peran negara lebih besar daripada peran masyarakat, seperti kebijakan pendidikan nasional yang menjadikan negara sebagai aktor utama dan bukan masyarakat, dibandingkan dengan kebijakan yang mendorong peran publik atau mekanisme pasar lebih besar daripada peran negara. Misalnya, kebijakan privatisasi perusahaan publik dan kebijakan perseroan terbatas (PT) adalah contoh kebijakan yang mendorong peran publik atau pasar lebih besar daripada peran negara.

3. Ruang Lingkup Kebijakan Publik

Kebijakan Publik mencakup empat metode penelitian proses kebijakan, hasil penelitian kebijakan, dan wawasan yang dihasilkan oleh penelitian yang membantu menjawab kebutuhan intelijen dan kerja sama saat ini. Tujuan politik dan realisasinya berhubungan dengan hasil kegiatan negara dalam pelaksanaan tindakan politik. Permasalahan kebijakan harus diatasi dan diselesaikan sebelum kebijakan dapat diterapkan.

Keempat komponen ini berfungsi sebagai sumber masalah dan merupakan syarat untuk keberhasilan proses penerapan kebijakan. merupakan struktur organisasi yang mencakup komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan proses kerja birokrasi. Ketika mengimplementasikan suatu kebijakan, keempat elemen tersebut harus ada.

Faktor-faktor strategis yang berpengaruh dalam perumusan kebijakan publik

1. Faktor sistem politik

Tata pemerintahan dan administrasi sistem politik adalah faktor terhadap. Dengan bantuan publik atau masyarakat, pemerintah dapat membuat kebijakan, dan kinerjanya juga dinilai.

2. Faktor sistem ekonomi

Pasar dan perusahaan biasanya melakukan kegiatan ekonomi dengan bertransaksi dan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Faktor nilai-nilai sosial budaya

Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan lebih berfokus pada populasi umum atau warga negara.

1. 5. 5. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan adalah proses jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas suatu masyarakat, yang memerlukan persiapan yang cermat. Rencana ini harus dapat mencakup kapan, di mana, dan bagaimana pembangunan harus dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan (Ustanir & Abadi, 2017; Yimaz Bakir dkk., 2018). Perencanaan pembangunan, menurut Tjokroamidjojo (1984), didefinisikan sebagai manajemen penggunaan sumber daya pembangunan, termasuk sumber daya ekonomi, untuk mencapai tujuan tertentu secara lebih efisien dan efektif, dengan dasar kondisi sosial ekonomi yang lebih baik.

Perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah mengambil alternatif terbaik dengan sumber daya yang cukup (Mustanir, Ahmad). Sehubungan dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi kesenjangan pendapatan, dan mengentaskan kemiskinan, pembangunan merupakan proses yang melibatkan perubahan dan upaya tambahan (Todaro, 2000). Salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi adalah infrastruktur, yang memainkan peran penting dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Semua pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, kelompok sasaran, pemerintah, yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengelolaan anggaran, dan masyarakat

lokal, yang bertanggung jawab atas perencanaan dan implementasi kebijakan, harus memprioritaskan perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari kebijakan publik.

Indikator perencanaan pembangunan menurut Sijafrisal (Hasim & Abd Rohman, 2017) dalam (Mustanir & yasin, 2018) adalah sebagai berikut

1. Mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan; ini adalah keterpaduan antara pelaku pembangunan dalam institusi pemerintahan dan swasta serta masyarakat umum.
2. Menjamin bahwa area akan terintegrasi, sinkronisasi, dan bersinergi sehingga pembangunan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan untuk dapat mewujudkan pembangunan sesuai dengan keterkaitan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, atau bagaimana memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan.
5. Salah satu tujuan dan fungsi utama dari perencanaan pembangunan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara adil, efisien, dan efektif.

1. 5. 6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Tujuan Musrenbang perencanaan pembangunan adalah untuk mencapai: 1. Pencapaian visi dan misi daerah, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, ruang, waktu, dan fungsi pemerintahan, serta

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan. Salah satu jenis perencanaan dan penganggaran yang dikenal sebagai musrenbang menggunakan pendekatan top-down dan bottom-up dengan fokus pada partisipasi (Yunas, Zhiru 2017). Menurut Norton dan Elson (2002), penerapan pendekatan top-down dalam penganggaran dan perencanaan tidak boleh membatasi tanggung jawab perencana dan masyarakat.

Oleh karena itu, musrenbang dilakukan untuk mencapai kesepakatan, komitmen, dan kesepakatan pemerintah, masyarakat, dan pelaku pembangunan tentang prioritas pembangunan. Menurut UU Nomor 25 Tahun 2004, pendekatan top-down dan partisipatif diterapkan melalui berbagai musrenbang yang dimulai di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi, sebelum mencapai tingkat nasional dan provinsi.

1. 5. 7. Demokrasi Deliberatif

Jürgen Habermas berpendapat bahwa istilah "DELIBERATION" berasal dari kata Latin *deliberatio*, yang berarti "nasihat", "pertimbangan", atau "nasihat" (Sari 2013). "Demokrasi deliberatif artinya sumber legitimasi bukanlah keseluruhan ekspresi kehendak individu atau hukum, melainkan proses pengambilan keputusan politik yang selalu terbuka untuk musyawarah dan perdebatan," kata Rainer Forst, salah satu kritikus Habermas (Wahuni 2015). Sebenarnya, perencanaan musyawarah adalah tanggapan terhadap tindakan berfikir dan bekerja sama. Untuk mengatasi hal ini, konseling bertujuan untuk membuat rencana yang dapat diterima untuk mengatur kegiatan peserta dengan cara yang paling efektif. Kebutuhan peserta

dipengaruhi dan diubah oleh masing-masing rencana sehingga tujuan dan kepentingan mereka dapat disesuaikan (Forester, 1993).

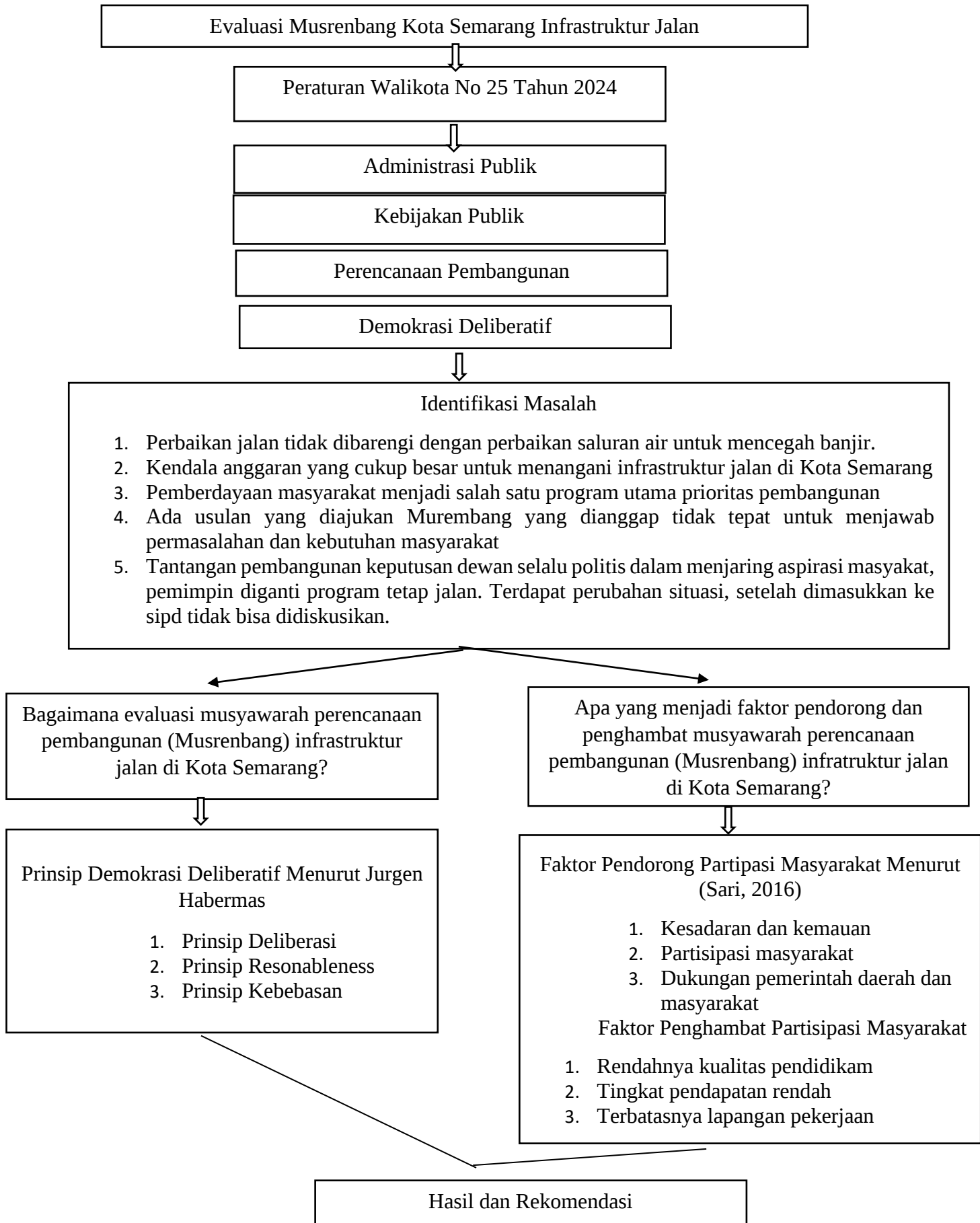
Teori demokrasi deliberatif mempelajari bagaimana orang dalam suatu masyarakat berkomunikasi sebagai warga negara dan bagaimana komunikasi pada tingkat warga negara mempengaruhi pengambilan keputusan (F. Budi Hardiman, Sukma 2021). Aspek argumentatif dan informasional diperlukan dalam musyawarah. Di sini, "rekursif" berarti bahwa keputusan, preferensi, dan perspektif yang dianggap konstan selama model dapat diubah secara musyawarah. Komunikasi non-simbolis, yaitu komunikasi yang terjadi secara spontan, antar peserta yang berkompeten Teori demokrasi deliberatif tidak mendorong revolusi; mereka mendorong perubahan supremasi hukum melalui debat publik di berbagai bidang budaya dan sosial untuk meningkatkan partisipasi demokratis masyarakat.

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, demokrasi deliberatif memiliki landasan konstitusional yang kuat. Menurut muatannya, sila keempat Pancasila, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan," menggambarkan demokrasi deliberatif. Ide ini terkait erat dengan adat istiadat lokal dan kearifan suku-suku Indonesia. Pancasila menetapkan konsultasi dan perwakilan masyarakat untuk mencapai kesepakatan. Dari bahasa Latin, *deliberation* berarti nasihat, pertimbangan, atau nasehat.

Ketika kebijakan publik lulus uji konsultasi publik, demokrasi terjadi. Menurut Habermas, ini disebut diskusi publik. Menurut Jürgen Habermas, demokrasi deliberatif memerlukan hubungan komunikatif antara ruang publik dan masyarakat. Dalam proses membuat keputusan, masyarakat dan negara berbicara

secara dialektis satu sama lain. Pada dasarnya, Habermas ingin membangun demokrasi yang berpusat pada kualitas daripada kuantitas.

1.6 Kerangka Berfikir



1.7 Operasionalisasi Konsep

1. Demokrasi Deliberatif

Operasionalisasi konsep menjelaskan tentang bagaimana cara mengukur evaluasi kebijakan

Teori demokrasi deliberatif membuka peluang bagi masyarakat, LSM, akademisi, pemerintah dan stakeholder terkait untuk berkomunikasi dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan pembangunan yang biasanya proses tersebut disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Prinsip dalam Teori Deliberasi Demokratif menurut Jurgen Habermas dalam penelitian yang berjudul Konsep Komunikasi jurgen habermas Dalam Ide Demokrasi deliberatif dan Tindakan Komunikatif(2022) yang dimuat Jurnal Ilmu Komunikasi yaitu prinsip deliberasi, prinsip reasonableness, dan prinsip kebebasan. Operasional konsep menjelaskan tentang bagaimana cara mengukur variabel. Kriteria yang digunakan untuk mengukur evaluasi musyawarah perencanaan pembangunan

Dalam demokrasi deliberatif Jurgen Habermas terdapat tiga prinsip utama.

1) Prinsip deliberasi,

Berkaitan dengan pertimbangan yang dilakukan oleh semua pihak sebelum pengambilan keputusan.

2) Prinsip reasonableness,

Berkaitan dengan pertimbangan bersama dan kesediaan untuk memahami pihak lain.

3) Prinsip kebebasan

Berkaitan dengan peluang dan kebebasan yang sama dalam menyampaikan pendapat dan gagasan

Dalam teori ini menekankan pada proses dan partisipasi antar stakeholder serta cara meraihnya.

Penelitian ini yang menjadi fenomena adalah

1. Partisipasi masyarakat dan stakeholder beserta narasumber
2. Ketersediaan ruang dalam proses musyawarah
3. Komunikasi antar warga dan pembentuk kebijakan
4. Banyaknya usulan yang masuk
5. Kesesuaian usulan dengan program yang berjalan.

Kerangka Teori

1. Kerangka Teori Prinsip Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas

Dalam demokrasi deliberatif terdapat tiga prinsip utama

- 1) Prinsip deliberasi, artinya sebelum mengambil keputusan perlu melakukan pertimbangan yang mendalam dengan semua pihak terkait.
- 2) Prinsip reasonableness, artinya dalam melakukan pertimbangan bersama hendaknya ada kesediaan untuk memahami pihak lain
- 3) Prinsip kebebasan, artinya semua pihak yang terkait memiliki peluang yang sama dan memiliki kebebasan dalam menyampaikan pikiran, pertimbangan dan gagasannya (Jurgen Habermas dalam Muttaqien dan Deden, Konsep Komunikasi Jurgen Habermas Dalam Ide Demokrasi Deliberatif dan Tindakan Komunikatif : 2023)

Esensi demokrasi dari perspektif demokrasi deliberatif -yakni debat terbuka dan bebas, posisi warga yang setara, ruang publik kritis, media massa yang independen dan terjangkau, sirkulasi informasi dan pluralisme- merupakan kondisi yang dibutuhkan untuk menguji klaim-klaim kebenaran. Inilah sejumlah syarat struktural dan prosedural yang secara potensial membantu kita untuk menemukan jawaban dan solusi yang lebih baik atas pertanyaan dan persoalan sosial yang kita hadapi. Kebenaran dalam demokrasi deliberatif tidak bersifat tunggal dan final. (Habermas dalam Paulus dan Otto, Demokrasi Sebagai Diskursus dan Deliberasi Menurut Jürgen Habermas : 2022)

1. Prinsip Deliberasi

Diskusi Kekuasaan

Jurgen Habermas berpandangan bahwa proses demokratisasi kekuasaan hanya mungkin terjadi jika jalur komunikasi antara warga dan pengambil keputusan politik menjadi jalur aliran kekuasaan. (Jurgen Habermas dalam Andrea Carriquiry, Deliberation in digital environments and toleration: rethinking the digital public sphere, with Habermas and beyond Habermas : 2024)

Jaminan Kesempatan

No	Tokoh	Pendapat
1.	Habermas (1995)	Paradigma prosedural berpijak pada gambaran tentang masyarakat bukan saja sebagai lokus prosedur produksi, melainkan juga tempat proses komunikasi. Untuk dapat memenuhi perannya sebagai jaminan integrasi sosial, hukum harus legitim.
2.	Rousseau dalam Jürgen Habermas (1995) (Rousseau : Jürgen Habermas, Die Normalität einer Berliner Republik. Kleine politische Schriften VIII, Frankfurt am Main: Suhrka Verlag, 1995, hlm. 77)	Hak-hak dasar yang dikonstruksikan di atas memang bersifat konstitutif bagi setiap asosiasi subjek-subjek hukum yang bebas dan setara. Namun keberadaan hak-hak dasar tersebut membutuhkan kekuasaan negara yang dapat memberikan jaminan kepastian jangka panjang.
3.	(Jürgen Habermas dalam Andrea Carriquiry, Deliberation in Digital Environments and Toleration: Rethinking The Digital Public Sphere, With Habermas and Beyond Habermas : 2024)	Argumentasi atau deliberasi dalam demokrasi substantif selalu memiliki titik pijak penilaian-penilaian rasional secara empiris dan normatif. Artinya, deliberasi selalu merujuk pada pernyataan deskriptif tentang apa yang riil secara empiris dan proposisi preskriptif tentang apa yang seharusnya dilaksanakan. Dengan demikian, argumentasi bukan sekedar ekspresi permainan akrobat kepentingan-kepentingan (ekonomi atau identitas sektarian), melainkan berisi tentang proposisi-proposisi kebenaran.

Kesempatan Yang Sama

Deliberasi publik adalah pertukaran argumentasi untuk mendukung keyakinan politik. Dengan demikian keyakinan politik tidak saja sekedar preferensi subjektif, tapi berpijak pada fakta politis yang objektif baik secara empiris maupun normatif. Di dalam demokrasi, perbedaan-perbedaan tersebut lumrah dan tidak

bereskalasi menjadi tindakan kekerasan dan perang, sebab demokrasi berpijak pada prinsip kooperasi dan penentuan diri kolektif setiap individu yang bebas dan setara (Jurgen Habermas dalam Andrea Carriquiry, *Deliberation in digital environments and toleration: rethinking the digital public sphere, with Habermas and beyond Habermas* : 2024)

Sumber Daya

Komunikasi

Habermas menekankan pentingnya afinitas identitas kolektif sebuah bangsa pada prinsip-prinsip universal negara hukum dan demokrasi. Bangsa modern berbasis kewargaan tidak menemukan dan merumuskan identitasnya di dalam kesamaan etnis-kultural, melainkan lewat praksis kewargaan yang secara aktif mengartikulasikan hak-hak komunikasi dan partisipasi publik. (Jurgen Habermas dalam Andrea Carriquiry, *Deliberation in digital environments and toleration: rethinking the digital public sphere, with Habermas and beyond Habermas* : 2024)

2. Prinsip Reasonableness

Keadilan

No	Tokoh	Pendapat
1.	(Jurgen Habermas dalam Paulus dan Otto, Demokrasi Sebagai Diskursus dan Deliberasi Menurut Jürgen Habermas dalam Jurnal Ledalero Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif ledalero : 2022)	Esensi demokrasi dari perspektif demokrasi deliberatif -yakni debat terbuka dan bebas, posisi warga yang setara, ruang publik kritis, media massa yang independen dan terjangkau, sirkulasi informasi dan pluralisme- merupakan kondisi yang dibutuhkan untuk menguji klaim-klaim kebenaran. Inilah sejumlah syarat struktural dan prosedural yang secara potensial membantu kita untuk menemukan jawaban dan solusi yang lebih baik atas pertanyaan dan persoalan sosial yang kita hadapi. Kebenaran dalam demokrasi deliberatif tidak bersifat tunggal dan final
2.	(Jurgen Habermas dalam Andrea Carriquiry, Deliberation in digital environments and toleration: rethinking the digital public sphere, with Habermas and beyond Habermas : 2024)	Peran sentral ruang publik. Ruang publik adalah jaringan komunikasi atau sirkulasi substansi dan opini. Komunikasi opini tersebut mengalami proses filterisasi dan pemadatan sehingga terbentuklah opini publik yang berisikan tema-tema tertentu. Pada tempat pertama ruang publik diartikan sebagai jaringan komunikasi di mana terjadi pertukaran pandangan dan opini. Perlu ditekankan bahwa hanya opini yang memenuhi kriteria tertentu dapat menjadi opini publik yang sesungguhnya.

Kepatuhan

Habermasian berpijak pada basis argumentasi bahwa otonomi politik merupakan tujuan dalam dirinya yang tidak dapat dicapai dengan cara merealisasikan interese privat masing-masing individu, melainkan lewat partisipasi politik semua dalam sebuah praksis intersubjektif. Artinya, tidak seorang dapat

hidup bebas dengan cara mengorbankan yang lain, sebab kebebasan seorang individu terhubung dengan kebebasan individu-individu lain tidak saja dalam pengertian kebebasan negatif liberal (Jurgen Habermas dalam Andrea Carriquiry, *Deliberation in Digital Environments and Toleration: Rethinking the Digital Public Sphere*, with Habermas and Beyond Habermas : 2024)

3. Prinsip Kebebasan

1. Komunikasi

No	Tokoh	Pendapat
1.	(Jurgen Habermas dalam Andrea Carriquiry, <i>Deliberation in digital environments and toleration: rethinking the digital public sphere</i> , with Habermas and beyond Habermas : 2024)	Demokrasi deliberatif memungkinkan partisipasi publik secara substantif dan membentuk kultur politik yang egalitarian, bebas dan bermartabat. Deliberasi publik membuka ruang partisipasi warga untuk turut menentukan arah kebijakan publik dan melakukan kontrol atas kekuasaan (Jurgen Habermas, 1996) <i>Die Einbeziehung des anderen</i> . Frankfurt am Main: Suhrkamp
2.	(Jurgen Habermas dalam Paulus dan Otto, <i>Demokrasi Sebagai Diskursus dan Deliberasi</i> Menurut Jürgen Habermas dalam Jurnal Ledalero Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif ledalero : 2022)	Buku <i>Faktizität und Geltung</i> mengemukakan tiga kategori hak yang mutlak perlu bagi seorang pribadi hukum dan satu kelompok hak atas partisipasi politik. Tiga kategori hak dimaksud adalah: (1) Hak atas kebebasan subjektif yang setara dan seluas-luasnya; (2) Hak atas status keanggotaan yang bebas pada sebuah asosiasi hukum; (3) Hak atas perlindungan hukum secara individual. Ketiga kelompok hak ini tergolong ke dalam kategori otonomi privat. Kemudian terdapat juga (4) hak-hak atas kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses formasi opini publik dan kehendak.

3. Media Masyarakat

No	Tokoh	Pendapat
1.	Paulus dan Otto dalam Habermas : Demokrasi Sebagai Diskursus dan Deliberasi Menurut Jürgen Habermas (2022)	Untuk menjamin kualitas argumentasi tersebut ruang publik politik sangat dibutuhkan. Ruang publik tersebut terbentuk dan dijamin lewat akses kolektif atas sumber informasi, sarana media massa publik dan privat, institusi pendidikan dan forum-forum diskusi.
2.	(Jürgen Habermas dalam Andrea Carriquiry, Deliberation in digital environments and toleration: rethinking the digital public sphere, with Habermas and beyond Habermas : 2024)	Ruang publik tersebut terbentuk dan dijamin lewat akses kolektif atas sumber informasi, sarana media massa publik dan privat, institusi pendidikan dan forum-forum diskusi.

4. Akses Informasi

Bergesernya ruang deliberasi publik dari media massa main stream ke jaringan media sosial dan media online dengan kualitas yang mencemaskan menciptakan tantangan tersendiri bagi pembentukan kualitas demokrasi. Arus informasi dan data sering bergerak sesuai selera dan preferensi pengguna yang tak jarang menutup diri terhadap informasi dan pandangan yang lebih terpercaya dan berkualitas. (Jürgen Habermas dalam Andrea Carriquiry, Deliberation in digital environments and toleration: rethinking the digital public sphere, with Habermas and beyond Habermas : 2024)

Tabel 1. 2 Operasonalisasi Konsep

No	Faktor	Indikator	Gejala	Sub gejala
1	Demokrasi deliberatif	Prinsip deliberasi	Diskusi kekuasaan	Jaminan kesempatan
				Kesempatan yang sama
				Kebebasan berargumen
			Sumber daya	Komunikasi
				Sarana komunikasi
				Akses informasi tidak terbatas
				Tujuan
		Prinsip Reasonableness	Kepatuhan	Konformitas
				Penerimaan
				Ketaatan
			Keadilan	Hal individu
				Peluang yang sama
				Ruang Publik
		Prinsip Kebebasan	Komunikasi	Ketenangan komunikasi
				Membuat usulan
				Pertukaran hak dan kewajiban

			Media Masyarakat	Media presentasi masyarakat
				Akses informasi
				Sarana pendidikan

2. Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Masyarakat

Kerangka Teori

Faktor Pendorong Partisipasi Masyarakat menurut Slamet (Nurbaiti, 2017:227)

1. Kesempatan

Menurut Slamet, (Nurbaiti, 2017:227), Kesempatan yaitu adanya suasana atau kondisi lingkungan yang disadari oleh orang tersebut bahwa dia berpeluang untuk berpartisipasi. Kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi salah satunya ialah melalui peran pemerintah. Wujudnya yaitu dengan kemauan politik dari penguasa untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan, baik dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pemeliharaan dan pemanfaatan pembangunan.

2. Kemauan

Menurut Slamet (Nurbaiti, 2017:227), kemauan yaitu adanya sesuatu yang mendorong atau menumbuhkan minat dan sikap mereka untuk termotivasi berpartisipasi

3. Kemampuan

Kemampuan menurut Slamet (Nurbaiti, 2017 : 227) adalah kemampuan untuk menemukannya dan memahami kesempatan-kesempatan untuk membangun, pengetahuan tentang peluang untuk membangun (memperbaiki mutu hidupnya). Kemampuan dari masyarakat menentukan lancarnya proses kegiatan untuk mencapai tujuan.

Faktor Pendorong Partisipasi Masyarakat Menurut

1. Kesempatan
2. Kemauan
3. Kemampuan

Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

1. Demografi
2. Ekonomi

Tabel 1. 3 Opreasionalisasi Konsep Faktor Pendorong dan Penghambat

No	Indikator	Gejala	Sub gejala
1	Faktor Pendorong Partisipasi Masyarakat	Kesempatan	Pengambilan keputusan
			Perencanaan
			Pelaksanaan
			Monitoring dan evaluasi
		Kemauan	Minat
			Sikap
		Kemampuan	Kesempatan
			Peluang
2	Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat	Demografi	Usia
			Pendidikan
		Ekonomi	Penghasilan
			Pekerjaan

1.8 Argumen Penelitian

1. Menurut Stephen Toulmin, argumentasi adalah jenis logika yang sistematis dengan dasar yang kuat. Ia menyarankan model argumentasi yang terdiri dari enam komponen: klaim, data, backing, waran, rebuttal, dan qualifier. Klaim adalah pernyataan yang ingin dibuktikan, data adalah bukti yang mendukungnya, waran menunjukkan hubungan antara klaim dan data, dan rebuttal adalah penolakan terhadap klaim. Kualifikasi adalah batasan atau syarat dari klaim.
2. Dalam melakukan evaluasi musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dibutuhkan data yang relevan dan harus memperhatikan proses musrenbang. Mengingat banyak daerah yang telah dilakukan musrenbang tetapi hasil dari usulan musrenbang tersebut belum bisa diwujudkan oleh pemerintah. Namun, dibalik itu masih banyak ruang publik masyarakat yang dibatasi dengan regulasi ataupun legitimasi yang ada sehingga masyarakat memiliki keterbatasan dalam menyampaikan pendapatannya mereka terkait pembangunan daerah terutama infrastruktur jalan.
3. Bappeda Kota Semarang bergerak sebagai instansi pemerintah daerah dalam menghimpun perencanaan pembangunan di Kota Semarang. Bappeda juga sebagai institusi pelaksana yang menaungi musyawarah perencanaan pembangunan di Kota Semarang mulai dari tingkat kelurahan sampai tingkat kota. Hal ini sebagaimana termaksud dalam Peraturan

Walikota Semarang no 25 Tahun 2024 tentang pedoman Musyawarah Perencanaan pembangunan.

4. Sejalan dengan regulasi ini, peneliti memilih instansi tersebut sebagai instansi yang menjadi acuan dasar untuk melihat realita di lapangan musyawarah perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kota Semarang. Diharapkan dengan adanya evaluasi , musrenbang pada tahun berikutnya terjadi peningkatan kualitas dan implementasi dari usulan yang telah dilakukan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).
5. Penelitian ini berbeda dengan penelitian lain yang sebelumnya telah dilakukan dimana evaluasi dan faktor pendorong faktor penghambat musrenbang tidak diperhitungkan dengan berlandaskan teori. Peneliti ingin mengetahui secara lebih komprehensif evaluasi musrenbang beserta faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi evaluasi musrenbang.

1.9 Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif, menurut Koentjaraningrat (1993: 89), digunakan untuk memberikan gambaran mendalam tentang keadaan dan gejala individu atau kelompok tertentu. Suharsimi Arikunto (2013: 3) menguraikan definisi penelitian deskriptif, yang berarti penelitian yang menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lainnya sebelum dimasukkan ke dalam laporan penelitian. Penelitian ini akan mencoba memberikan gambaran tentang bagaimana perencanaan pembangunan infrastruktur jalan yang telah dilakukan dan direncanakan kedepannya. Penelitian

ini untuk mendeskripsikan. Penelitian ini mengidentifikasi tentang dari tahapan proses musyawarah perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kota Semarang dengan stakeholder terkait dalam upaya mewujudkan aspirasi masyarakat.

1.10 Situs Penelitian

Lokasi penelitian, menurut Sugiyono (2017: 101), adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian harus dipilih dengan teliti dan sesuai dengan tujuan, latar belakang, dan masalah penelitian. Situs penelitian adalah tempat dilaksanakan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan kegiatan penelitian dan pengamatan ke berjalannya musyawarah perencanaan pembangunan di Kota Semarang. Peneliti memilih Kota Semarang karena dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tersebut masih terdapat sejumlah permasalahan.

1.11 Subjek Penelitian

Subjek penelitian Suharsimi Arikunto (1989) membatasi subjek penelitian sebagai objek, objek, atau individu di mana data untuk variabel penelitian disimpan. Subjek penelitian adalah sumber informasi yang digunakan dalam penelitian. Peneliti memilih subjek penelitian dengan menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono, “teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu” (Sugiyono, 2010:300). Peneliti mempertimbangkan tertentu orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita teliti dengan informan sebagai narasumber sehingga

memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. (Sugiyono, 2012:54). Peneliti beralasan menggunakan purposive sampling yaitu untuk mengumpulkan suatu data yang benar-benar real atau nyata dengan mewawancarai seorang informan yang dianggap mengetahui atau menguasai suatu keahlian atau pekerjaan tertentu di bidangnya. Selain itu, digunakan teknik snowball sampling untuk mengungkapkan aspek atau hal yang lebih spesifik di lapangan, melengkapi informasi yang dibutuhkan.

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu

1. Bappeda Jawa Tengah bidang perencanaan
2. Bappeda Jawa Tengah Bidang P2MP
3. Bappeda Semarang bidang pemberdayaan dan perencanaan infrastruktur
4. Pemerintah Kecamatan Banyumanik Kasi Pembangunan
5. Ketua LPMK Kecamatan Banyumanik
6. Ketua Karang Taruna Kecamatan Banyumanik

1.12 Jenis Data

Menurut (Sugiyono 2017, 137) sumber data diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder

1 Data Primer

Data primer, menurut Trochim, adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan tertentu. Data sekunder, di sisi lain, adalah data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh individu atau organisasi untuk tujuan lain, yang kemudian digunakan oleh peneliti untuk analisis atau penelitian.

Data diperoleh dengan wawancara dan observasi secara langsung jalan yang sedang dalam proses pembangunan dan dokumentasi. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Dokumen berupa arsip rencana pembangunan yang berasal dari BAPPEDA Kota Semarang
2. Dokumen terkait perencanaan, implementasi, dan evaluasi musyawarah perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kota Semarang
3. Dokumen dari BPS Kota Semarang
4. Peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) jalan di Kota Semarang
5. Informasi dari buku terkait konsep teori yang digunakan
6. Informasi dari artikel dan jurnal ilmiah nasional maupun internasional
7. Informasi dari blog maupun website resmi pemerintah dan website umum

2 Data Sekunder

Christensen et al. data sekunder merujuk pada data yang telah dikumpulkan oleh orang lain, dan peneliti dapat menggunakannya sebagai sumber informasi tambahan. Data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan, artikel, skripsi, jurnal, e-book, dan konferensi

internasional tentang topik yang sama. Isi dari data sekunder yang didapatkan berkaitan dengan gambaran umum tentang situs penelitian, visi misi, struktur organisasi serta SDM Bappeda Kota Semarang.

1.13 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data harus sehat secara moral. Memahami konsep ini sangat penting: metode ilmiah, data, tujuan, dan penggunaan (Sugiyono, 2016). Pengumpulan data menentukan keberhasilan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut.

1 Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, wawancara digunakan untuk mengumpulkan data untuk evaluasi awal atau untuk mendapatkan pemahaman responden yang lebih dalam. (Wekke Suardi, 2019). Teknik pengumpulan data ini didasarkan pada identifikasi individu atau fakta lain tentang pengetahuan dan/atau pandangan mereka sendiri. Pengamatan dengan partisipasi dan diskusi mendalam sering digabungkan dalam penelitian kualitatif. Peneliti terkadang mewawancarai penduduk setempat selain mengumpulkan pengamatan di daerah tersebut. (Abdussamad, 2022). Wawancara kepada pihak terkait dengan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) infrastruktur jalan di Kota Semarang. Peneliti berfokus pada wawancara mendalam. Analisis penelitian ini didasarkan pada wawancara mendalam dengan smartphone. Hasil wawancara disusun menjadi transkrip yang diklasifikasikan berdasarkan teori yang digunakan.

2 Observasi

Menurut Marshall (1995), Yang dimaksud dengan ungkapan “melalui observasi, ilmuwan dapat belajar tentang aktivitas dan tujuan yang terkait dengan perilaku” adalah peneliti dapat memperoleh wawasan tentang perilaku dan signifikansinya dengan melihat bagaimana individu bertindak dalam kehidupan nyata. (Wekke Suardi, 2019). Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung pada objek penelitian yaitu Evaluasi Musrenbang Infrastruktur jalan di Kota Semarang. Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas dan perilaku terstruktur dan semi terstruktur dan bertempat di lokasi penelitian yang dipilih.

3 Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan pengambilan gambar secara langsung dalam penelitian dan secara tidak langsung melalui. Dokumentasi berkaitan dengan dokumen publik dan pribadi

4 Studi Kepustakaan

Menurut Sugiyono (2018), studi kepustakaan mengacu pada studi teoritis dan referensi lain seperti nilai dan norma lingkungan sosial yang diteliti sehingga data yang diperoleh dapat mengaitkan literatur tentang keuntungan relatif.

1.14 Teknik Analisis Data

Miles & Huberman, dikutip dalam (Sugiono, 2017), mengatakan bahwa analisis data akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis data. Jenis data yang diperoleh menentukan metode analisis data ini. Data kualitatif disajikan dalam tiga tahap, seperti yang dilakukan dalam analisis kualitatif. Tahap-tahap ini

termasuk memadatkan data, menampilkan data, menarik kesimpulan, dan memvalidasi terang. Kondensasi data berarti seleksi, konsentrasi, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga tahap, yaitu: kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi data.

1. Kondensasi Data

Pemadatan data terjadi melalui pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data yang terdapat dalam catatan lapangan atau catatan lapangan atas temuan penelitian. Proses pemilihan data dilakukan dengan mengidentifikasi aspek yang paling penting dan terpenting, semua informasi ini dikumpulkan untuk menyempurnakan penelitian. Proses fokus (fokus), memusatkan perhatian pada tujuan penelitian sehingga data dianggap outlier tanpa pola dan tidak relevan dengan tujuan penelitian. Dengan cara ini, dapat menghasilkan data yang lebih fokus dan lebih fokus pada hasil yang diinginkan.

2. Menampilkan data

Dengan menyajikan data yang disusun dan diorganisir dalam model relasional sehingga mudah dipahami daripada, menampilkannya akan membantu Anda lebih mudah memahami apa yang terjadi. Visualisasi data memungkinkan untuk memahami apa yang terjadi dan melacak apa yang telah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan (pemeriksaan)

Hasil penelitian kualitatif merupakan penemuan-penemuan baru yang belum pernah ada sebelumnya, penemuan dapat berupa uraian atau representasi terhadap

objek-objek yang sebelumnya tidak jelas, menjadi jelas dan tepat, dapat disajikan dari segi sebab dan akibat hubungan efek atau hipotesis atau teori interaksi.

BAB II

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

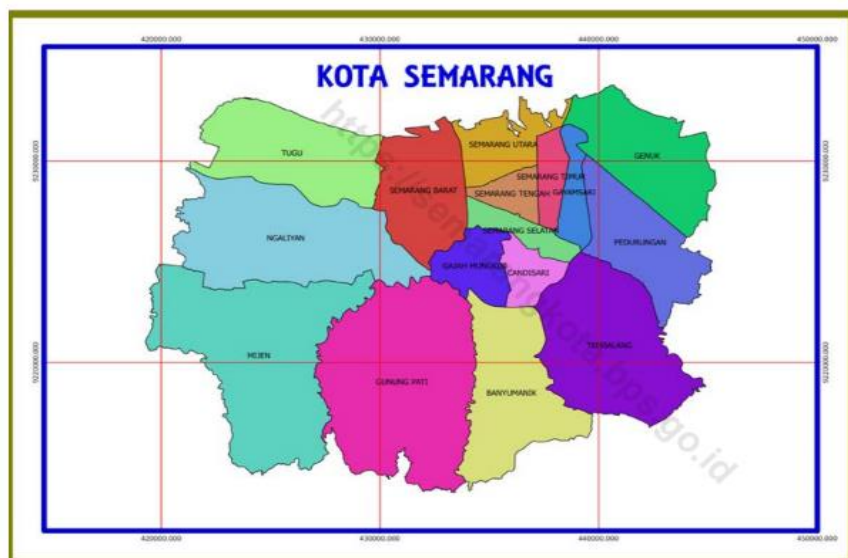
2.1 Profil Kota Semarang

A. Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang memiliki lokasi strategis dan berada di wilayah dengan jalur transportasi ekonomi di Pulau Jawa. Wilayahnya kurang lebih 373,70 kilometer, menurut Portal Kabupaten Semarang Tengah. Secara astronomis, Kota Semarang terletak diantara 6° sampai 50' dan 7° antara 10' Lintang Selatan dan 109° antara 35' dan 110° 50' Bujur Timur. Secara geografis, batas wilayah Kota Semarang adalah

1. Barat: di Kabupaten Kendal.
2. Timur d Kabupaten Demak.
3. Selatan: Kabupaten Semarang.
4. Utara: Laut Jawa, panjang pantai 13,6 km.

Peta Wilayah Administratif Kota Semarang



Sumber: Dokumen Semarang Dalam Angka 2024, BPS Kota Semarang

Berdasarkan peta administratif, Kota Semarang terbagi menjadi 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Kecamatan Kota Semarang terdiri dari Semarang Barat, Semarang Timur, Semarang Selatan, Semarang Utara, Semarang Tengah, Pedurungan, Gajah Mungkur, Genuk, Candi Sari, Banyumanik, Tembalang, Ngaliyan, Mijen, Gayamsari, Tugu, dan Gunungpati. Kecamatan Gunungpati memiliki luas 58,27 km² dan Kecamatan Semarang Tengah memiliki luas 5,17 km².

Administrasi Kota Semarang dapat dilihat dari tabel luas wilayah per kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kota Semarang

Kecamatan District	Ibukota Kecamatan Capital of district	Luas Total Area (KM2/sq.km)
(1)	(2)	(3)
Mijen	Mijen	56,52
Gunungpati	Gunungpati	58,27
Banyumanik	Banyumanik	29,74
Gajahmungkur	Gajahmungkur	9,34
Semarang Selatan	Lamper kidul	5,95
Candisari	Jatingaleh	6,40
Tembalang	Tembalang	39,47
Pedurungan	Gemah	21,1
Genuk	Gebangsari	25,98
Gayamsari	Gayamsari	6,2
Semarang Timur	Rejosari	5,42
Semarang Utara	Panggung lor	1,39
Semarang Tengah	Miroto	5,17
Semarang Barat	Karangayu	21,68
Tugu	Tugurejo	28,13
Ngaliyan	Ngaliyan	42,9
Kota Semarang	-	373,78

Sumber : BPS Kota Semarang

B. Slogan Kota Semarang

Kota ini disebut juga “Kota Atlas”, singkatan dari Aman, Tertib, Lancar, Indah, Sehat, yang merupakan slogan-slogan yang digunakan untuk menjaga keindahan kota. Semarang juga dikenal dengan sebutan “Pelabuhan Jawa” karena dikenal sebagai pusat Pelabuhan Jawa, dan Semarang menjadi daya tarik tersendiri di Asia. Kota Semarang mempunyai banyak slogan yang telah dan masih diusung. Kota Atlas Semarang (Aman, Tertib, Lancar, Indah, Sehat), lalu Semarang Pesona Asia, Semarang Budaya Keberagaman, dan terakhir simpul ekonomi Jawa Semarang.

C. Tagline

Dalam pernyataan misi Kota Semarang dari tahun 2016 hingga 2021, disebutkan bahwa "Semarang adalah kota dengan perdagangan dan jasa kelas dunia untuk masyarakat yang semakin sejahtera." Slogan "Hebat" menggambarkan masyarakat kota Semarang setelah memperhatikan kelestarian lingkungan, mengupayakan keunggulan dan gengsi, serta kondisi yang baik dan modern. Akibatnya, semangat baru dengan slogan “Bekerja Sama untuk Pembangunan Semarang” diperlukan untuk mencapai visi tersebut.

D. Lambang kota

Lambang Kota Semarang terdiri dari Perisai dua bagian, tugu muda, bintang sudut lima, bambu runcing, dan bukit candi. Lambang Kota Semarang menunjukkan tiga prinsip: unikitas (ke Semarangan), tradisi revolusioner kota, dan nasionalisme. Lambang tugu muda menunjukkan rasa nasionalisme yang dipegang

oleh masyarakat Semarang selama pertempuran lima hari. Bagian dataran rendah dan dataran tinggi kota Semarang diwakili oleh pegunungan, sedangkan pelabuhan Tanjung Emas diwakili oleh kotak bergelombang. Perisai menggambarkan pertahanan dan kekuatan karakter kuat kota Semarang.

E. Fasilitas

Sarana transportasi yang ada di Kota Semarang mengalami perkembangan pesat yaitu ada pelabuhan tanjung emas, Stasiun Poncol dan Stasiun Tawang. Terminal di kota semarang yaitu Terboyo, Penggarong, Mankan, dan Cankiran. Bandara di kota semarang yaitu Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani. Secara regional, Kota Semarang termasuk dalam wilayah Kedungsepur, yang terdiri dari Kendal, Demak, Semarang, Kota Semarang, Salatiga, dan Kabupaten Grobogan. Wilayah ini terdiri dari 85 kecamatan, dan Kota Semarang sendiri terdiri dari 16 kecamatan. Kota Semarang berkembang menjadi salah satu yang paling berpotensi dan menjadi regional utama.

F. Kondisi Demografi Kota Semarang

Pada tahun 2020, penduduk Kota Semarang didominasi oleh perempuan dibandingkan laki-laki dengan sex ratio sebesar 98,16%, dan penduduk usia kerja atau usia kerja (14-64 tahun) juga berjumlah 70,66% dari total penduduk. Diketahui nilai ketergantungan sebesar 41,52% untuk Kota Semarang. Penduduk kota semarang sangat beragam, ada suku jawa, cina, arab dan keturunannya.

Berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk 2020–2050 (Pertengahan tahun/Juni), jumlah penduduk Kota Semarang tahun 2023 tercatat sebesar 1.694,74 ribu jiwa.

Kepadatan penduduk cenderung naik seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Penyebaran penduduk di masing-masing kecamatan belum merata. Di wilayah Kota Semarang, tercatat kecamatan Semarang Timur sebagai wilayah terpadat (12.261 penduduk per km²), kecamatan Tugu wilayah kepadatannya paling rendah (1.201 penduduk per km²). Berikut tabel jumlah penduduk Kota Semarang per kecamatan.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kota Semarang

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (per Ribu Jiwa)
1	Tembalang	198,65
2	Pedurungan	196,53
3	Semarang Barat	149,33
4	Ngaliyan	145,50
5	Banyumanik	143,33
6	Genuk	132,47
7	Semarang Utara	117,89
8	Gunungpati	100,75
9	Mijen	89,95
10	Candisari	75,61
12	4ayamsari	70,41
12	Semarang timur	66,48
13	Semarang Tengah	55, 21
14	Gajahmungkur	56,35
15	Tugu	33,80
16	Semarang Selatan	62,18

Sumber : BPS (Semarang dalam Angka 2024)

G. Kondisi Topografi

Kota Semarang di wilayah pantai menghadap Laut Jawa bagian Utara dengan kemiringan 1-2%. Dataran rendah berada di tengah dengan kemiringan berkisar 2-15 %. Untuk di bagian selatan wilayahnya perbukitan dengan kemiringan antara 15-40%. Secara geografis, wilayah di Kota Semarang memiliki iklim tropis dengan musim kemarau di bulan April sampai September dan musim penghujan pada bulan Oktober sampai Maret.

Kota Semarang terletak di kaki gunung ungaran dengan wilayah yang dialiri banyak sungai seperti sungai besole, sungai silandak, sungai beringin, sianker, cleo, klipik, candi, bajak, kedungmundu. Wilayah Semarang Bawah berupa dataran rendah dengan berbagai infrastruktur perkotaan seperti pusat pemerintahan, stasiun, dan bandara. Daerah perbukitan bagian selatan berada di Semarang Atas.Semarang Selatan meliputi kecamatan Mijen, Gunungpati, Banyumanik, dan Tembalang.

2. 2 Profil BAPPEDA Kota Semarang

1. Visi Misi

Visi dan Misi BAPPEDA Kota Semarang sejalan dengan Visi Misi Walikota Semarang. Visi Misi Kota Semarang yang terdapat dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026

Visi : terwujudnya Kota Semarang Yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila Dalam Bingkai NKRI yang Berbhineka Tunggal Ika

Misi

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas tinggi untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial
2. Berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi pancasila, meningkatkan potensi ekonomi lokal dan mendorong pembangunan industri melalui riset dan inovasi
3. Menjamin kebebasan masyarakat untuk beribadah, memenuhi hak dasar, dan melindungi kesejahteraan sosial dan hak asasi manusia secara berkeadilan.
4. Menciptakan infrastruktur berkualitas tinggi yang berwawasan lingkungan untuk mendorong kemajuan kota.
5. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara aktif dan menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA

Badan bertugas membantu Walikota ketika melaksanakan urusan pemerintahan terutama di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Fungsi BAPPEDA Kota Semarang

Badan berfungsi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. Membuat kebijakan di bidang perencanaan pemerintahan, sosial dan budaya, ekonomi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pengendalian

dan evaluasi pembangunan daerah, dan penelitian pengembangan dan UPTB

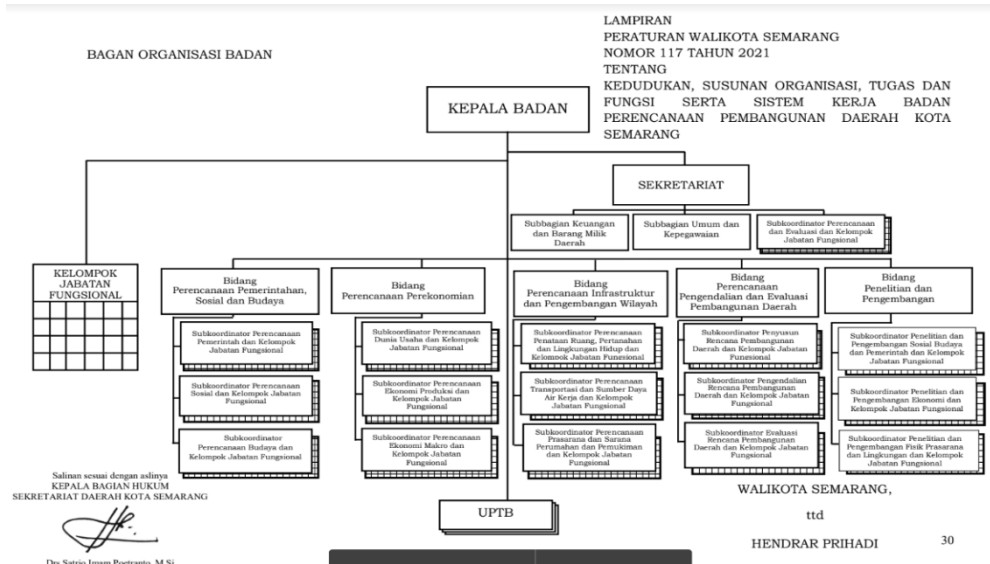
- b. membuat rencana strategis yang sesuai dengan visi misi walikota
- c. melakukan koordinasi terkait dengan pelaksanaan program kegiatan Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, ekonomi, Infrastruktur, pengembangan wilayah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan serta Penelitian
- d. menyelenggarakan manajemen kinerja pegawai
- e. menyelenggarakan kerja sama dengan Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Ekonomi, Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Monitoring dan Evaluasi serta Penelitian
- f. penyelenggaraan kesekretariatan Badan;
- g. penyelenggaraan program dan kegiatan dengan Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Ekonomi, Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Monitoring dan Evaluasi serta Penelitian dan UPTB
- h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dengan Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Ekonomi, Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Monitoring dan Evaluasi serta Penelitian dan UPTB
- i. menyelenggarakan laporan terkait pelaksanaan program kegiatan
- j. melaksanakan kegiatan sebagaimana ditugaskan Walikota sesuai tugas dan fungsinya

3. Struktur organisasi

Struktur organisasi BAPPEDA Kota Semarang dimuat dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, terdiri atas:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat terdiri atas:
 - 1. Subbagian Keuangan dan Barang Milik daerah
 - 2. Sub bagian umum dan kepegawaian
- c. Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya
- d. Bidang Perencanaan Perekonomian
- e. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
- f. Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan
- h. UPTB dan
- i. Jabatan Fungsional;

4. Bagan Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam lampiran:



2.3 Tujuan Musrenbang

1. Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat Kelurahan/Desa yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
2. Membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Kelurahan/Desa.
3. Melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan Kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

2. 4 Susunan Acara Dalam Musrenbang

Tabel 2. 3 Susunan Acara Musrenbang

No	Jam	Kegiatan	PIC
1	13.30 – 14.40	Registrasi	Panitia
2	14. 00 – 14.05	Pembukaan	MC
3	14.05 – 14.10	Mendengarkan Lagu Indonesia Raya	MC
4	14.10 – 14.15	Pembacaan Doa	Panitia
5	14.15 – 14.30	Penyerahan Penghargaan Kepada Gubernur	Panitia
6	14.30 – 14.40	Laporan Pelaksanaan Musrenbangprov Jateng Tahun 2023 oleh Sekretaris Daerah Jawa Tengah	Panitia
7	14.40 – 14.50	Penyampaian Produk-produk Pikiran Jawa Tengah	Ketua DPRD Jateng
8	14.55– 15.10	Penyampaian kebijakan Peningkatan Infrastruktur Dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Jawa tengah oleh Menteri Pekerjaan Umum	Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat
9	15.10 – 15.25	Penyampaian Arah Kebijakan Pemerintah Pusat Jawa tengah 2024 oleh Menteri Bappenas	Menteri Bappenas
10	15.25 – 15.40	Penyampaian Sinkronisasi Dokumen DPRD provinsi Jawa Tengah oleh Kementerian Dalam Negeri	Menteri Dalam Negeri
11	15.40 – 15.55	Penyampaian Arah Kebijakan oleh Gubernur Jawa tengah	Gubernur Jawa Tengah
12	15.55 – 16.25	Diskusi dan tanya jawab	Moderator
13	16.25 – selesai	Penutupan	Moderator

Sumber : Dokumen Bappeda Jawa Tengah

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Informan

Tabel 3.1 Identitas Informan

No	Informan	Jabatan	Keterangan
1	Informan 1	Sub Kordinator Bagian Infrastruktur Jalan	Bappeda Jawa Tengah
2	Informan 2	Sub Koordinator LP2MK	Bappeda Jawa Tengah
3	Informan 3	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappeda Kota Semarang
4	Informan 4	Kasi pembangunan	Pemerintah Kecamatan Banyumanik
5	Informan 5	Ketua Karang Taruna Kecamatan Banyumanik	Karang Taruna
6	Informan 6	Ketua LPMK Kecamatan Banyumanik	Pemerintah Kecamatan banyumanik

Untuk informan kunci, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan Bappeda Kota Semarang, Pemerintah Kecamatan Banyumanik dan Ketua LPMK Kecamatan Banyumanik. Untuk Informan pendukung peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Sub koordinator bidang pembangunan infrastruktur dan sub koordinator LM2MP Bappeda Jawa Tengah, serta Ketua Karang Taruna Kecamatan Banyumanik.

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan cara bertahap rentang pada bulan November 2024. Hasil wawancara ini diperoleh dengan menggunakan

teknik wawancara mendalam (*in depth interview*) sebagai bentuk mencari data dan observasi yang kemudian dianalisis oleh peneliti. Berikut merupakan tabel jadwal wawancara yang dilakukan peneliti.

3. 2 Analisis Hasil Penelitian

Bidang perencanaan infrastruktur Bappeda Kota Semarang dan dikelola oleh LPMK 5 yang memuat beberapa unsur untuk memperoleh hasil musrenbang yang efektif dan sesuai dengan keinginan masyarakat.

3.2.1 Demokrasi Deliberatif dalam Evaluasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Infrastruktur Jalan di Kota Semarang

3.2.1.1 Prinsip Deliberasi Dalam Musrenbang Infrastruktur Jalan di Kota Semarang

Prinsip deliberasi adalah suatu prinsip yang berkaitan pertimbangan yang dilakukan oleh semua pihak sebelum pengambilan keputusan.

1. Diskusi Kekuasaan

a. Jaminan Kesempatan

Berdasarkan hasil wawancara secara mendalam dengan informan hasil ditemukan bahwa dari segi jaminan kesempatan setiap peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat secara terbuka dan tidak ada batasan seperti yang diungkapkan oleh Sub Koordinator P2MP BAPPEDA Jawa Tengah sebagai berikut:

Setiap peserta bisa berpendapat terbuka, tidak ada batasan. Tingkat keantusiasannya tinggi kadang-kadang bahkan minta diundang, forum prestisius provinsi makanya banyak pihak yang ikut serta walaupun waktu terbatas dan sebatas ceremonial. Untuk antusias karena waktunya forum ketemu dengan pimpinan-pimpinan kepala daerah. Ada keterbatasan komunikasi. Kami share link menginput usulan dan masih terbuka sampai nanti ada batas waktu setelah musrenbang, cuman banyak yang enggak tahu ya.

“(wawancara penelitian, 22 November 2024)”

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa peserta musrenbang dapat mengusulkan usulan tanpa ada batasan tetapi untuk waktu forum terbatas. Untuk mengatasi keterbatasan waktu tersebut BAPPEDA Jawa Tengah selaku penyelenggara kegiatan musrenbang di tingkat provinsi menyediakan link agar masyarakat bisa ikut menghimbau usulannya melalui link tersebut dan link akan dibuka sampai dengan proses musrenbang itu selesai. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui link untuk menghimpun usulan tersebut.

b. Kesempatan yang Sama

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan didapatkan informasi dari segi kesempatan yang sama bahwa setiap peserta diberikan waktu beberapa menit untuk mengajukan usulan di forum musrenbang dan ada waktu tersendiri untuk peserta melakukan negosiasi usulan dengan Dinas terkait dan BAPPEDA. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan Sub Koordinator Bidang P2MP BAPPEDA Jawa Tengah sebagai berikut:

Setiap peserta bisa mengemukakan usulan dengan waktu 3 sampai 4 menit. Iyaa karena ada forum diskusi usulan.

“(wawancara penelitian, 22 November 2024)”

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Sub Koordinator Bidang P2MP BAPPEDA Jawa Tengah selaku pengelola Musrenbang di tingkat Provinsi sebagai berikut:

Kalo waktu dibatasi iya, kalau yang disampaikan dibatasi tidak ada silahkan disampaikan disitu. Macam-macam, pertama mengusulkan dan ada yang mengawal OPD terkait merekam dengan baik dan disegariskan. Paling di LSM sama ormas, kalau masyarakat personal enggak.

“(wawancara penelitian, 22 November 2024)”

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa untuk waktu penyampaian usulan dibatasi namun tidak ada batasan usulan. Untuk usulannya sistemnya ada Organisasi Perangkat Daerah (dinas) terkait bertugas untuk merekam dan mencatat usulan apa saja yang masuk dan akan disegariskan dengan prioritas pembangunan di tahun yang bersangkutan.

c. Komunikasi

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada 5 informan, peneliti mendapatkan pemaparan tentang komunikasi dalam proses musrenbang di Kota Semarang. Peneliti menanyakan kepada 5 informan yang diawali dengan kepada LPMK kecamatan Banyumanik selaku pihak pengelola musrenbang di tingkat kecamatan sebagai berikut:

Kalo pendidikan kita punya musrenbang tematik khusus pendidikan. Ada musrenbang kebudayaan anak dan pemberdayaan perempuan. Ada sub kepala musrenbang sendiri nanti hasilnya disampaikan ke musrenbang besar. Kalau dari masyarakat cara mereka mengawal usulan tersebut agar terealisasi. Kita ada sistem yang dilihat diakomodir berjenjang nanti kita sampaikan ke masyarakat. dulu sistemnya bisa dilihat.

“(wawancara penelitian, 26 November 2024)”

Hal ini juga sesuai dengan pendapat Bappeda Kota Semarang Sub Koordinator Bidang Pembangunan sebagai berikut:

Tidak ada batasan tetapi biasanya kalau waktunya cukup ya dalam tanya jawab setiap peserta menyampaikan sebentar 2 sampai 3 menit nanti jawabannya terserah sama Dinas. Biasanya dinas sama yang lain akan menampung pertanyaan terlebih dahulu. Secara durasi dialog sekitar 1-1.5 jam kalo yang lain-lain pemaparan batasi.

“(wawancara penelitian, 13 November 2024)”

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Ketua Karang Taruna Kecamatan Banyumanik selaku pihak perwakilan masyarakat yang berpendapat sebagai berikut:

Diberikan waktu tepatnya kurang tahu, kita bisa memberikan usulan itu bisa sampai clear di pramusrenbang itu lebih panjang waktunya negosiasi dan lain-lain. Kalau bicara musrenbang sudah tidak ada usulan itu hanya pembacaan usulan dan prioritas dari semua kelurahan dan pengesahan akan dibawa bappeda. Dalam pra musrenbang kita diberikan waktu panjang negosiasi, urgensi usulan, apakah harus biayai dana musrenbang atau didanai oleh OPD langsung dan sumber dana lainnya. Karena memang ada plot khusus untuk karang taruna.

Sebetulnya LPMK punya bidang kepemudaan dan olahraga, tetapi persepsi saya tentang hal itu tidak berjalan maksimal karena mungkin irisan karang taruna. LPMK urusannya pembangunan pembangunan jadi bidang-bidang kepemudaan tidak efektif di kelurahan Kalau karang taruna

biasanya hanya diundang sebagai peserta untuk melengkapi daftar peserta yang memang menjadi syarat musrenbang.”(wawancara penelitian, 22 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan didapatkan informasi dari komunikasi bahwa setiap peserta diberikan waktu beberapa menit untuk mengajukan usulan di forum musrenbang dan ada waktu tersendiri untuk peserta melakukan negosiasi usulan dengan Dinas terkait dan BAPPEDA yaitu ada sistem tersendiri ketika proses musrenbang. Ada tahapan tersendiri hasil musrenbang disampaikan. Biasanya dalam musrenbang hanya menyampaikan usulan dan negosiasi, urgensi usulan disampaikan ketika masih tahap pra musrenbang. Dalam musrenbang biasa dinas akan menampung pertanyaan dan durasi dialog peserta 1 sampai 1,5 jam.

Gambar 3.1 Rapat Koordinasi LPMK dengan Camat Semarang Utara



Sumber : semarangkota.go.id

LPMK menghadiri rapat koordinasi pascahasil Kecamatan Musembang yang dilaksanakan di aula camat Semarang Utara pada Kamis, 18 Maret 2021 bersama Camat Semarang Utara. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Utama, Direktur Pembangunan, Forum LPMK Kabupaten Semarang, dan Ketua LPMK Kecamatan. Rapat dipimpin oleh Bupati Semarang Utara.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, komunikasi dalam musrenbang dapat disimpulkan bahwa setiap peserta diberikan waktu beberapa menit untuk mengajukan usulan di forum musrenbang dan ada waktu tersendiri untuk peserta melakukan negosiasi usulan dengan Dinas terkait dan BAPPEDA yaitu ada sistem tersendiri ketika proses musrenbang. Ada tahapan tersendiri hasil musrenbang disampaikan. Dalam musrenbang biasa dinas akan menampung pertanyaan dan durasi dialog peserta 1 sampai 1,5 jam.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, diskusi dalam musrenbang dapat disimpulkan bahwa penyampaian usulan dibatasi namun tidak ada batasan usulan. Untuk setiap peserta diberikan waktu beberapa menit untuk mengajukan usulan di forum musrenbang dan ada waktu tersendiri untuk peserta melakukan negosiasi usulan dengan Dinas terkait dan BAPPEDA. Dalam musrenbang biasa dinas akan menampung pertanyaan dan durasi dialog peserta 1 sampai 1,5 jam. Ada tahapan tersendiri hasil musrenbang disampaikan. Ada Organisasi Perangkat Daerah (dinas) terkait bertugas untuk merekam dan mencatat

usulan apa saja yang masuk dan akan disegarisikan dengan prioritas pembangunan di tahun yang bersangkutan. BAPPEDA Jawa Tengah selaku penyelenggara kegiatan musrenbang di tingkat provinsi menyediakan link agar masyarakat bisa ikut menghimbau usulannya. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui link untuk menghimpun usulan tersebut.

2. Sumber daya

a. Sarana Komunikasi

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada 3 informan, peneliti mendapatkan pemaparan tentang sumber daya yaitu sarana komunikasi dalam proses musrenbang di Kota Semarang. Peneliti menanyakan kepada 3 informan yang diawali dengan Kasi Pembangunan Kecamatan Banyumanik Jawa tengah sebagai berikut:

Tidak ada batasan usulan dari para peserta, tetapi para peserta diberikan batasan waktu. Setelah pramusrenbang baru melaksanakan musrenbang. Di dalam proses musrenbang, rembug di RW nanti tingkat kelurahan musrenbang itu ada 2 yaitu musrenbang berupa fisik yang jadi objek dal yaitu infrastruktur dan nonfisik biasanya kegiatan pemberdayaan itu dari masalah kita mengurus stunting, anak, pemberdayaan ibu-ibu, bank sampah.
“(wawancara penelitian, 19 November 2024)”

Pendapat tersebut sesuai dengan BAPPEDA Kota Semarang selaku pihak penyelenggara Musrenbang di tingkat Kota Semarang sebagai berikut.

Kalau musrenbang kecamatan sebenarnya narasumbernya dari walikota hadir dan tim kota dari OPD koordinasi oleh BAPPEDA. Kalau musrenbang kota dari provinsi yang harus menyampaikan kebijakan pusat itu apa gitu dan walikota. Iyaa. Kan musrenbang berjenjang ada musrenbang RT, RW, Kota, dan kecamatan. Informasi lewat perangkat kelurahan. ini yang kita kembangkan ke depan kita pengen. Kita akan ada develop sistem dibantu oleh World Bank, sistem yang bisa menginformasikan kepada masyarakat apa yang ada di wilayah mereka sehingga mereka bisa tahu kita harus usul apa, kalau itu masih proses. “(wawancara penelitian, 13 November 2024)”

Selain, peneliti juga mengajukan pertanyaan yang sama kepada LPMK selaku pihak penyelenggara Musrenbang di tingkat Kecamatan sebagai berikut.

Di tingkat Rw Rt berembug misalkan ada yang iya ada yang enggak Rw ke kelurahan berubah lagi 1 Rt dapat jadi tidak. Namun kalau itu jalan kota kita minta punya Dinas PU , lampu dan pengaman badan jalan ke Dishub, karang taruna butuh tempat olahraga minta ke dinas Olahraga. Musrenbang itu semua hal. Dari desa terus ke kelurahan mencari yang prioritas mana masuk ke musrenbang terus yang tidak bisa tercover nanti masuk ke kecamatan. Nanti kita lihat kata prioritas melihat kemampuan artinya. Tiap kelurahan lebih dari 8 RW harusnya setiap kali menentukan titik untuk masuk usulan musrenbang itu memenuhi beberapa aspek artinya itu urgen harus tuntas. “(wawancara penelitian, 26 November 2024)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan didapatkan informasi dari sarana komunikasi dapat disimpulkan bahwa Musrenbang berjenjang dari Rt sampai Kota. Tiap kelurahan lebih dari 8 RW harusnya setiap kali menentukan titik untuk masuk usulan musrenbang itu memenuhi beberapa aspek artinya itu urgen harus

tuntas. Dalam musrenbang usulan terbagi menjadi fisik dan non fisik. Untuk informasi disampaikan melalui perwakilan masyarakat dan ketika dalam musrenbang usulan tersebut diteruskan ke dinas terkait dalam musrenbang kecamatan. Dari desa terus ke kelurahan mencari yang prioritas mana masuk ke musrenbang terus yang tidak bisa tercover nanti masuk ke kecamatan. Nanti kita lihat kata prioritas melihat kemampuan. Fasilitator ditunjuk dari Bappeda agar pesan yang disampaikan sesuai dengan prioritas dan tema pembangunan.

Dikutip dari Dokumen Bappeda Jawa Tengah 2021 yang menyatakan bahwa narasumber dalam musrenbang terdiri dari

- a. Gubernur Jawa Tengah;
- b. Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, Kemenko Bidang Perekonomian, dengan tema “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah”;
- c. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, dengan tema “Pokok-Pokok Pikiran Rancangan Awal RKP Tahun 2021”;
- d. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, dengan tema “Pokok-Pokok Pikiran Pembangunan”.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi maka dapat disimpulkan bahwa narasumber dan fasilitator di tunjuk dari

Bappeda , namun untuk peserta ditunjuk dari perwakilan masyarakat, komunitas, ormas, LSM.

b. Informasi Tidak Terbatas

Pemaparan tentang sumber daya yaitu informasi tidak terbatas, peneliti melakukan komunikasi dengan 3 informan diawali dengan Kasi pembangunan Kecamatan Banyumanik yang menyatakan bahwa

Pemaparan materi saat musrenbang dan buku panduan. Dari pemerintah tidak pernah, hanya mereka memberikan panduan, 1 kegiatan berapa juta anggarannya. Prioritas ke berapa, misal ada daerah yang jalan dan salurannya bagus berarti untuk kegiatan infrastruktur naik level untuk taman Rt Rw, penghijauan. Yang penting jalan dan saluran sudah bagus. (wawancara penelitian, 19 November 2024) .

Hal tersebut sejalan dengan pendapat LPMK Kecamatan Banyumanik selaku pihak pengelola musrenbang di tingkat kecamatan yang berpendapat bahwa:

Materi diberikan saat pembagian undangan peserta yang sudah di plot-plot per perwakilan masyarakat, komunitas, LSM, kelompok-kelompok lain. Yang dibagikan bisa berupa Rancangan awal RKPD terdapat tema dan program prioritas pembangunan. Bahkan ada sampai buku ke-3 (wawancara penelitian, 26 November 2024)

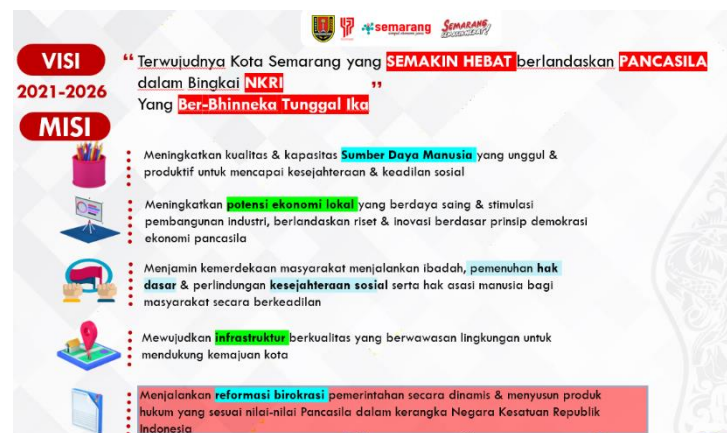
Hal tersebut sejalan dengan pendapat kepada Ketua Karang Taruna Kecamatan Banyumanik dengan jawaban sebagai berikut:

Misalnya di RKPSD terdapat tema pemantapan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Materinya dibagikan, kalau musrenbang dalam konteks karang taruna musrenbang sebetulnya tahapan perencanaan pembangunan yaitu musyawarah.

(wawancara penelitian, 22 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 informan maka dapat disimpulkan bahwa Peserta diberikan buku panduan tema pembangunan dan program prioritas pembangunan. Pemerintah membagi anggaran ke dalam beberapa plot. Saat musrenbang dipaparkan prioritas ke berapa dan proses negosiasi.

Gambar 3.2 Materi Musrenbang



Sumber : Bappeda Jawa Tengah

c. Tujuan

Untuk mendeskripsikan tujuan dari sumber daya dalam proses musrenbang di Kota Semarang, peneliti melakukan wawancara dengan 4 informan yang diawali dengan Sub Koordinator Bidang P2MP BAPPEDA Jawa Tengah yang menyatakan bahwa :

Kalau musrenbang Kota musrenbang ditunjuk dari kecamatan, salah satu menyepakati siapa yang akan dikirim ke kota untuk memperjuangkan usulan-usulan di kota, di Kecamatan ada delegasi dari kelurahan ditunjuk untuk

mengawal jadi berjenjang dari bawah. “wawancara penelitian, 22 November 2024)”

Peneliti juga mengajukan pertanyaan tersebut kepada Kasi Pembangunan Kecamatan Banyumanik selaku pengelola kegiatan musrenbang di kecamatan yang berpendapat sebagai berikut:

Kalo mencapai tujuan iyaa. Kami belum pernah mengukur, paling kalau sudah jadi dokumen perencanaan ada monitoring dan evaluasi. Bisa, tujuan musrenbang direalisasikan secara bertahap. (wawancara penelitian, 19 November 2024)

Selain itu, peneliti mengajukan pertanyaan tersebut kepada Ketua Karang Taruna Kecamatan banyumanik selaku wakil dari masyarakat

Saya rasa masyarakat umum diluar struktural tidak ada pandangan spesifik kecuali tokoh masyarakat atau memiliki wewenang menyampaikan aspirasi seperti ketua Rt atau lembaga lain. Masyarakat nurut aja toh sudah ada yang memikirkan misal wilayah ini sudah ada. (wawancara penelitian, 22 November 2024)

Berdasarkan wawancara dengan keempat informan seperti yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari musrenbang infrastruktur jalan di Kota Semarang yaitu tujuan musrenbang direalisasikan secara bertahap dengan harapan semua usulan ditangani dan dilaksanakan. Berdasarkan kutipan dari dokumen kecamatan Banyumanik : Ada delegasi dari kelurahan ditunjuk untuk mengawal jadi berjenjang dari bawah Musrenbang Kota musrenbang ditunjuk dari kecamatan, salah satu menyepakati

siapa yang akan dikirim ke kota untuk memperjuangkan usulan-usulan di kota.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa tujuan musrenbang yaitu tujuan musrenbang direalisasikan secara bertahap dengan harapan semua usulan ditangani dan dilaksanakan. Ada delegasi yang ditunjuk mengawal usulan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa sumber daya dalam musrenbang yaitu tujuan musrenbang direalisasikan secara bertahap dengan harapan semua usulan ditangani dan dilaksanakan. Peserta diberikan buku panduan tema pembangunan dan program prioritas pembangunan. Pemerintah membagi anggaran ke dalam beberapa plot. Narasumber dan fasilitator di tunjuk dari Bappeda, namun untuk peserta ditunjuk dari perwakilan masyarakat, komunitas, ormas, LSM.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, prinsip deliberasi dalam musrenbang dapat disimpulkan bahwa penyampaian usulan dibatasi namun tidak ada batasan usulan. Untuk setiap peserta diberikan waktu beberapa menit untuk mengajukan usulan di forum musrenbang dan ada waktu tersendiri untuk peserta melakukan negosiasi usulan dengan Dinas terkait dan BAPPEDA. Dalam musrenbang biasa dinas akan menampung pertanyaan dan durasi dialog peserta 1 sampai 1,5 jam. Ada dinas terkait bertugas untuk merekam dan mencatat usulan apa saja

yang masuk dan akan disegarisikan dengan prioritas pembangunan di tahun yang bersangkutan. BAPPEDA Jawa Tengah selaku penyelenggara kegiatan musrenbang di tingkat provinsi menyediakan link agar masyarakat bisa ikut menghimbau usulannya. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui link untuk menghimpun usulan tersebut. Tujuan musrenbang direalisasikan secara bertahap dengan harapan semua usulan ditangani dan dilaksanakan. Peserta diberikan buku panduan tema pembangunan dan program prioritas pembangunan. Pemerintah membagi anggaran ke dalam beberapa plot. Narasumber dan fasilitator di tunjuk dari Bappeda, namun untuk peserta ditunjuk dari perwakilan masyarakat, komunitas, ormas, LSM.

3.2.1.2. Prinsip Reasonableness Dalam Musrenbang Infrastruktur Jalan di Kota Semarang

Prinsip Reasonableness merupakan prinsip yang terkait dengan pertimbangan bersama dan kesediaan untuk memahami pihak lain.

1. Kepatuhan
 - a. Konformitas

Peneliti mendapatkan pemaparan tentang kepatuhan yaitu konformitas dalam proses musrenbang infrastruktur jalan di Kota Semarang dari 5 informan yang diawali oleh pendapat Subordinator P2MP selaku pengelola musrenbang di provinsi sebagai berikut

Ada anak sekolah yang ditanyakan kamu paham dengan apa yang disampaikan? Enggak, wajar mereka masih level kecil, mungkin dia paham, karena levelnya kebijakan kadang-kadang tidak dengan cepat dipahami kecuali orang yang terbiasa di pemerintahan. Untuk hasil musrenbang dishare dalam bentuk Rancangan awal RKPD dan RKPD. “(wawancara penelitian, 22 November 2024)”

Hal tersebut sejalan dengan pendapat kepada BAPPEDA Kota Semarang selaku pihak penyelenggara Musrenbang di tingkat Kota Semarang sebagai berikut.

Itu sudah berkembang Lalu kemudian kita develop berdasarkan kebutuhan data kita. Kita kan butuh analisis data ini maka proses ini maka kita tambahkan, Pada saat itu e-planning nya kita perencanaan kita susun berdasarkan fitur-fitur tapi memang dalam perkembangannya banyak fitur-fitur yang adaptif terhadap situasi dan kondisinya. “(wawancara penelitian, 13 November 2024)”

Hal tersebut sejalan dengan pendapat kepada Kasi Pembangunan Kecamatan Banyumanik sebagai berikut.

Hasil musrenbang tidak dibagikan di media sosial untuk mencegah penggunaan informasi dari pihak yang tidak diinginkan Sudah dipetakan dari pemerintah kota semarang, alokasi untuk anggaran fisik, non fisik sudah ada patron-patronya, setiap kelurahan juga sudah dapat alokasi anggaran.

(wawancara, 19 November 2024)

Hal tersebut sejalan dengan pendapat kepada Karang Taruna Kecamatan Banyumanik selaku pihak wakil masyarakat dalam Musrenbang di tingkat Kecamatan sebagai berikut:

Pra musrenbang harusnya dilaksanakan di November sampai desember karena januari sudah musrenbang. Di kelurahan desember januari. Musrenbang february maret sudah pengesahan di kecamatan. (wawancara penelitian, 22 November 2024)

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara dengan beberapa informan yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa Untuk hasil musrenbang dishare dalam bentuk Rancangan awal RKPD dan RKPD, tetapi untuk rinciannya tidak di share untuk mencegah penggunaan informasi dari pihak yang tidak diinginkan, Anggaran yang akan digunakan dari pemerintah kota semarang, alokasi untuk anggaran fisik, non fisik sudah ada patron-patronya, setiap kelurahan juga sudah dapat alokasi anggaran. Pra musrenbang harusnya dilaksanakan di November sampai desember karena januari sudah musrenbang. Di kelurahan desember januari. Musrenbang februari maret sudah pengesahan di kecamatan.

Gambar 3.3 Konsultasi Publik Ranwal RKPD Kota Semarang 2024



Sumber Youtube Pemerintah Kota Semarang

Konsultasi Publik dihadiri oleh 362 orang yang terdiri dari Perangkat daerah pemerintahan, dewan pakor, staf khusus walikota, instansi

vertikal, BUMD, akademika, Camat, Lurah, Ormas, LSM, tokoh masyarakat, organisasi wanita dan Bappeda Kota Semarang. Dengan arah pembangunan peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dengan sdm yang berdaya saing dan berkarakter

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Untuk hasil musrenbang dishare dalam bentuk Rancangan awal RKPD dan RKPD, tetapi untuk rinciannya tidak di share untuk mencegah penggunaan informasi dari pihak yang tidak diinginkan, Anggaran yang akan digunakan dari pemerintah kota semarang, alokasi untuk anggaran fisik, non fisik sudah ada patron-patronya, setiap kelurahan juga sudah dapat alokasi anggaran

b. Ketaatan

Wawancara yang telah dilakukan kepada 3 informan, peneliti mendapatkan pemaparan tentang ketaatan dalam proses musrenbang di Kota Semarang. Peneliti menanyakan kepada 3 informan yang diawali dengan sub koordinator Bidang Infrastruktur dan kewilayahan BAPPEDA Kota Semarang selaku pihak penyelenggara Musrenbang di tingkat Kota Semarang sebagai berikut.

Tidak ada hanya sekedar tata tertib. Selain itu, merujuk ke dana desa 1 milyar itu akhirnya kita siapkan slot anggaran 300-500 juta per kelurahan silahkan didiskusikan apa usulan kelurahan yang mau direalisasikan apa```` ``?

Sampai sekarang 1 kelurahan 1 milyar. Jadi mereka punya keuangan sendiri yang mereka diskusikan. Mereka jadi aktif dan partisipasi tinggi. “(wawancara penelitian, 22 November 2024)”

Hal tersebut sejalan dengan pendapat kepada LPMK selaku pihak penyelenggara Musrenbang di tingkat Kecamatan sebagai berikut.

Aturan khusus terkait tata tertib persidangan ya, keterwakilan penyampaian aspirasi ya sehingga istilahnya semua berjalan dengan koridor diskusi yang inklusif, hasil kesepakatan diperoleh dari kesepakatan, kelegowoan dan semua nya pesertanya hadir.

(wawancara penelitian, 26 November 2024)

Berdasarkan informasi dari ke 3 informan yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Plot anggaran sudah dibagi per kelurahan untuk mereka diskusikan Aturan khusus terkait tata tertib persidangan Hasil kesepakatan diperoleh dari kesepakatan, kelegowoan peserta.

c. Penerimaan

Wawancara yang telah dilakukan kepada 3 informan, peneliti mendapatkan pemaparan tentang penerimaan dalam proses musrenbang di Kota Semarang. Peneliti menanyakan kepada 3 informan yang diawali dengan Subordinator P2MP Bappeda Jawa tengah sebagai berikut:

Kemudian dari tahun 2020 dari KEMENDAGRI itu muncul keputusan mewajibkan daerah menggunakan sistem dari pusat contoh nya e-planning. Ancamannya kalo pembuatan sistem sendiri berpotensi korupsi atau pemborosan anggaran karena sudah ada surat dari pusat. Yaudah sistem

sebelumnya kita matikan lalu kita pakai SIPD. Dalam pengembangannya karena SIMPERDA itu kan justru berdasarkan kebutuhan BAPPEDA Kota Semarang ya, tahu detail masalahnya apa diseragamkan mulai dari Papua sampai Aceh tapi volumenya masih beda-beda, untuk daerah pelosok mereka banyak untungnya. Kita sudah punya advanced sendiri jadi tidak ada di SIPD. SIPD yang pakai seluruh Indonesia jadinya lemot. Sampai saat ini masih sering lemot. Kemudian ada troubleshooting, pemerintah sulit untuk meminta solusi. Walaupun sudah ada des dll nya tapi yang bersangkutan harus memahami semua Kabupaten/Kota. Kemudian ya mau ngga mau kita pakai sistem SIPD itu. “(wawancara penelitian, 22 November 2024)”

Hal tersebut sejalan dengan pendapat kepada Kasi Pembangunan Kecamatan Banyumanik sebagai berikut.

Ada yang udah ada yang belum. Jadi kita kembali akan berusaha menyampaikan ke warga bahwa tidak semua wilayah harus dapat. Harus dihilangkan ego sektoral itu. Kalo memang Rw sebelah lebih butuh yaudah kita nggak dapat. Yang penting Rw sebelah bisa tertangani secara tuntas jangan sampai butuh saluran 200 meter terus RW yang satu tidak butuh tapi harus minta jatah akhirnya saluran dibangun tidak selesai 200 meter, ini bagus tapi kesana buntu lagi. (wawancara penelitian, 19 November 2024)

Hal tersebut sejalan dengan pendapat kepada LPMK sebagai berikut.

Ya to, tantangannya harapan seluruh usulan bisa diimplementasikan dengan baik tetapi keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua usulan bisa tertangani dengan baik sehingga istilahnya mau tidak mau harus diskusi membuat skala prioritas dari OPD yang akan menentukan penganggaran lahnya berkelahi, ini forum musyawarah. (wawancara penelitian, 26 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat disimpulkan bahwa ada yang udah ada yang belum. Yang penting Rw sebelah bisa tertangani secara tuntas jangan sampai butuh

saluran 200 meter terus RW yang satu tidak butuh tapi harus minta jatah akhirnya saluran dibangun tidak selesai 200 meter, ini bagus tapi kesana buntu lagi. tantangannya harapan seluruh usulan bisa diimplementasikan dengan baik tetapi keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua usulan bisa tertangani dengan baik karena keterbatasan anggaran. Hambatannya dari sistem kemendagri mewajibkan mengikuti pusat sinyal lemot dan transparansi belum bisa dilakukan sepenuhnya karena sistem.

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara dan observasi tentang prinsip kepatuhan dapat disimpulkan bahwa Untuk hasil musrenbang dishare dalam bentuk Rancangan awal RKPD dan RKPD, tetapi untuk rinciannya tidak di share untuk mencegah penggunaan informasi dari pihak yang tidak diinginkan, Anggaran untuk anggaran fisik, non fisik sudah ada patron-patronya, setiap kelurahan juga sudah dapat alokasi anggaran. Penanganan secara bertahap. Tantangannya harapan seluruh usulan bisa diimplementasikan dengan baik tetapi keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua usulan bisa tertangani dengan baik karena keterbatasan anggaran. Hambatannya dari sistem kemendagri mewajibkan mengikuti pusat sinyal lemot dan transparansi belum bisa dilakukan sepenuhnya karena sistem.

2. Keadilan

a. Hal individu

Peneliti melakukan wawancara kepada 4 informan untuk mengetahui tentang keadilan individu dalam musrenbang infrastruktur jalan di Kota Semarang yang diawali dengan Subordinator P2MP BAPPEDA Jawa tengah yang menyatakan bahwa

Kita dari tahun 2010an kayaknya mengembangkan sistem sendiri makanya waktu itu istilahnya SIMPERDA Sistem Perencanaan Daerah dimulai dari RPJMD, RPJM, Renstra (Perencanaan Strategis), Rencana strategis sampai evaluasinya. “(wawancara penelitian, 22 November 2024).

Hal tersebut sejalan dengan pendapat kepada Kasi Pembangunan Kecamatan Banyumanik sebagai berikut.

Peserta berpendapat berbeda tergantung apa yang diusulkan dari masyarakat, permasalahan dan karakteristik daerah. Teknis musrenbang kita hanya merencanakan dan pengerjaanya tahun depan. Masih sangat dimungkinkan usulan untuk tahun depan jalan ternyata ada bencana longsor maka pasti langsung diperbaiki sangat dimungkinkan kita ganti usulan. (wawancara penelitian, 19 November 2024)

Hal tersebut sejalan dengan pendapat kepada LPMK selaku pihak penyelenggara Musrenbang di tingkat Kecamatan sebagai berikut.

Biasanya dia akan menunjukkan terkait dengan aspek yang membahayakan atau dampak resiko misalkan ada saluran yang istilahnya ada masalah setiap jam ada banjir detail luasannya sekian, genangan sekian dan sebagainya. Kemudian setiap kelurahan akan menampilkan 2 sampai 3 prioritas yang akan di usulkan di tingkat kelurahan, kemudian otomatis akan bersaing dengan kelurahan lain,

dari dinas yang akan menyusun mana yang masuk skala prioritas, mengusulkan prioritas di setiap kelurahan. (wawancara penelitian, 26 November 2024)

Hal tersebut sejalan dengan pendapat kepada Ketua Karang Taruna Kecamatan Banyumanik sebagai berikut.

Kalau sampai level kecamatan dia sudah selesai pada level kelurahan ada pra musrenbang kelurahan, itupun ada musrenbang RT RW terus ke kelurahan ada 2 kali musyawarah sebelum di musrenbang kelurahan, setelah itu di kecamatan (wawancara penelitian, 22 November 2024)

Berdasarkan wawancara peneliti kepada 4 informan maka dapat disimpulkan bahwa setiap peserta bisa mengemukakan pendapat dan ada OPD terkait yang mencatat serta memasukkan ke dalam daftar usulan sesuai dengan bidang lalu dipilih usulan yang paling urgen dan sesuai dengan prioritas pembangunan. Peserta berpendapat berbeda tergantung apa yang diusulkan dari masyarakat, permasalahan dan karakteristik daerah.

b. Peluang yang sama

Untuk mengetahui peluang dalam proses musrenbang infrastruktur jalan di Kota Semarang peneliti melakukan wawancara dengan 3 informan yang diawali dengan informan Sub Koordinator Bidang P2MP BAPPEDA Jawa Tengah dengan pendapat sebagai berikut:

Ada karena sebelum musrenbang dilakukan disebarkan undangan dan buku sampai buku ke 3. Iyaa, tapi selama ini website yang kami sediakan atau link masih belum banyak yang mengakses (wawancara penelitian, 22 November 2024)”

Hal tersebut sejalan dengan pendapat kepada Ketua Karang Taruna Kecamatan Banyumanik dengan jawaban sebagai berikut:

Musrenbang memang anggarannya khusus untuk musrenbang, tetapi ada anggaran yang melekat pada OPD dan kita mencari kreativitas anggaran-anggaran yang lain seperti kerjasama dengan perusahaan entah itu CSR dan lainnya juga bisa dilakukan. Sejauh ini, karang taruna tidak terlibat secara langsung pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur dari musrenbang itu tidak pernah, kalau mengusulkan pun itu bukan kapasitas kita. Mereka lebih fleksibel jika usulan tidak diterima kami enggak masalah, jika dimasukkan kami sangat terima kasih (wawancara penelitian, 22 November 2024)

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa peserta berhak menyampaikan pendapat secara terbuka, anggaran musrenbang ada untuk musrenbang dan di OPD, tetapi kapasitas organisasi terbatas sesuai kewenangan masing-masing

c. Ruang Publik

Peneliti melakukan wawancara untuk mendeskripsikan ruang publik dalam proses musrenbang infrastruktur di Kota Semarang yang diawali dengan Subordinator P2MP BAPPEDA Jawa Tengah sebagai berikut:

Hasilnya itu jelas kami share secara transparan karena produk setelah usulan dikelola itu menjadi dokumen perencanaan selalu kami publish menjadi JDIHnya provinsi, hukum, dan website kami, sampai dengan buku ke 3. Masyarakat bisa melihat program perangkat daerah disitu sudah ada usulan saya belum si. Kalau enggak ada siapa tahu masuk kewenangan pusat.

(wawancara penelitian, 22 November 2024)

Hal tersebut sejalan dengan pendapat kepada Sub Koordinator Bidang Infrastruktur jalan BAPPEDA Kota Semarang dengan jawaban sebagai berikut:

Rembug Rt Rw direkap di pra musrenbang dulu, untuk mencicil diskusi . Nanti musrenbang tinggal penyampaian point-point pentingnya. Pra musrenbang 4-5 jam biasanya di minggu siang atau di siang sampai jam 2-jam 4. Forum musrenbang lebih banyak ke sosialisasi program-program dari pemkot dan penyepakatan hasil akhir pra musrenbang (draftnya sudah disiapkan di pramusrenbangnya. Nanti pas musrenbang tinggal penyepakatan dan tanya jawab dan problem-problem di wilayah. Penyepakatan penuntutan di musrenbang. serunya diskusinya disitu. Dari BAPPEDA ada inovasi terbaru terkait bagaimana cara musrenbang agar optimal yaitu dibentuk New Rembang masih belum selesai “(wawancara penelitian, 22 November 2024)”

Hal tersebut sejalan dengan pendapat kepada Kasi Pembangunan Kecamatan Banyumanik yang berpendapat sebagai berikut:

Ini diluar kalo setelah dari kelurahan itu masuk ke kecamatan ada pra musrenbang. Pra musrenbang kita berdiskusi kita memastikan bahwa usulan di kelurahan benar-benar prioritas terus adakah wilayah yang belum tersentuh kelurahan nanti larinya kesana. Nanti ditutup sama kecamatan biar tuntas.

(wawancara penelitian, 19 November 2024)

Hal tersebut sejalan dengan pendapat kepada Ketua LPMK Kecamatan Banyumanik

Masyarakat kan berjenjang RT disampaikan ke RW ke kelurahan diputuskan sektor pembangunan di kota semarang namanya ada sistem informasinya jadi memasukkan di entry kelurahan akan terekap di kecamatan akan di rekap di kota.

(wawancara penelitian, 26 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa setelah dari kelurahan itu masuk ke kecamatan ada pra musrenbang. Rembug Rt Rw direkap di pra musrenbang dulu, untuk menyicil diskusi Nanti musrenbang tinggal penyampaian point-point pentingnya. Hasil musrenbang di share secara transparan karena setelah usulan dikelola itu menjadi dokumen perencanaan dan di publish menjadi JDIHnya provinsi , hukum ,dan website.

Gambar 3.4 Rembug Warga Kelurahan Sekayu



Sumber : sekayu.semarangkota.go.id

Dikutip dari laman resmi Kelurahan Sekayu Forum penyuluhan lingkungan hidup tingkat RW yang mengidentifikasi, menggali dan menyepakati potensi wilayah RT/RW baik berupa infrastruktur, potensi sosial, budaya, dan ekonomi, serta faktor-faktor yang mendorong keberhasilan pembangunan, memutuskan mana yang akan dipilih mendorong. Musrenbang Kelurahan akan dibahas pada tahap sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi maka dapat disimpulkan ruang publik dalam musrenbang yaitu Forum musrenbang dimulai dari tingkat Rt Rt (rembug warga) berjenjang

sampai tingkat atas yaitu Musrenbang Kota. Hasil musrenbang di share secara transparan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan dalam musrenbang yaitu peserta berhak menyampaikan pendapat secara terbuka, anggaran musrenbang ada untuk musrenbang dan di OPD, tetapi kapasitas organisasi terbatas sesuai kewenangan masing-masing. Forum musrenbang dimulai dari tingkat Rt Rt (rembug warga) berjenjang sampai tingkat atas yaitu Musrenbang Kota. Hasil musrenbang di share secara transparan. OPD terkait yang mencatat serta memasukkan ke dalam daftar usulan sesuai dengan bidang lalu dipilih usulan yang paling urgen dan sesuai dengan prioritas pembangunan. Peserta berpendapat berbeda tergantung apa yang diusulkan dari masyarakat, permasalahan dan karakteristik daerah.

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara dan observasi tentang prinsip reasonableness dapat disimpulkan bahwa Untuk hasil musrenbang dishare dalam bentuk Rancangan awal RKPD dan RKPD, tetapi untuk rinciannya tidak di share. Anggaran sudah ada patron-patronya, setiap kelurahan dapat alokasi anggaran. Penanganan secara bertahap. peserta berhak menyampaikan pendapat secara terbuka, anggaran musrenbang ada untuk musrenbang dan di OPD, tetapi kapasitas organisasi terbatas sesuai kewenangan masing-masing. Forum musrenbang dimulai dari tingkat Rt Rt (rembug warga) berjenjang sampai tingkat atas yaitu

Musrenbang Kota. Hasil Tantangannya keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua usulan dan sistem kemendagri mewajibkan mengikuti pusat sinyal lemot dan transparansi belum bisa dilakukan sepenuhnya karena sistem.

3.2.1.3 Prinsip Kebebasan Dalam Musrenbang Infrastruktur Jalan di Kota

Semarang

Prinsip kebebasan adalah peluang dan kebebasan yang sama dalam menyampaikan gagasan dan pendapat.

1. Komunikasi

a Ketenangan komunikasi

Penelitian memilih melakukan wawancara dengan 4 informan untuk mengetahui tentang ketenangan komunikasi dalam musrenbang infrastruktur jalan di Kota Semarang yang diawali dengan pendapat Sub Koordinator Bidang Perencanaan Infrastruktur sebagai berikut:

Tidak ada. Semakin baik, tapi ya masih ada kritikan karena belum terealisasi. Perencanaan mulai dari kelurahan, RT RW, sistem musrenbang bagian SIMPERDA yang tidak saya matikan yaitu proses mulai dari bawah yang harus kami tampung dari SIPD, masih mengembangkan itu. Meskipun nanti hasil akhirnya diinput di SIPD. Prosesnya di sistem kita dan direkam di SIPD.

“(wawancara penelitian, 13 November 2024)”

Hal tersebut sejalan dengan pendapat kepada Kasi Pembangunan Kecamatan Banyumanik sebagai berikut :

Bank sampah biasanya minta dibikinkan mesin komposter, mesin press, itu nanti. Dari usulan warga di salurkan ke Dinas terkait.

Jadi dinas yang itu tidak perlu mikir karena sudah ada usulan dari masing-masing wilayah. Mereka juga skala prioritasnya.

(wawancara penelitian, 19 November 2024)

Hal tersebut sejalan dengan pendapat diajukan kepada Ketua LPMK Kecamatan Banyumanik

Lewat musrenbang, sistemnya sudah ada nanti didanai di kelurahan yang dilempar ke dinas-dinas, sistemnya sudah terorganisir. pembangunan sektor fisik, pembangunan infrastruktur. di fisik terkait jalan di non fisik terkait penanganan stunting. Fisik pembangunan jalan itu. Jadi mekanismenya setiap usulan tahun sebelumnya yang dirasa memiliki prioritas diusulkan kembali pada tahun berikutnya tetapi kalo masyarakat pasti akan menyampaikan ada notenya ini sudah diusulkan tahun sekian tapi sampai sekarang belum direalisasikan.

(wawancara penelitian, 22 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat bebas menyampaikan usulan mereka dalam musrenbang. Perencanaan mulai dari kelurahan, RT RW, sistem musrenbang bagian SIMPERDA yang tidak dimatikan yaitu proses mulai dari bawah yang harus ditampung dari SIPD, masih mengembangkan itu. Dari usulan warga di salurkan ke Dinas terkait. Jadi dinas yang itu tidak perlu mikir karena sudah ada usulan dari masing-masing wilayah.

b Membuat Usulan

Peneliti melakukan wawancara dengan 3 informan untuk mendeskripsikan proses pembuatan usulan dalam musrenbang infrastruktur jalan di Kota Semarang dengan diawali pertanyaan yang

diberikan kepada Sub Koordinator P2MP BAPPEDA Jawa tengah sebagai berikut:

Rata-rata infrastruktur paling banyak tetapi nanti kami petakan lagi karena infrastruktur ada batasan kewenangan provinsi kabupaten/kota. Ada, kami punya kanal aplikasi rembugan, masyarakat jawa tengah bisa melakukan usulan melalui aplikasi itu dan sudah disosialisasikan penting ada KTP.

“(wawancara penelitian, 22 November 2024)”

Hal ini sejalan dengan pendapat Sub Koordinator Bidang Perencanaan Infrastruktur Bappeda Kota Semarang sebagai berikut:

Paling jalan , saluran , balai Rw Balai rt. Ya, masih ke infrastruktur. Yang diusulkan kebanyakan problem yang mereka lihat depan mata mereka, kebanyakan masih tentang jalan, pasar, taman. Ya, makanya kita masih banyak ruang-ruang yang ekspansif. Satu lagi apa? Outering road. Jalan dari arah selatan Budak payung itu, dari bunderan itu belok ke kiri lewat jalan pramuka menyusuri Gunungpati, Mijen. Pemerintah Kota Semarang pengennya ada jalan ring outer. Jika mau ke Gunung pati lewat Mijen nggausah lewat kota, lewat tengah. Itu yang jadi prioritas. . Jadi tidak dibandingkan, apakah pemukiman dengan jalan sudah beda konteks, Kalau pemanfaatan ruang itu lebih mengoptimalkan kawasan strategis di kota Semarang. Masih 30 hektar kawasan kumuh. Ya dua-duanya prioritas. “wawancara penelitian, 13 November 2024)”

Hal ini sejalan dengan pendapat Kasi Pembangunan Kecamatan Banyumanik

Infrastruktur itu secara itu gedung sama jalan. Sedangkan wilayah kecamatan dan perkotaan itu diberikan memperbaiki hanya di jalan lingkungan dan dibatasi nilainya kurang dari 200 juta. Infrastruktur menjadi salah satu usulan prioritas. Infrastruktur nggak hanya jalan ada jalan, sawah, jalan bisa paving atau aspal, saluran, talud

jalan. Talud saluran yang, kalo berapanya nggak bisa menentukan tergantung wilayahnya.

(wawancara penelitian, 19 November 2024)

Gambar 3.5 Daftar Usulan Masyarakat dalam E-rembugan Jateng

☰ Daftar Usulan Masyarakat:

Show 25 entries Search:

No ↑	Nama Pengusul	Alamat Pengusul	Usulan Kegiatan	Lokasi	Detail Lokasi	SKPD	APBD Prov (Rp)
1	deni	-	test usulan 2025	KOTA SEMARANG	KELURAHAN SENDANGMULYO, TEMBALANG, klipang;	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	200.000.000
2	TEGUH PRAYITNO	DESA SIDAMULYA KECAMATAN KARANGPUCUNG KABUPATEN CILACAP KODE POS 53255	PAMSIMAS	CILACAP	DESA SIDAMULYA, KARANGPUCUNG, DUSUN CIPETIR;	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	800.000.000
3	SARJONO	Sukajaya Desa Bolang Kec. Dayeuhluhur, Kab. Cilacap	PEMBANGUNAN SALURAN AIR DI CIENGANG DESA BOLANG	CILACAP	DESA BOLANG, DAYEUHLUHUR, DUSUN SUKAJAYA RT 01 RW 04;	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	500.000.000
4	AHMAD RIFA'I,	Jl. Ki Hajar Dewantara No. 125	PENINGKATAN JALAN URIP	CILACAP	DESA NUSAWANGKAL,	Dinas Komunikasi	100.940.000

Sumber : e-planning.jatengprov.go.id

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi maka dapat disimpulkan bahwa usulan paling banyak di sektor non fisik yaitu jalan.

c Pertukaran Hak dan Kewajiban

Peneliti melakukan wawancara dengan 2 informan untuk mendeskripsikan pertukaran hak dan kewajiban dalam musrenbang infrastruktur jalan di Kota Semarang dengan diawali pertanyaan yang diberikan kepada Ketua Karang Taruna kecamatan Banyumanik

Kalau dari aturan metode musrenbang sejauh ini sudah menjadi kesepakatan semua peserta dan memang metodenya seperti itu. Peraturan yang menjalankan musrenbang ya sama-sama saja dan tergantung format pelaksanaan dan yang bisa merubah kewenangan Camat kali ya (wawancara penelitian, 22 November 2024)

Berdasarkan wawancara yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada aturan dan tata cara dalam penyelenggaraan musrenbang. Masyarakat umum bisa mengisi link e-rembugan untuk menghimpun usulan atau melalui perwakilan kelurahan. Paling banyak usulan adalah jalan dan ada batasan kewenangan jalan.

Gambar 3.6 Website E-Rembugan Jawa tengah



Sumber : e-planning.jatengprov.go.id

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat dapat mengusulkan secara personal melalui e-rembugan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi maka disimpulkan bahwa media masyarakat yaitu bebas menyampaikan usulan mereka dalam musrenbang. Perencanaan mulai dari kelurahan di salurkan ke Dinas terkait. Usulan dari masing-masing wilayah. Usulan paling banyak di sektor non fisik yaitu jalan. masyarakat dapat mengusulkan secara personal melalui e-rembugan.

2. Media Masyarakat

a. Media Presentasi Masyarakat

Peneliti melakukan wawancara kepada 5 informan untuk mendeskripsikan media presentasi masyarakat dalam musrenbang infrastruktur jalan di Kota Semarang yang akan diawali dengan pendapat dari Sub Koordinator P2MP BAPPEDA Jawa tengah

Dalam musrenbang disiarkan di youtube. Ada, Penyelenggaraan diupayakan substansinya jadi lebih kaya misalnya ada kolaborasi hal-hal baru yang diisi, cuman sempat ada covid yang tadinya full offline habis itu online, hybrid. Sekarang masih hybrid walaupun offline sudah dibuka lebih luas lagi. Lebih enakan offline, tetapi masih online karena keterbatasan tempat, lebih menjangkau banyak pihak online, misal ada paguyuban jawa tengah di Jakarta. “(wawancara penelitian, 22 November 2024)”

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sub Koordinator Bidang Infrastruktur BAPPEDA Kota Semarang sebagai berikut:

Live streaming itu pasti tapi ngga semua. Waktu covid live streaming. Nanti kalau sistem sudah terbangun dan bisa diakses maka masyarakat tahu problem apa yang ada di wilayah mereka. Mereka bisa menyusun sesuai dengan

yang diinginkan sesuai dengan permasalahannya. Komunikasi kita dengan masyarakat masih via perangkat kelurahan. “(wawancara penelitian, 13 November 2024)”

Hal tersebut sejalan dengan pendapat LPMK Kecamatan Banyumanik sebagai berikut:

Berita acara ditandatangani ya ada di semua tingkat sampai kota. Untuk transparansi hanya kalangan tertentu yang bisa mengakses. Offline semenjak covid berakhir. Live streaming di tingkat kecamatan tidak, di tingkat kota kadang-kadang tapi hampir setahun ini tidak ada ya musrenbang biasa saja. Ada dimasukin ke website pemerintah.

(wawancara penelitian, 26 November 2024)

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Karang Taruna Kecamatan Banyumanik sebagai berikut:

Ya, biasanya iya disiarkan secara langsung karena musrenbang di tingkat kecamatan itu dihadiri pejabat-pejabat penting di tingkat kota biasanya Walikota, Bappeda itu pasti karena Bappeda yang menjadi orang kedua yang menerjemahkan sebagai pilar atau tokoh utama. Jadi setiap musrenbang disiarkan secara live streaming. Ya, pasti ada karena memang saat ini pemerintah kota Semarang sangat gencar dalam praktik Good Governance yang salah satunya transparansi informasi. Pemkot mendorong setiap lembaga harus memiliki sosial media dan website harus aktif sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam pelaksanaan Good Governance Kecamatan dan Kota agar bisa dipantau oleh masyarakat.

(wawancara penelitian, 22 November 2024)

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam musrenbang disiarkan di youtube.

Dikutip dari Dokumen Kecamatan Banyumanik 2024 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan diupayakan substansinya

misalnya ada kolaborasi hal-hal baru yang diisi. Penyelenggaraan musrenbang hybrid. Bappeda yang menjadi orang kedua yang menerjemahkan sebagai pilar atau tokoh utama. Berita acara ditandatangani ya ada di semua tingkat sampai kota. Untuk transparansi hanya kalangan tertentu yang bisa mengakses. Untuk informasi kegiatan disampaikan melalui website resmi pemerintah

Gambar 3.7 Live Streaming Pelaksanaan Musrenbang Kota Semarang 2023



Musrenbang RKPD Kota Semarang Tahun 2023



Sumber : Youtube Bappeda Kota Semarang

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi maka disimpulkan bahwa ada media live streaming dalam setiap musrenbang Kota, namun untuk musrenbang kecamatan hanya kecamatan tertentu. Untuk transparansi hanya kalangan tertentu yang bisa mengakses.

b. Akses Informasi

Peneliti melakukan wawancara kepada 5 informan untuk mendeskripsikan akses informasi dalam musrenbang infrastruktur jalan di Kota Semarang yang akan diawali dengan pendapat dari Sub Koordinator P2MP BAPPEDA Jawa Tengah

Semua sudah terakomodir, kami tinggal pakai di gedungnya provinsi sendiri. Cenderung mudah karena levelnya provinsi. Kami sebar undangan sudah ada link materi. Peserta diberikan informasi tetapi masyarakatnya cenderung kurang peduli dalam mengawasi usulan. Peserta dipilih secara terbuka semua kalangan bisa mengikuti. Pendidikan beragam ya. Untuk narasumber diperhatikan namun peserta tidak

(wawancara penelitian, 22 November 2024)

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kasi Pembangunan Kecamatan Banyumanik

Materi musrenbang di share secara online dan offline saat pembagian undangan kepada para peserta musrenbang, pengumuman musrenbang juga dishare melalui media sosial resmi Pemerintah Kecamatan Banyumanik dan grup whatsapp.

(wawancara penelitian, 19 November 2024)

Berdasarkan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa peserta dipilih secara terbuka semua kalangan bisa mengikuti. Untuk narasumber diperhatikan namun peserta tidak.

Gambar 3.8 Pengumuman Pelaksanaan Musrenbang



Sumber : Instagram Bappeda Kota Semarang

Dikutip dari halosemarang.id Musrenbang merupakan kegiatan untuk menyusun RKPD 2024, banyak sekali tadi prioritas-prioritas, Dan nantinya akan bisa menjadi RKPD 2024 yang pastinya bisa sejalan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Semarang. Selanjutnya, tema tersebut tertuang dalam 5 prioritas pembangunan, yaitu satu: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, dua: Pengurangan Pengangguran dan Kemiskinan, tiga: Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia, empat: Penyediaan Infrastruktur, Berwawasan Lingkungan, dan Ramah Terhadap Kelompok Rentan, lima: Peningkatan Tata Kelola Pemerintah.

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi maka dapat disimpulkan bahwa musrenbang sudah diberikan apa saja yang kan

menjadi prioritas pembangunan. Penunjukan peserta kolektif melalui wakil masyarakat dan narasumber melalui Bappeda Kota Semarang selaku pihak pengelola musrenbang di tingkat kota.

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi tentang media masyarakat dalam musrenbang dapat disimpulkan bahwa musrenbang sudah diberikan apa saja yang kan menjadi prioritas pembangunan. Penunjukan peserta kolektif melalui wakil masyarakat dan narasumber melalui Bappeda Kota Semarang selaku pihak pengelola musrenbang di tingkat kota. Ada media live streaming dalam setiap musrenbang Kota, namun untuk musrenbang kecamatan hanya kecamatan tertentu.

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi tentang prinsip kebebasan dalam musrenbang dapat disimpulkan bahwa musrenbang sudah diberikan apa saja yang kan menjadi prioritas pembangunan. Penunjukan peserta kolektif melalui wakil masyarakat dan narasumber melalui Bappeda Kota Semarang. Ada media live streaming dalam setiap musrenbang Kota, namun untuk musrenbang kecamatan hanya kecamatan tertentu. Masyarakat bebas menyampaikan usulan mereka dalam musrenbang. Perencanaan mulai dari kelurahan di salurkan ke Dinas terkait. Usulan dari masing-masing wilayah. Usulan paling banyak di sektor non fisik yaitu jalan. masyarakat dapat mengusulkan secara personal melalui e-rembugan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, prinsip perencanaan deliberatif dalam musrenbang dapat disimpulkan bahwa . Tujuan musrenbang direalisasikan secara bertahap dengan harapan semua usulan ditangani dan dilaksanakan. Penyampaian usulan dibatasi beberapa menit untuk mengajukan usulan di forum musrenbang namun tidak ada batasan usulan. Ada dinas terkait bertugas merekam dan mencatat usulan apa saja yang masuk dan akan disegarisikan dengan prioritas pembangunan di tahun yang bersangkutan. BAPPEDA Jawa Tengah selaku penyelenggara kegiatan musrenbang di tingkat provinsi menyediakan link untuk menghimpun usulan. Peserta diberikan buku panduan tema pembangunan dan program prioritas pembangunan.

Narasumber dan fasilitator di tunjuk dari Bappeda, namun untuk peserta ditunjuk dari perwakilan masyarakat, komunitas, ormas, LSM. Untuk hasil musrenbang dishare dalam bentuk Rancangan awal RKPD dan RKPD, tetapi untuk rinciannya tidak di share. Penanganan secara bertahap. Forum musrenbang dimulai dari tingkat Rt Rt (rembug warga) berjenjang sampai tingkat atas yaitu Musrenbang Kota. Ada media live streaming dalam setiap musrenbang Kota, namun untuk musrenbang kecamatan hanya kecamatan tertentu. Tantangannya keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua usulan dan sistem kemendagri mewajibkan mengikuti pusat sinyal lemot dan transparansi belum bisa dilakukan sepenuhnya karena sistem. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui link untuk menghimpun usulan tersebut. Pemerintah membagi anggaran ke dalam beberapa plot. Usulan paling banyak di sektor non fisik yaitu jalan

3. 3. 2. Faktor Dalam Musrenbang Infrastruktur Jalan di Kota Semarang

3.3.2. 1. Faktor Pendorong Musrenbang Infrastruktur Jalan di Kota

Semarang

1. Kesempatan

Pengambilan Keputusan

Peneliti melakukan wawancara kepada 5 informan untuk mendeskripsikan kebutuhan pengambilan keputusan dalam musrenbang infrastruktur jalan di Kota Semarang yang akan diawali dengan pendapat dari Sub Koordinator P2MP BAPPEDA Jawa tengah

Ada proses penyaringan usulan yang dimulai dari rembug warga sampai musrenbang, kalau musrenbang hanya membacakan usulan yang sudah disepakati di tingkat bawah. Jadi coba kami memetakan di bidang-bidang apakah ini sudah ada. Cuman mungkin bahasanya berbeda dengan cara menyampaikan masyarakat. Kalau kami levelnya general, level kebijakan. Sesuai, karena ada proses pemetaan dari masing-masing OPD.

(wawancara penelitian, 22 November 2024)”

Hal tersebut sejalan dengan pendapat ditujukan Subordinator Bidang perencanaan Infrastruktur

Dari tahun 2014 itu kita mulai merencanakan skala anggaran untuk musrenbang kecamatan artinya kelurahan kita kasih anggaran kecamatan juga untuk didiskusikan kira-kira buat apa anggaran ini? Pasca itu partisipasi kita meningkat dibandingkan dulu kalau dulu usul-usul larinya ke OPD. Opd terlalu banyak urus banyak yang belum direalisasikan. Di sisi lain kita tahu bahwa OPD terbatas urusannya kota dan lewat anggaran tersebut bisa diselesaikan tim kecamatan Per tahun. Pasca SIPD kita besok mau bikin world bank agar mereka bisa melihat usulan terbuat diakomodir apa. engga, kalo nggak kenapa,

nanti kita sampaikan itu, daerah. Dulu ada di SIMPERDA, di SIPD dikurangi dipertahankan masih minimal sekali.

Tidak bisa memasukkan unsur lokalitas daerah, develop nya sulit, sistemnya tertutup, tidak bisa membagi FPA, program kegiatan apa tidak bisa. Awal-awal juga kacau dimatikan semua . Kita akhirnya menginput di SIPD dan SIMPERDA menginput kebutuhan untuk perekaman ini. Pengembangan sistem sesuai dengan pusat. Harus menjadi user aja. Dulu standar minimal nya sudah ada. 2 kali input untuk perekaman dan lainnya. (wawancara penelitian, 13 November 2024)

Hal tersebut sejalan dengan pendapat kepada Kasi pembangunan Kecamatan Banyumanik

Penanganan masih berusaha mengubah mindset Rw. Satu Rw ada beberapa Rt yang ego sektoral RT . Tahun ini ada 5 RT terus Rt 1 butuh banyak tahun ini dapat tahun depan diberikan RT lain jadi ngga meneruskan, bergantian. Materi disampaikan lewat paparan dan hardfile ngga satu-satu biasanya karang taruna 2 setiap perwakilan.

(wawancara penelitian, 19 november 2024)

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ketua Karang taruna Kecamatan Banyumanik

Berarti bisa masyarakat menganggapnya hanya infrastruktur saja. Penanganan stunting dll sangat jarang. Pimpinan nya seperti ini tapi di bawah belum dilaksanakan maka pembangunan tidak berjalan dengan baik. Lebih fokus di musrenbang, namanya musyawarah perencanaan pembangunan ya. Itu ya wilayah-wilayah mana di kelurahan yang menjadi prioritas pembangunan di tahun berjalan dan yang akan datang itu usulkan kemudian masuk APBD. Karang taruna bisanya konteks pemberdayaan diberikannya pada sektor non fisik bukan pada fisik karena yang punya kapasitas dan kewenangan salah satunya LPMK.

(wawancara penelitian, 22 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penanganan di kecamatan masih berusaha mengubah mindset masyarakat. Pemerintah kota mengalokasikan anggaran untuk kecamatan agar penanganan usulan lebih efektif dan tepat. Wilayah-wilayah mana di kelurahan yang menjadi prioritas pembangunan di tahun berjalan dan yang akan datang itu usulkan kemudian masuk APBD.

Dikutip beritamerdekeonline.com, Alokasi anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan hidup (Sarplus) di tingkat kecamatan diperkirakan minimal Rp 200 juta dan untuk pemberdayaan perempuan dan anak Rp 50 juta. Anggaran kecamatan sebesar Rp 1 miliar, dimana Rp 50 juta akan dialokasikan untuk pemberdayaan perempuan dan anak, dan paling sedikit Rp 200 juta akan digunakan untuk kegiatan pemeliharaan infrastruktur lingkungan dan anggaran lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa wilayah-wilayah di kelurahan yang menjadi prioritas pembangunan di tahun berjalan dan yang akan datang itu usulkan kemudian masuk APBD. Alokasi anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan hidup (Sarplus) di tingkat kecamatan diperkirakan minimal Rp 200 juta akan digunakan untuk kegiatan pemeliharaan infrastruktur lingkungan dan anggaran lainnya. penanganan di kecamatan masih berusaha mengubah mindset

masyarakat. Pemerintah kota mengalokasikan anggaran untuk kecamatan agar penanganan usulan lebih efektif dan tepat.

Perencanaan

Peneliti melakukan wawancara tentang perencanaan musrenbang infrastruktur jalan di Kota Semarang diawali dengan wawancara kepada Sub Koordinator P2MP sebagai berikut:

Ada musrenbang dan pramusrenbang. Pra musrenbang kayak merumuskan bahannya biar musrenbang tidak kepanjangan. Harapannya usulan masyarakat bisa diimplementasikan berdasarkan pemetaan prioritas.

(wawancara penelitian, 13 November 2024)

Hal ini sejalan dengan pendapat Kasi Pembangunan Kecamatan Banyumanik

Kita ada website, instagram, youtube tetapi info hanya proses penyelenggaraannya tidak menginfokan kegiatan yang rincian bahwa hasilnya ini karena itu krusial masih bersifat semi rahasia. Sekarang kita ada kegiatan kalo di share secara terbuka pasti ada saja orang yang memanfaatkan.

(wawancara penelitian, 19 November 2024)

Hal ini sejalan dengan pendapat Ketua Karang taruna Kecamatan Banyumanik

Kalau usulan itu tidak menjadi prioritas, maka kami hanya melihat musrenbang sebagai perencanaan saja

Kami melihat kami diundang sebagai syarat saja untuk memenuhi undangan peserta dan sebagai syarat terjadinya musrenbang, kita negosiasi belum pernah terjadi.

(wawancara penelitian, 22 November 2024)

Berdasarkan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa hasil musrenbang di share melalui media resmi pemerintah. Harapannya usulan masyarakat bisa diimplementasikan berdasarkan pemetaan prioritas.

Pelaksanaan

Peneliti melakukan wawancara dengan 3 informan untuk mengetahui implementasi dengan diawali Sub Koordinator Bidang Infrastruktur Jalan BAPPEDA kota Semarang sebagai berikut:

Hanya manage jadwal adminnya manut sistemnya bukan develop sistemnya. Dulu kita punya hubungan baik dengan World Bank pas covid kita memberikan proposal bagaimana musrenbang itu dikembangkan, proses sistemnya bagaimana masih kita develop. Kendala SIPD belum bisa mengeksplorasi, kita bisa mengolah dll. “wawancara penelitian, 13 november 2024).

Selain itu, peneliti wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Kasi Pembangunan Kecamatan Banyumanik

Tingkat kepuasan macam-macam. Dalam pelaksanaan kadang kontraktor kadang dapat yang bagus ya pasti puas, yang biasa ya kita jadi kurang puas akan ada kriti, secara keseluruhan mereka puas karena kita kasih kebebasan gagasan. Kalau ada yang salah ya disampaikan. Selama ini RW masih ego sektoral, aku harus dapat maka hasilnya tidak maksimal.

(wawancara penelitian, 19 November 2024)

Selain itu, peneliti wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Ketua Karang Taruna Kecamatan Banyumanik

Pasti ada karena harus sejalan dengan RPJM, RPJP. Kalau tidak ada fasilitator tidak bisa mencapai tujuan, memang saya pernah ikut kegiatan dengan Walikota sejauh ini musrenbang pembangunan fisik tapi usulan yang sejalan belum ada contohnya, ketahanan pangan pengentasan kemiskinan padahal harusnya ada

(wawancara penelitian, 22 November 2024)

Gambar 3.9 Daftar Realisasi Anggaran Kecamatan Banyumanik

Form Cam. 3

DAFTAR SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN MELALUI FASILITASI MUSRENBANG KELURAHAN

Kecamatan : BANYUMANIK

No Urut Prioritas	Jenis Kegiatan	Lokasi	Kelurahan	RW	RT	Volume	Usulan Anggaran (Rp)	Usulan Baru / Lama	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KELURAHAN PUDAKPAYUNG							1.267.000.000		
1.	Pengaspalan	Jl. Pudakwangi	PUDAKPAYUNG	1	1	500 meter	80.000.000	Baru	Alokasi Dasar / Afirmasi
2.	Pengaspalan	Gang Sido Makmur	PUDAKPAYUNG	2	2	500 meter	80.000.000	Baru	Alokasi Dasar / Afirmasi
3.	Saluran Tuk Buntung	Jl. Kali Tuk Buntung	PUDAKPAYUNG	3	3	500 meter	80.000.000	Baru	Alokasi Dasar / Afirmasi
4.	Pavingisasi	Jl. Sewan	PUDAKPAYUNG	4	5	500 meter	80.000.000	Baru	Alokasi Dasar / Afirmasi
5.	Rehab Gapura	Jl. Ngasem raya	PUDAKPAYUNG	5	1	60 m ³	80.000.000	Baru	Alokasi Dasar / Afirmasi
6.	Pengaspalan	Jl. Pudaksari	PUDAKPAYUNG	6	2	500 meter	80.000.000	Baru	Alokasi Dasar / Afirmasi
7.	Saluran	Jl. Siroto I RT 1	PUDAKPAYUNG	7	2	500 m	80.000.000	Baru	Alokasi Dasar / Afirmasi
8.	Balai RW VIII	Jl. Rinenggo asri	PUDAKPAYUNG	8	4	48 M2	80.000.000	Baru	Alokasi Dasar / Afirmasi
9.	Rehab Balai RT 08 RW 10	Jl. Satria Raya	PUDAKPAYUNG	10	8	18 M2	80.000.000	Baru	Alokasi Dasar / Afirmasi
10.	Pengaspalan	Jl. Pendet Selatan III	PUDAKPAYUNG	11	13	500 meter	80.000.000	Baru	Alokasi Dasar / Afirmasi
11.	Balai RW XII	Jl. Kepodang Raya I	PUDAKPAYUNG	12	2	36 M2	80.000.000	Baru	Alokasi Dasar / Afirmasi
12.	Pengaspalan	Jl. Rinenggo asri	PUDAKPAYUNG	14	6	500 meter	80.000.000	Baru	Alokasi Dasar / Afirmasi
13.	Saluran	Jl. Griya Payung Indah	PUDAKPAYUNG	15	3	500 meter	80.000.000	Baru	Alokasi Dasar / Afirmasi
14.	Talud	Jl. Perum Griya Payung Asri	PUDAKPAYUNG	16	4	500 M2	80.000.000	Baru	Alokasi Dasar / Afirmasi
15.	Talud sungai di bawah Masjid Al Falaq	Jl. Payung Prasetya Raya	PUDAKPAYUNG	13	1	200 M2	80.000.000	Baru	Alokasi Dasar / Afirmasi
16.	Rehab Balai Kelurahan Pudakpayung	Jl. Perintis Kemerdekaan	PUDAKPAYUNG	4	2	200 M2	67.000.000	Baru	Alokasi Dasar / Afirmasi
KELURAHAN GEDAWANG							950.000.000		

Sumber : Dokumen Kecamatan Banyumanik

Berdasarkan wawancara dan observasi maka dapat diambil kesimpulan tingkat kepuasan macam-macam. Dalam pelaksanaan kadang kontraktor kadang dapat yang bagus puas. Untuk penggunaan sistem

Hanya memanage jadwal adminnya manut sistemnya bukan develop sistemnya.

Monitoring dan Evaluasi

Peneliti melakukan wawancara tentang evaluasi dan pemantauan musrenbang infrastruktur jalan di Kota Semarang diawali dengan wawancara kepada Sub Koordinator P2MP sebagai berikut:

Ngga bisa dulu malah bisa. Semenjak SIPD malah ngga bisa dibaca masyarakat. tidak ada versi pabriknya. Makanya SIPD untuk beberapa daerah yang sudah advance seperti Semarang, Surabaya malah kemunduran itu daerah terpencil itu kemajuan. Itu jadi notulensi di musrenbang akan ada kritik dan saran, makanya kita tetap mempertahankan musrenbang itu kita bikin sendiri bukan hasil SIPD karena kami terus beradaptasi dengan dinamika masyarakat. Tujuan kami sendiri agar terus berproses. Iya per tahun terus meningkat pertahun semakin baik dilihat dari pesertanya. Kalo dari tingkat efektivitasnya dilihat dari jumlah pesertanya, kalau dulu cuman 30. Pakai manual aja, nanti kita publish di RKA ada, dulu bisa melihat, terbatas fitur publik, hanya admin aja, dari rw mana? Siapa? (wawancara penelitian, 13 November 2024)”

Hal ini sejalan dengan pendapat Kasi Pembangunan Kecamatan

Evaluasi pelaksanaan musrenbang kita evaluasi sendiri karena kemarin gimana kedepan kita sudah menyusun sebagus mungkin tapi dalam pelaksanaan bisa jadi kita menyediakan bahan yang kita sampaikan kurang jumlah atau penjelasan itu yang jadi evaluasi. Tempat. Tempat itu di kecamatan ada usul, paling kalau pelaksanaannya sudah pasti dievaluasi. Saya selaku penanggung jawab pasti memperjuangkan usulan Kalau sampai lolos nanti auditor

Hal ini sejalan dengan pendapat Ketua Karang Taruna Kecamatan Banyumanik

Dari wakil masyarakat Rt rw bagaimana mereka memperjuangkan aspirasi masyarakat agar masyarakat bisa diimplementasikan. Ada evaluasi, setiap agenda dan kegiatan ada evaluasi monitoring dari pra sampai musrenbang. Kota memberikan rambu-rambu kegiatan, waktu pelaksanaan, tema pembangunan yang menjadi dasar riset yang kuat untuk supaya bisa relevan. (wawancara penelitian, 22 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa evaluasi diadakan setiap setelah kegiatan musrenbang selesai.

Dikutip dari Dokumen Kecamatan Banyumanik evaluasi sangatlah diperlukan guna menunjang keberhasilan program yang telah disepakati Bersama, evaluasi bisa berupa sumbang saran dalam menentukan perumusan masalah dan rekomendasi menuju perbaikan baik di tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan pembangunan dengan melihat hasil kerja yang ada. Pada akhirnya evaluasi dilakukan di akhir tahun.

Berdasarkan observasi evaluasi sangatlah diperlukan guna menunjang keberhasilan program yang telah disepakati Bersama, evaluasi bisa berupa sumbang saran dalam menentukan perumusan masalah dan rekomendasi menuju perbaikan baik di tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan pembangunan dengan melihat hasil kerja yang ada. Pada akhirnya evaluasi dilakukan di akhir tahun.

Berdasarkan wawancara dan observasi, pelaksanaan program dapat disimpulkan bahwa tingkat penggunaan anggaran 100%. Tingkat kepuasan macam-macam tergantung. Evaluasi diperlukan untuk menunjang keberhasilan program yang telah disepakati. Evaluasi bisa berupa sumbang saran dalam menentukan perumusan masalah dan rekomendasi menuju perbaikan baik di tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan pembangunan dengan melihat hasil kerja yang ada. Hambatannya ketika penggunaan sistem kurang berjalan lancar karena menganut sistem pemerintah.

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan, kesempatan dalam musrenbang infrastruktur jalan di Kota Semarang dapat disimpulkan pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa wilayah-wilayah di kelurahan yang menjadi prioritas pembangunan di tahun berjalan dan yang akan datang itu usulkan kemudian masuk APBD. evaluasi sangatlah diperlukan guna menunjang keberhasilan program yang telah disepakati. tingkat kepuasan macam-macam. Dalam pelaksanaan kadang kontraktor kadang dapat yang bagus puas. hasil musrenbang di share melalui media resmi pemerintah. Harapannya usulan masyarakat bisa diimplementasikan berdasarkan pemetaan prioritas.

2. Kemauan

Minat

Peneliti melakukan wawancara kepada 2 informan untuk mendeskripsikan persepsi dalam musrenbang infrastruktur jalan di Kota Semarang yang akan diawali dengan pendapat dari Sub Koordinator P2MP BAPPEDA Jawa tengah

Sudah optimalnya, kami sudah sounding itu juga sudah disiarkan di tv, cuman seberapa banyak masyarakat yang senang dengan cara formal, itu yang jadi kendala, padahal itu penting bagi kehidupan mereka. Kami sudah berusaha sounding di media sosial, whatsapp, live streaming.

“(wawancara penelitian, 22 November 2024)”

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sub Koordinator Bidang infrastruktur BAPPEDA Kota Semarang

Ya cukup baik, new rembang kita develop. Kami nekat mengembangkan dengan World Bank agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang masalah dia dilapangan itu apa?gambaran? agar tidak ada usulan yang lain. Itu penting. Berdasarkan prioritas misalnya penanganan banjir. Ketika mereka datang di musrenbang mereka sudah tahu apa yang mereka usulkan. Wakil Rt sudah bisa menyeleksi usulan apa. (wawancara penelitian, 26 November 2024)

Berdasarkan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa sounding di media sosial resmi pemerintah berhasil memicu penambahan peserta dan adanya anggaran untuk usulan musrenbang di tingkat kecamatan.

Sikap

Peneliti melakukan wawancara dengan informan Kasi Pembangunan Kecamatan Banyumanik sebagai berikut:

Pendapat masyarakat tentang musrenbang ya semakin baik dengan adanya pembagian anggaran ke kecamatan. Dari jaman dahulu warga diberi kebebasan mengusulkan apapun usulan dari usulan itu dirembug tapi semangat membangun jadi tidak harus yang mereka usulkan itu tercapai, kita pengen beajar menghilangkan ego sektoral bisa menghormati orang lain. Kalau memang tempat belum penting banget, secara sukarela harus dilepaskan. Kedepan pasti yang dibantu juga bergantian. (wawancara penelitian, 19 November 2024)

Berbeda dengan pendapat dari Ketua LPMK Kecamatan Banyumanik

Peserta musrenbang antusiasme ya formatif saja , sangat tinggi tidak rendah tidak artinya. Aspirasi sudah ditampung ya sudah selesai

(wawancara penelitian, 26 november 2024)

Berdasarkan wawancara maka dapat disimpulkan Pendapat masyarakat tentang musrenbang ya semakin baik dengan adanya pembagian anggaran ke kecamatan. Peserta musrenbang antusiasme ya formatif saja, sangat tinggi tidak rendah tidak artinya. Aspirasi sudah ditampung ya sudah selesai.

Berdasarkan wawancara maka dapat disimpulkan kemauan masyarakat tentang musrenbang ya semakin baik dengan adanya pembagian anggaran ke kecamatan. Peserta musrenbang antusiasme ya formatif saja, Aspirasi sudah ditampung ya sudah selesai. Sounding di media sosial resmi pemerintah berhasil memicu penambahan peserta dan adanya anggaran untuk usulan musrenbang di tingkat kecamatan.

3. Kemampuan

Membangun

Peneliti melakukan wawancara tentang pengelolaan musrenbang infrastruktur jalan di Kota Semarang diawali dengan wawancara kepada Sub Koordinator Bidang Perencanaan Infrastruktur BAPPEDA Kota Semarang

Ada dari Bappeda dan pemerintah kota semarang serta pemerintah ke bawahnya kecamatan, kelurahan rt rw. Wajib yang disetujui apa, yang penting kesepakatan usulan. Karena sistem SIPD website belum bisa menampilkan hasil usulan. Pemerintah pengennya semua sama rasa tapi di semarang malah kemunduran, kalo ada pengembangan sistem malah dilaporkan, kadang lemot belum reliable banget, malam-malam harus bekerja menginput berhari-hari harusnya difasilitasi. 1 inputan 1 jam 2 jam padahal usulannya hampir 300 an. (wawancara penelitian, 13 november 2024)

Hal ini sejalan dengan pendapat dengan pendapat Ketua LPMK Kecamatan banyumanik

Fungsi LPMK ada pengawasan, perencanaan dan pemberdayaan masyarakat. Di musrenbang LPMK sebagai moderator, fasilitator dan koordinator untuk mencari kesepakatan dari setiap usulan-usulan setiap kelurahan sehingga bidang pembangunan dan sebagainya itu yang mengendalikan biasanya dari pemerintah. Ada LPMK ada di setiap kelurahan di kecamatan namanya forum LPMK kecamatan, di tingkat kota juga ada

(wawancara penelitian, 26 November 2024)

Hal ini sejalan dengan pendapat Ketua LPMK Kecamatan Banyumanik

Saran saya LPMK diwawancara karena yang berperan di musrenbang justru LPMK. LPMK itu lembaga masyarakat

di level kelurahan hingga kecamatan dan yang memimpin pelaksanaan musrenbang dan mengesahkan semuanya bisa sepakat dan disampaikan di forum itu yang memimpin justru LPMK. Mereka akan bicara lebih detail terkait dengan fungsi legislasi dari LPMK karena mereka menerima dan fungsinya salah satunya menyampaikan aspirasi masyarakat salah satunya pembangunan (wawancara penelitian, 22 November 2024)

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa pengelolaan musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan itu LPMK, di kota Bappeda Bidang P2MP

Peluang

Untuk mengetahui peluang dalam musrenbang infrastruktur jalan di Kota Semarang peneliti melakukan wawancara dengan Subordinator P2MP BAPPEDA Jawa Tengah sebagai berikut:

Biasa itu ada, kami biasanya memberikan dalam bentuk bantuan keuangan, mereka ada usulan, Kalau kota Semarang pernah meminta bantuan lampu penerangan jalan di daerah Segar Bencar, macam-macam. Bantuan keuangan ada menu-menunya ya, cara provinsi mengintervensi kabupaten/kota ada bantuan keuangan yang sifatnya menyelesaikan permasalahan kota yang relate dengan kewenangan provinsi, jadi mereka usulan ke provinsi. Kami tidak ada batasan berapa persen yang pasti kalau sifatnya mandatory ya kami penuhi mandatorynya nanti sesuai eksekutor lain Infrastruktur sebelum disalurkan kementerian atau kewenangan terkait atau dinas. Kalau provinsi jelas, peserta tidak memperhatikan kewenangan nya mana, oh ini lebih baik ditangani sesuai kewenangannya. Kalau yang provinsi ya sudah diinformasikan ke dinas teknisnya. Bisa jadi, karena penyelesaian masalah dari hulu ke hilir. Kami pernah overtime september baru di dok, harusnya bulan juli selesai. Pada saat itu, faktor politik dan kepastian waktu narasumber pusat dengan jadwal kepala daerah, tiba-tiba waktunya. Tidak, masyarakat cenderung hanya usul-usul saja.

“(wawancara penelitian, 22 November 2024)”

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kasi Pembangunan
Kecamatan Banyumanik

Di dalam anggaran musrenbang ada porsinya bahwa 30% dari anggaran untuk kegiatan maksimal 35% anggaran untuk kegiatan pemberdayaan. Fokusnya nanti masing-masing di wilayah bawah kan nggak mungkin fokus di kegiatan pertanian mungkin disana fokus ke pengendalian nyamuk, cara pengolahan ikan, jadi tiap kecamatan pasti beda.

(wawancara penelitian, 19 November 2024)

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ketua LPMK Kecamatan
banyumanik

di tingkat kelurahan 100% artinya dana-dana kelurahan bisa diterjemahkan untuk kegiatan pembangunan, 100% yang direncanakan di kelurahan. Akan tetapi jika itu masuk ke kedinasan ya dana-dana secara bertahap paling 30%
(wawancara penelitian, 26 November 2024)

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa tingkat
penggunaan anggaran 100%

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kemampuan musrenbang infrastruktur jalan di Kota Semarang dapat disimpulkan pengelolaan musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan itu LPMK, di kota Bappeda Bidang P2MP. Tingkat realisasi anggaran 100%

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, faktor pendorong dalam musrenbang infrastruktur jalan di Kota Semarang dapat disimpulkan pengelolaan musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan itu LPMK, di

kota Bappeda Bidang P2MP. Tingkat realisasi anggaran 100%. Kemauan masyarakat tentang musrenbang ya semakin baik dengan adanya pembagian anggaran ke kecamatan. Peserta musrenbang antusiasme ya formatif saja, Aspirasi sudah ditampung ya sudah selesai. Sounding di media sosial resmi pemerintah berhasil memicu penambahan peserta dan adanya anggaran untuk usulan musrenbang di tingkat kecamatan. Pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa realisasi usulan yang telah disetujui kemudian masuk APBD. Evaluasi sangatlah diperlukan guna menunjang keberhasilan program yang telah disepakati. tingkat kepuasan macam-macam. Dalam pelaksanaan kadang kontraktor kadang dapat yang bagus puas. hasil musrenbang di share melalui media resmi pemerintah. Harapannya usulan masyarakat bisa diimplementasikan berdasarkan pemetaan prioritas.

3.3.2. 2. Faktor Penghambat Musrenbang Infrastruktur Jalan di Kota

Semarang

1. Demografi

Usia

Peneliti melakukan wawancara kepada 5 informan untuk mendeskripsikan usia dalam musrenbang infrastruktur jalan di Kota Semarang yang akan diawali dengan pendapat dari Sub Koordinator P2MP BAPPEDA Jawa Tengah

Peserta diberikan informasi tetapi masyarakatnya cenderung kurang peduli dalam mengawasi usulan. Peserta

dipilih secara terbuka semua kalangan bisa mengikuti. Pendidikan beragam ya. Untuk narasumber diperhatikan namun peserta tidak

(wawancara penelitian, 22 November 2024)

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kasi Pembangunan Kecamatan Banyumanik

Materi musrenbang di share secara online dan offline saat pembagian undangan kepada para peserta musrenbang, pengumuman musrenbang juga dishare melalui media sosial resmi Pemerintah Kecamatan Banyumanik dan grup whatsapp.

(wawancara penelitian, 19 November 2024)

Berdasarkan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa peserta dipilih secara terbuka semua kalangan bisa mengikuti. Untuk narasumber diperhatikan namun peserta tidak.

Pendidikan

Peneliti melakukan wawancara tentang pendidikan peserta musrenbang infrastruktur jalan di Kota Semarang diawali dengan wawancara kepada Sub Koordinator Bidang perencanaan Infrastruktur BAPPEDA Kota Semarang

Pengembangan SDM dengan diklat-diklat segala macam ya dulu kan kita punya staf yang tahu IT. kita bisa sendiri. Ada tim ahlinya sendiri. Pedomannya semua menggunakan Peraturan Walikota terkait Musrenbang Perwakilan komunitas yang diundang setiap musrenbang diundang dalam per kecamatan di serahkan kepada Camat. Kalo musrenbang kota semua kita undang semua. Kalo misalnya tidak diundang tapi mau datang di peraturan perwali tidak boleh kita tolak, misal komunitas apa? Mereka punya kepentingan mau usul apa datang aja nggak apa-apa, tidak

boleh dilarang. Agar usulannya tidak kalah atau tidak terbatas apalagi usulan perempuan dan anak-anak biasanya kalah dengan usulan fisik tadi dan pendidikan.

(wawancara penelitian, 13 November 2024)

Hal ini sejalan dengan pendapat Ketua Karang Taruna Kecamatan Banyumanik

Nggak sih, sesuai dengan agenda karena pelaksanaan di 16 Kecamatan agenda sudah diatur selesai supaya tidak bertabrakan Nggak sih, sesuai dengan agenda karena pelaksanaan di 16 Kecamatan agenda sudah diatur selesai supaya tidak bertabrakan.

(wawancara penelitian, 22 November 2024)

Berdasarkan wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa narasumber yang diundang memperhatikan kompetensi.

Berdasarkan wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa demografi peserta dalam musrenbang infrastruktur jalan dapat disimpulkan bahwa narasumber yang diundang memperhatikan kompetensi. Peserta dipilih secara terbuka semua kalangan bisa mengikuti. Untuk narasumber diperhatikan namun peserta tidak.

2. Ekonomi

Penghasilan

Peneliti melakukan wawancara kepada 5 informan untuk mengetahui tingkat pekerjaan yang digunakan dalam musrenbang yang diawali dengan wawancara kepada Sub Koordinator Bidang Infrastruktur jalan BAPPEDA Kota Semarang sebagai berikut:

Tidak, selama kita punya datanya LSM, Komunitas, diundang semua, misal ada yang kelewat mau datang nggak

apa-apa. . Komunitas Kota Lama, ada himpunan wanita penyandang disabilitas, komunitas pengusaha dan pemilik bangunan di Kota Lama itu ada, komunitas trotoar (pejalan kaki. Yang sering aktif datang LLC Kajeham di bidang perlindungan perempuan, Pattiro, YLKI itu juga sering aktif. (wawancara penelitian, 13 November 2024)

Hal ini sejalan dengan pendapat Ketua LPMK Kecamatan Banyumanik

Di dividen yang mewakili ini juga mencerminkan kaitannya dengan pengetahuan, keterwakilan, kebutuhan dari masyarakat yang ada, misal PKK memperjuangkan terkait dengan pemberdayaan perempuan, LPMK memperjuangkan bidang-bidang yang ada seperti ekonomi, sarana dan prasarana dan lainnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LBKM) itu mewakili terkait dengan ekonomi masyarakat

(wawancara penelitian, 26 November 2024)

Hal ini sejalan dengan pendapat Ketua Karang Taruna Kecamatan Banyumanik

Dari kelurahan pasti LPMK yang mengerti untuk mengawal usulan sampai di tingkat kecamatan, biasanya human eror ya, apa yang sudah disepakati pembacaan usulan di depan pimpinan kepala daerah kok ada yang terlewat, itu yang menjadi satu poin penting setiap keluraha mengirim lurah dan LPMK. Selain itu, lembaga lain pasti diundang tidak melihat level pendidikan tapi lembaga yang berkepentingan untuk mengikuti kepentingan musrenbang.

(wawancara penelitian, 22 November 2024)

Berdasarkan wawancara disimpulkan bahwa peserta terbuka untuk siapapun yang ingin mengikuti tetapi, kami undang narasumber yang berkaitan instansi politik semua.. stakeholder yang hadir Komunitas Kota Lama, ada himpunan wanita penyandang

disabilitas, komunitas pengusaha dan pemilik bangunan di Kota Lama itu ada, komunitas trotoar (pejalan kaki).

Pekerjaan

Peneliti melakukan wawancara tentang pekerjaan peserta musrenbang infrastruktur jalan di Kota Semarang diawali dengan wawancara kepada Sub Koordinator Bidang Perencanaan Infrastruktur

Stakeholder Bappeda, kecamatan, delegasi kelurahan, parpol, kelompok bidang pendidikan. Berdasarkan peraturan No 25 Tahun 2024 tentang ada beberapa stakeholder dalam musrenbang.

(wawancara penelitian, 13 november 2024)

Hal ini sejalan dengan pendapat Kasi pembangunan Kecamatan Banyumanik :

Kalau di kelurahan itu yang ikut ya pasti dari RT Rw, darma wanita PKK, Karang Taruna, LPMK, Polsek koramil, ada sebagian mengundang Puskesmas. Tingkat kecamatan yaitu koramil kecamatan, forum LPMK, forum dharma wanita kecamatan, tim Penggerak PKK Kecamatan, Karang Taruna Kecamatan, tokoh masyarakat (keagamaan, KUA, pengusaha sekitar. Dari komunitas ditempat kita tidak ada paling bank sampah. KWT kelompok tani, kelompok seni, perwakilan dari pelajar, Korsapen, kayaknya itu mbak selain tim dinas dari kota. Tim Dinas kota. Stakeholder ditentukan dari perwakilan masyarakat, lembaga, komunitas dan Pemerintah Kota Semarang. (wawancara penelitian, 19 November 2024)

Hal ini sejalan dengan pendapat Ketua LPMK Kecamatan Banyumanik:

Kelembagaan-kelembagaan di tingkat kecamatan, muspika kecamatan (camat dan sekretaris kecamatan, Koramil, kapolsek itu pasti pendamping camat, forum LPMK, PKK, Karang taruna, tokoh-tokoh masyarakat, Walikota.. Saya tidak tahu bersih karena undangan sudah by name, dari lembaga mana itu sangat banyak, kami tidak jeli, setahu saya kecamatan baik rapat rutin lintas sektor setiap bulan undangan by name dan lembaga (wawancara penelitian, 22 November 2024)

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa stakeholder yang hadir dalam forum musrenbang yaitu Kalau di kelurahan dari RT Rw, darma wanita PKK, Karang Taruna, LPMK, Polsek koramil, ada sebagian mengundang Puskesmas. Tingkat kecamatan yaitu koramil kecamatan, forum LPMK, forum dharma wanita kecamatan, tim Penggerak PKK Kecamatan, Karang Taruna Kecamatan, tokoh masyarakat (keagamaan, KUA, pengusaha sekitar. Dari komunitas ditempat kita tidak ada paling bank sampah. KWT kelompok tani, kelompok seni, perwakilan dari

Dikutip dari *Dokumen Bappeda Jawa Tengah 2024* yang menyatakan bahwa peserta yang akan hadir Musrenbang Provinsi Tahun 2023 untuk penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, unsur pemerintah pusat, para Bupati/Walikota, Perangkat Daerah Provinsi, para Kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota, pejabat instansi vertikal di Provinsi, para delegasi mewakili peserta musrenbang kabupaten/kota, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur

pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan serta unsur lain yang dipandang perlu.

Dikutip dari laman resmi pemerintah Kelurahan Grindiksono, musrenbang Kelurahan Gisikdrono dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Lurah Gisikdrono Priyatna, SH beserta perangkat, babinsa, bhabinkamtibmas, ketua RW se-Kelurahan Gisikdrono, perwakilan warga, tokoh masyarakat, lembaga, serta Muspikel Gisikdrono. Dengan suasana yang penuh semangat, bersama-sama membahas kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta merumuskan prioritas pembangunan yang akan dijalankan.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa peserta musrenbang terdiri dari Walikota, Bappeda Kota Semarang, OPD. Komunitas, LSM/ormas, unsur perwakilan kecamatan, Penggerak PKK Kecamatan, Karang Taruna Kecamatan, tokoh masyarakat (keagamaan, KUA, pengusaha sekitar, BUMN, kelompok pemberdayaan perempuan, kelompok disabilitas dan komunitas lain

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi maka dapat disimpulkan bahwa output dalam musrenbang infrastruktur jalan di Kota Semarang sebagai berikut: sarana musrenbang lengkap meskipun anggarannya terbatas. narasumber yang diundang memperhatikan kompetensi.

peserta musrenbang terdiri dari Walikota, Bappeda Kota Semarang, OPD. Komunitas, LSM/ormas, unsur perwakilan kecamatan, Penggerak PKK Kecamatan, Karang Taruna Kecamatan, tokoh masyarakat (keagamaan, KUA, pengusaha sekitar, BUMN, kelompok pemberdayaan perempuan, kelompok disabilitas dan komunitas lain.

Untuk faktor ekonomi dalam musrenbang infrastruktur jalan di Kota Semarang dapat disimpulkan bahwa narasumber yang diundang memperhatikan kompetensi dan peserta musrenbang beragam bidang pekerjaan.

Berdasarkan wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor penghambat dalam musrenbang infrastruktur jalan dapat disimpulkan bahwa narasumber yang diundang memperhatikan kompetensi. Peserta dipilih secara terbuka semua kalangan bisa mengikuti. Untuk narasumber diperhatikan namun peserta tidak. narasumber yang diundang memperhatikan kompetensi dan peserta musrenbang beragam bidang pekerjaan. Peserta diberikan informasi tetapi masyarakatnya cenderung kurang peduli dalam mengawasi usulan. Peserta dari perwakilan masyarakat banyak yang mengusulkan terbatas sesuai dengan kewenangan organisasinya.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Infrastruktur Jalan di Kota Semarang berjalan sudah cukup baik namun keberjalanannya belum efektif

- a. Dilihat dari tingkat antusiasme peserta yang semakin tinggi karena sistem pembagian anggaran per kelurahan.
Keterwakilan masyarakat juga tercermin. Adanya media live streaming sebagai bentuk transparansi masyarakat. Musrenbang dilaksanakan berdasarkan pedoman pada Peraturan Walikota Nomor 5 tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Rembug warga dan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan. Kelebihan proses musrenbang infrastruktur jalan di Kota Semarang
- b. Prinsip perencanaan partisipatif dapat diterapkan dengan baik dalam musrenbang sebagai berikut:
 - a Peserta bisa berpendapat secara terbuka
 - b Usulan musrenbang direalisasikan secara bertahap berdasarkan list prioritas usulan dan kewenangan dinas
 - c Dinas mensebariskan usulan dengan daftar prioritas pembangunan
 - d Usulan dilihat dari kepentingan, kondisi lingkungan dan urgensi masalah

- e Terdapat live streaming, media sosial resmi pemerintah, buku pedoman, link e-rembugan Jawa Tengah
- c. Kekurangan proses musrenbang infrastruktur jalan di Kota Semarang
 - a Narasumber disesuaikan dengan tema pembangunan dan dipilih langsung oleh Bappeda
 - b Belum banyak masyarakat yang mengetahui ketersediaan link untuk menghimpun usulan dan penggunaan e-pokir belum maksimal
 - c Sistem SIPD Kemendagri menghambat transparansi data kepada masyarakat

4.1.1. Hal Yang Menjadi Faktor Pendukung Musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang) Infrastruktur Jalan di Kota Semarang

1. Terdapat pengelolaan musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan itu LPMK, di kota Bappeda Bidang P2MP.
2. Kemauan masyarakat tentang musrenbang ya semakin baik dengan adanya pembagian anggaran ke kecamatan.
3. Sounding di media sosial resmi pemerintah berhasil memicu penambahan peserta dan adanya anggaran untuk usulan musrenbang di tingkat kecamatan.

4.1.2. Hal Yang Menjadi Faktor Penghambat Musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang) Infrastruktur Jalan di Kota Semarang

- a Peserta diberikan informasi tetapi masyarakatnya cenderung kurang peduli dalam mengawasi usulan.
- b Peserta dari perwakilan masyarakat banyak yang mengusulkan terbatas sesuai dengan kewenangan organisasinya.
- c Masih terdapat keberpihakan keputusan LPMK
- d Implementasi realisasi anggaran kualitasnya tergantung pengerjaan vendor
- e Anggaran terbatas
- f Kemunduran pelaksanaan musrenbang karena beberapa faktor.
- g Evaluasi sangat diperlukan guna menunjang keberhasilan program yang telah disepakati.
- h Tingkat kepuasan macam-macam tergantung pada kinerja vendor yang menangani

4.2. Saran

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) infrastruktur jalan di Kota Semarang disarankan untuk:
 1. Melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat tentang musrenbang, penggunaan link e-rembugan
 2. Transparansi data secara terbatas bisa diberikan kepada masyarakat melalui laman resmi Pemerintah Kota Semarang

3. Melakukan evaluasi berkala dalam setiap kegiatan musrenbang dimanapun tingkatan
2. Dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan partisipasi masyarakat dalam
 1. Pembangunan infrastruktur dilakukan bertahap berdasarkan urgensi dan sesuai dengan tingkat kewenangan
 2. Memilih dan memonitoring vendor untuk merealisasikan usulan
 3. Pemerintah Kota Semarang melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengawal realisasi usulan musrenbang.
 3. Riset Lanjutan

Bappeda Kota Semarang sebelum adanya sistem SIPD yang harus mengikuti pemerintah, masyarakat bisa melihat transparansi data melalui website resmi Bappeda. Namun ketika terdapat peraturan baru dari Kemendagri yang mewajibkan semua daerah di Indonesia mengikuti sistem SIPD pemerintah pusat sehingga transparansi data hanya bisa dilihat kalangan tertentu saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dokumen Kota Semarang Dalam Angka 2024 oleh BPS Kota Semarang

Laporan Penyelenggaraan Dalam Penyusunan Rancangan Awal RPJPD 2025-2045 dan RKPD Tahun 2025 oleh Sekretaris Daerah Kota Semarang

Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045 dan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 oleh DPRD Kota Semarang

BAPPEDA Kota Semarang. (2024). *Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Semarang*. <https://bappeda.semarangkota.go.id/>

BAPPEDA Kota Semarang. (2021). *Peraturan daerah Kota Semarang nomor 6 Tahun 2021 Tentang RPJMD Tahun 2021-2026*. 1–500.

Chouliaraki, L., & Vestergaard, A. (2022). *Routledge Handbook of Humanitarian Communitation*.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang RKPD Kota Semarang Tahun 2023

Pemerintah Kota Semarang. (2024). *Peraturan Wali Kota Semarang nomor 5 Tahun 2024 Tentang pedoman Pelaksanaan Rembug Warga dan Murenbang Kelurahan dan Kecamatan Dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023*.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2024). *Pedoman Musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024*. <https://bappeda.jabarprov.go.id/>

Jurnal

Amaliyah, E. (2023). *Buka Musrenbang Kecamatan, Pemerintah Kota Semarang Fokus Pemberdayaan Masyarakat*.

- Arfid Guampe, F., & Prasetyo, A. (2023). *Perencanaan Pembangunan (Memahami Konsep dan Prakteknya)* (A. Hendrayady, Ed.). CV Media Sains Indonesia. <https://www.researchgate.net/publication>
- Baharuddin, N. A. (2021). *Analisis Kebijakan Deliberatif Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di desa Carawali Kecamatan Watang Pulu*. 1. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/5rfys>
- Bardsley, A. M., Bardsley, D. K., Conedera, M., Pütz, M., Robinson, G. M., & Weber, D. (2021). Environmental Risk and Deliberative Planning in the Locarnese Region of Switzerland. *Environmental Management*, 68(6), 785–801. doi.org/10.1007/s00267-021-01523-5
- Carriquiry, A. (2024). Deliberation in Digital Environments and Toleration: Rethinking the Digital Public Sphere, with Habermas and Beyond Habermas] *Daimon*, (93), 37-54. Retrieved from <https://www.proquest.com/scholarly-journals/deliberación-en-entornos-digitales-y-tolerancia/docview/3112175566/se-2>
- Diskominfo Jawa Tengah. (2023). *Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Tertinggi se-Jateng*.
- Fachriyah, E., Santi, E. T., & Badriyah, R. D. M. (2022). Fenomena Linguistik dalam Realitas Sosial Budaya di Era Covid-19. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(1), 13–24. <https://doi.org/10.30656/lontar.v10i1.4541>
- Fachrul, D. (2023). *Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Masalah Melalui Metode Debat Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa*.
- Fakhira, R., & Salam, R. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. *PENTAHHELIX: Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 143–154.
- Fajar Suryo Antoro, A., & Nurhayati. (2023). Mengurai Rupa Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan di Desa Paya Benua, Negeri Laskara Pelangi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*.
- Kholik, S. (2020). Perencanaan pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 6(2580–0906).
- Kelurahan Grindiksono. (2024). *Musrenbang Kelurahan Grindiksono Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan*.
- Larasati, M. D. (2023). *Meningkatkan Kesejahteraan Melalui Pembangunan Nasional: Sebuah Pendekatan Terintegrasi*.

- Latukolan, M., & Ohoiwutun, Y. (2022). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Kampung Yobeh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(1), 1–14.
- Lindell, M., & Ehrström, P. (2020). Deliberative Walks Citizen Participation in Local-Level Planning Processes. *European Political Science*, 19(3), 478–501. doi.org/10.1057/s41304-020-00243-4
- Mansur, M., Agustang, A., Idhan, A. M., & et all. (2021). Perencanaan Partisipatif Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan APBDes. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(2), 349–362. <https://doi.org/10.37606/publik.v8i2.244>
- Mulyadi, E., Ngarawula, B., & Wahyudi, C. (2023). Development of Stakeholder Satisfaction Dimensions for the Implementation of Development Planning Deliberations (Musrenbang) in East Kutai Regency. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 6, 1–9. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v6-i11-14>
- Muttaqien, M. E. (2023). Konsep Komunikasi Jurgen Habermas Dalam Ide Demokrasi Deliberatif dan Tindakan Komunikatif. *Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(I), 51-64.
- Pemerintah Kota Semarang. (2021). *Visi Misi Kota Semarang*.
- Pemerintah Kelurahan Ngesrep (2024). Kegiatan Pra Musyawarah Rencana pembangunan Tahun 2024 <https://ngesrep.semarangkota.go.id/berita/kegiatan-pra-musyawah-rencana-pembangunan-tahun-2024>
- Pemerintah Kelurahan Grindiksono (2024). Musrenbang Kelurahan Grisikdrono Sinergi Pemerintah dan Masyarakat dalam Mewujudkan-Pembangunan Yang Berkelanjutan. <https://gisikdrono.semarangkota.go.id/detailpost/musrenbang-kelurahan-gisikdrono-sinergi-pemerintah-dan-masyarakat-dalam-mewujudkan-pembangunan-yang-berkelanjutan>
- Pemerintah Kecamatan Semarang Utara (2024). Rapat Koordinasi Menindaklanjuti Hasil Musrenbang Bersama Camat Semarang Utara <https://kecsmgutara.semarangkota.go.id/lpmk/rapat-koordinasi-menindaklanjuti-hasil-musrenbang-bersama-camat-semarang-utara>
- Rafinzar, R., & Khairunnas, K. (2023). Deliberative Planning on Village Policy Making in Pulau Rimau District. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 11(1), 34–68. doi.org/10.34010/agregasi.v11i1.6790

- Rahmat, F., Astagini, A., & Effendy, A. (2020). Kesenjangan Pembangunan di Tingkat Lokal refleksi Atas Implementasi Otonomi Daerah di Indonesia. *Journal of Governance Innovation*, 2, 93–111.
- Rodiyah, I., Sukmana, H., & Musrsyidah, L. (2021). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. UMSIDA Press.
- Sadikin, S., Hannan, S., & Sunani, U. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Ulumanda. *Journal Peqquruang Conference Series*, 3.
- Sampe, S., Betzy Horopue, C., Kumayas, N., & Ratulangi, S. (2023). Penerapan Demokrasi Deliberatif Dalam Droses Penyusunan Peraturan Desa di Desa Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara. *Dinamika Governance Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 13(1), 16–22. doi.org/10.33005/jdg.v11i1.2448
- Shahzad, A., & Muhammad, I. (2024). Iqbal Spiritual Democracy and Habermas's Deliberative Democracy: A comparative Study. *Journal of Islamic Thought and Civilitation*, 14, 137–152.
- Slamet, F. et all. (2023). *Evaluasi Perecanaan Pembangunan Daerah Kelompok 11 Kelas B*.
- Sirega, M., & Nasution, A. et all. (2023). Analisis dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. *Journal Management and Creative Business*, 1.
- Suaning, N. K. (2020). Fungsi Perencanaan Partisipatif Dalam Peningkatan Kinerja Kebijakan Publik di Bidang Pembangunan Daerah. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 120–132.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik*.
- Sukma F, & Saparuli. (2021). Menimbang Demokrasi Deliberatif Dalam Proses Pembentukan Hukum Yang Demokratis di Indonesia. *IBLAMlaw*, 1.
- Taufiq, R., Suhirman, S., Sofhani, T. F., & Kombaitan, B. (2021). Toward Deliberative Ideal With Informality: A Practical Study of rural Planning in Indonesia. *Journal of Settlements and Spatial Planning*, 12, 13–23.
- Tjilen, A. P., & Moento, A. P. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di Kampung Wapeko, Distrik Animha, Kabupaten Merauke. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 363–377. https://doi.org/10.52423/neores.v4i2.84

- Wahyu Nugroho, A., & Pasaribu, R. (2022). Analisis Isi Tagline Semarang HEbat Pada Media Digital: Suara Merdeka.com, Website dan Akun Twitter Pemkot Semarang. *PRecious: Public Relations Journal*, 3, 1–5.
- Warsono, H., Astuti, R., & Marom, A. (2019). *Buku Ajar Teori Administrasi*. FISIP UNDIP.
- Wibisono, L. (2023). *Buka Musrenbang RKPD 2024 Wali Kota Semarang Siap Wujudkan Target Pembangunan*.
- Widiantri, B. K. P. (2024). *Atribut Inovasi Layanan Administrasi Melalui Si Denok di Kota Semarang*.
- Wijaya, F. (2020). *Model Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas dan Solusi Praktik Demokrasi Kita Bawaslu Kota Bogor*.
- Wastiti, A., Purnaweni, H., & Rahman, A. Z. (2021). Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(4), 130-143.
- _____ (2023). Buka Musrenbang di Kecamatan Candisari Ita Beberkan empat Prioritas Pembangunan.
<https://www.beritamerdekaonline.com/2023/02/buka-musrenbang-di-kecamatan-candisari-ita-beberkan-empat-prioritas-pembangunan/>

LAMPIRAN

DOKUMENTASI WAWANCARA

 Gambar 2.1 Narasumber Subkoordinator LP2MP BAPPEDA JAWA TENGAH	 Gambar 2.2 Narasumber Subkoordinator LP2MP BAPPEDA JAWA TENGAH
 Gambar 2.3 Narasumber Bidang Perencanaan Infrastruktur BAPPEDA Kota Semarang	 Gambar 2.4 Narasumber Bidang Perencanaan Infrastruktur BAPPEDA Kota Semarang



Gambar 2.5 Narasumber Kasi pembangunan Kecamatan Banyumanik



Gambar 2.6 Narasumber Kasi Pembangunan Kecamatan Banyumanik



Gambar 2.7 Narasumber Ketua Karang taruna Kecamatan Banyumanik



Gambar 2.8 Narasumber Ketua Karang taruna Kecamatan Banyumanik



Gambar 2.9 Narasumber Ketua LPMK Kecamatan Banyumanik



Gambar 2.9 Narasumber Ketua LPMK Kecamatan Banyumanik